



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah 1 Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264348

NOTA DINAS
NOMOR: 0/ND/Pp/2025

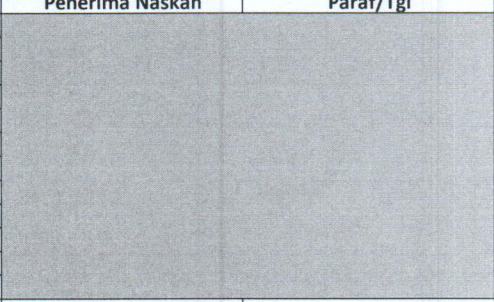
Yth. : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 24 Januari 2025

Sehubungan telah disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024 serta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bakti Martoyoedo
NIP. 19700820 199703 1 002

KARTU KENDALI							
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN							
HAL:							
Permohonan Persetujuan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024							
KONSEP							
NO	Keterangan	Nama/Jabatan	Paraf/Tgl	Penerima Naskah	Paraf/Tgl		
1	Konseptor	Dika Andika Firmansyah					
		Priyan Hadiano					
		Alvika Rachma Putri					
2	Pemeriksa	Ariastuti					
3	Disetujui oleh	SN Permana Lazuardy					
PERSETUJUAN DIREKTUR							
Catatan:					Paraf/Tgl		
Segara & Firim.							
2	Disetujui tgl						
3	No/Tgl Surat						
PERSETUJUAN DIREKTUR JENDERAL							
1	Penerima Naskah						
2	Disetujui tgl						
3	No/Tgl Surat						
ARSIP DAN DISTRIBUSI							
1	Distributor						
2	Arsip						



LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

KATA PENGANTAR

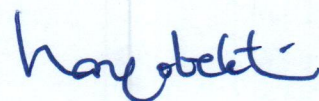
Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Atas izin-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIN merupakan amanah Instruksi Presiden Nomor 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan LAKIN selain merupakan upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan produktivitas kinerja, tetapi juga sebagai laporan pertanggungjawaban Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Melalui LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2024, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja berupa *input*, *Output*, dan *outcome* yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan direalisasikan.

LAKIN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024 disusun berdasarkan masukan dari seluruh sub bidang kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kekurangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Tahun 2024. Demikian laporan ini disusun, semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, 17 Januari 2025
Direktur Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



R. Haryo Bakti Martoyoedo
NIP. 197008201997031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2024.

Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- 2) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

Program dan Kegiatan Pembangunan

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Dit. PPP adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sedangkan, Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali. Berikut adalah Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Revisi Terakhir:

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	I Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	I Rekomendasi Kebijakan

Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 Kegiatan
Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	1 Kegiatan
Kegiatan:	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp25.090.354.000.
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp10.750.000.000.
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp5.504.438646.000.

Revisi Perjanjian Kinerja Dit. PPP Tahun 2024 karena adanya perubahan pada nilai anggaran, jumlah target kesepakatan proyek KPBU perumahan yang siap dikerjasamakan dari 4 (empat) kesepakatan menjadi 2 (dua) kesepakatan dan perubahan target 100 (seratus) rumah tangga mikro kredit perumahan menjadi 1 (satu) layanan fasilitas mikro kredit perumahan.

Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Renstra DJPI) Tahun 2020 – 2024 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 .

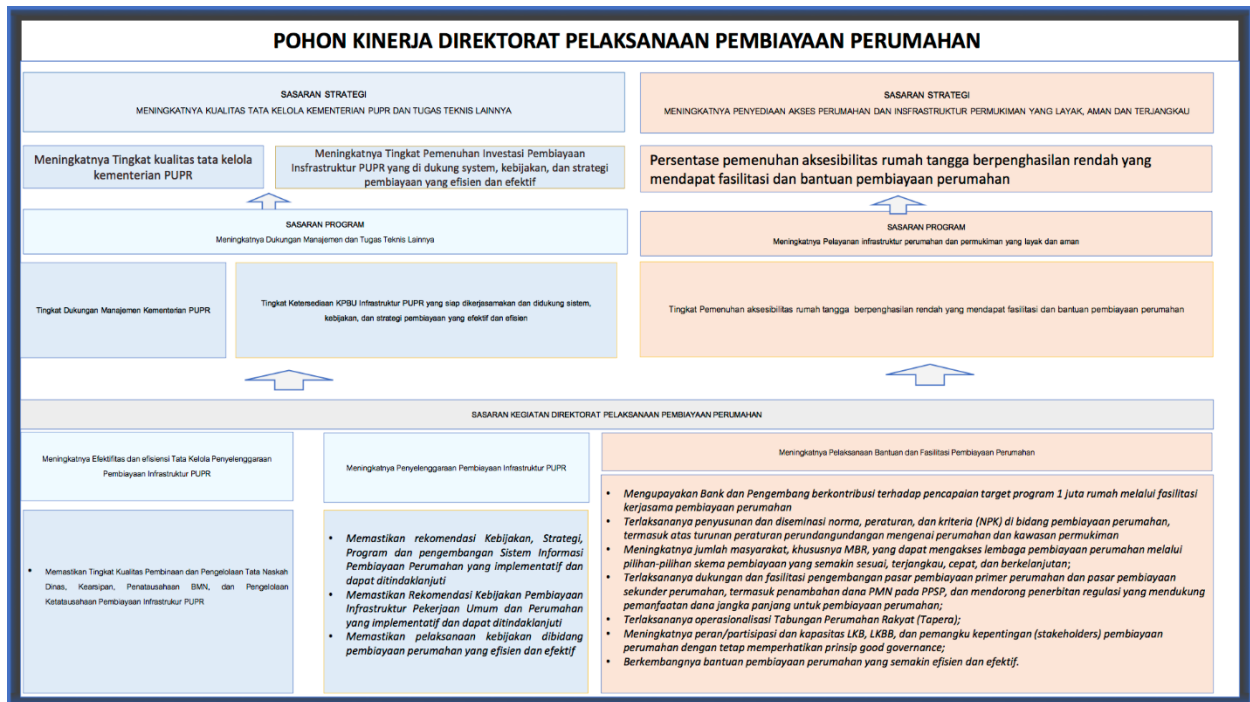
Target Tahun 2024 disandingkan dengan Baseline Tahun 2023

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 disandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	BASELINE 2023	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,56%	25%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	106,07%	100%

Pohon Kinerja

Hubungan antara Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Sasaran Kinerja Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, Sasaran Kinerja Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Strategi untuk memastikan bahwa Sasaran Kinerja tercapai adalah sebagai berikut:



Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 dan BA.999.07 untuk Pengelolaan Subsidi Perumahan dengan Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2024.

Penerbitan DIPA Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 pertama pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebanyak Rp40.732.000.000. DIPA tersebut mengalami 13 (Tiga belas) kali revisi. Pada pagu anggaran sendiri mengalami 5 (lima) kali perubahan yaitu pada DIPA Revisi 03, DIPA Revisi 05, DIPA Revisi 07, DIPA Revisi 08 dan DIPA Revisi 13, sehingga Pagu Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan terakhir sebesar Rp34.676.645.103 Adapun perubahan pagu anggaran sebagai berikut:

1. DIPA Revisi ke 03 tanggal 2 Mei 2024, ada pengurangan pagu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan untuk kegiatan SMAP sebesar Rp550.000.000. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp40.732.000.000 menjadi Rp40.182.000.000.
2. DIPA Revisi ke 05 tanggal 16 Juli 2024, optimalisasi sisa anggaran di Kegiatan Kontraktual Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3 sebesar Rp141.646.000 untuk Kegiatan Setditjen. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp40.182.000.000,00 menjadi Rp40.040.354.000.
3. DIPA Revisi ke 07 tanggal 22 Agustus 2024, penghapusan blokir di Kegiatan Penyaluran Pembiayaan Mikro Kredit Perumahan Bagi MBR sebesar Rp4.000.000.000 karena belum ada pedoman umum terkait pelaksanaan program Mikro Kredit sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan. Pagu anggaran berubah menjadi Rp36.040.354.000.
4. DIPA Revisi ke 08 tanggal 30 September 2024, optimalisasi anggaran sebesar Rp200.000.000 untuk menunjang Kegiatan pada Setditjen sehingga pagu anggaran semula Rp36.040.354.000 menjadi Rp35.840.354.000.

5. DIPA Revisi ke 13 tanggal 2 Desember 2024, revisi antar KRO sehingga Pagu Anggaran semula Rp35.840.354.000 menjadi Rp34.676.645.133.

DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2024 diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 dan mengalami satu kali revisi pada tanggal 22 Desember 2024, revisi dilakukan terhadap target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) dengan Pagu Anggaran tetap.

Pagu anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 digunakan untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) awal kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000 dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp4.609.438.646.000 yang dibayarkan kepada 751.735 unit. Namun pada revisi kesatu, untuk target penyaluran pengelolaan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) menjadi 199.959 unit dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) menjadi 732.927 unit.

Capaian Kinerja

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi 100% (setara dengan 25%) hanya sebesar 24,73%. Adapun nilai capaian kinerja di bawah target disebabkan belum tercapainya 1 (satu) Kesepakatan dari 2 (dua) Kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang di targetkan pada Renstra. Belum tercapainya 1 (satu) Kesepakatan proyek KPBU Bidang perumahan ini dikarenakan proyek tersebut masih memerlukan konfirmasi keberlanjutan Proyek KPBU sebagai dampak dari reorganisasi Kementerian (perubahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP), kepastian peralihan PJPK, dan kepastian kapasitas fiskal PJPK.

Pada Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat terealisasi di atas target 100% yang diperjanjikan di Perjanjian Kinerja dengan nilai sebesar 100,55%.

Kontribusi Dit. PPP untuk capaian Eselon I TA 2024

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berkontribusi dalam capaian kinerja untuk Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 120% pada Tahap Penyiapan yang berasal dari 3 (tiga) proyek yaitu KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, KPBU Rusun Perkotaan Surabaya, dan Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) dan sebesar 50% pada Tahap Transaksi yang berasal dari 1 (satu) Proyek yaitu KPBU Rusun Karawang Spuur.

Kendala dan Tindakan yang dihadapi Dit. PPP TA 2024

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pada LAKIN Tahun 2024 diantaranya terdapat isu dan permasalahan pada proyek KPBU yang masih perlu diselesaikan sehingga diperlukan tambahan waktu untuk pimpinan (PJPK) dalam mengambil keputusan, isu ini terjadi karena adanya reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L).

Perubahan organisasi di tingkat K/L yaitu Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP menjadi salah satu penyebab utama tidak dapat terealisasinya target KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan secara penuh. Sehingga diperlukan koordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian PKP dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan keberlanjutan Proyek KPBU Perumahan terutama terkait peralihan PJPK, kapasitas fiskal PJPK, dan pembentukan regulasi KPBU Perumahan di Kementerian PKP.

Kendala lainnya adalah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) tidak dapat dilakukan di Tahun 2024. Berdasarkan tanggapan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024, bahwa Program FLPP dengan SBUM sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Dengan demikian anggaran BBA untuk Tahun 2024 tidak dialokasikan.

Dit. PPP telah mengupayakan ketersediaan penyediaan anggaran BBA TA 2024 melalui Nota Dinas Dirjen PI Nomor 183/ND/DP/2024 perihal Permohonan Penyediaan Anggaran BBA TA 2024 melalui optimalisasi anggaran Kementerian PUPR kepada Bapak Menteri PUPR pada tanggal 6 September 2024. Adapun tanggapan Menteri PUPR atas Nota Dinas tersebut adalah kepada Sekjen PUPR (melalui Kepala Biro PAKLN) dan Dirjen PI untuk melakukan pengecekan ketersediaan anggaran pada tanggal 9 September 2024. Terkait ketersediaan anggaran diperlukan proses revisi DIPA setelah Komisi V DPR RI terbentuk dengan memanfaatkan sisa dana dari Direktorat Jenderal SDA sebagaimana hasil koordinasi dengan Biro PAKLN.

Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi

Perbandingan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen									
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	23,25%	25,00%	24,56%	24,73%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman									
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	48,38%	49,35%	106,07%	100,55%

Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional (*Benchmarking*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Dit. PPP dengan Direktorat Rumah Susun (Dit. Rusun), Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Perbandingan kinerja ini dilakukan karena kedua Direktorat memiliki kesamaan pada sasaran program yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak, fokus dan tujuan utama yang sama dalam rangka penyediaan dan pemenuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki program kegiatan yang mendukung optimalisasi bantuan pembangunan pelaksanaan Proyek KPBU Bidang Perumahan bagi MBR dan memiliki *Output* berupa jumlah unit rumah tangga yang diharapkan dapat mengurangi jumlah *backlog* perumahan yang ada.

Kolaborasi dan sinergi turut dilakukan antara Dit. PPP dengan Dit. Rusun misalkan dalam hal penyiapan dan transaksi proyek KPBU Perumahan, pembahasan teknis pelaksanaan pembangunan rumah susun dan kerja sama dalam rangka mengembangkan kebijakan pembiayaan rumah bagi MBR.

Dit. Rusun lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan penyediaan tempat tinggal vertikal dengan pembiayaan berasal dari APBN. Keberhasilan kinerja lebih terukur melalui jumlah unit yang dibangun dan kualitas pengelolaan hunian. Sedangkan untuk Dit. PPP berfokus pada penyediaan akses pembiayaan untuk MBR dalam rangka kepemilikan rumah. Keberhasilan kinerja diukur dari besarnya pembiayaan yang tersalurkan jumlah proyek KPBU perumahan yang siap dikerjasamakan dan jumlah penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Dit. PPP dan Dit. Rusun memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perumahan di Indonesia dan saling mendukung untuk memastikan tercapainya tujuan Pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.

Realisasi Anggaran

Berdasarkan Struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024, alokasi Pagu Tahun 2024 sebesar Rp40.732.000.000,00. Pagu Anggaran mengalami 5 (lima) kali perubahan sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terakhir menjadi Rp35.840.354.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 Dit. PPP status 31 Desember 2024 sebesar 96,63% atau sejumlah Rp34.633.296.000,00 dan kinerja fisik sebesar 99,99%.

Realisasi anggaran TA 2024 dibandingkan tahun sebelumnya

TAHUN 2024				TAHUN 2023			
Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
		Keu.	Fisik			Keu.	Fisik
35.840.354.000	34.633.296.000	96,63%	99,99%	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%

Secara keseluruhan terjadinya peningkatan kemampuan realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Dit.PPP melakukan perbaikan dalam perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk melihat kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu/permasalahan pada proyek KPBU Perumahan dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Laporan Bulanan merupakan bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan.

Rekomendasi Dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025:

1. *Major Project* Proyek KPBU Perumahan dan Pembiayaan Kreatif Bidang Perumahan pada RPJMN Periode Tahun 2025 - 2029.
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Perumahan dan Pembiayaan Kreatif Bidang Perumahan.
3. Pendataan *Housing Queue* dan peminatan program pembiayaan perumahan di 13 (tiga belas) Provinsi Prioritas Pendataan.
4. *Piloting Green HMF* melalui Dana Hibah *Build Change* di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.
5. Perumusan Perubahan Besaran Penghasilan MBR dan Juknis Perhitungan Penghasilan.

6. Perumusan Perubahan Harga Jual Sarusun dan Rumah Tapak yang difasilitasi KPR Bersubsidi Tahun 2025.
7. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
8. Mendukung Program Pemerintah dalam Pelaksanaan 3 (tiga) Juta Rumah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	I
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	I
1.2.1. Kedudukan	I
1.2.2. Tugas	2
1.2.3. Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia	2
1.3.1. Struktur Organisasi	2
1.3.2. Sumber Daya Manusia (Sdm)	3
1.3.2.1. Jumlah Sdm Berdasarkan Jenis	4
1.3.2.2. Jumlah Sdm Berdasarkan Golongan Dan Kelompok Jabatan	4
1.3.2.3. Jumlah Sdm Berdasarkan Pendidikan Dan Usia	5
1.3.3. Pengembangan Kompetensi Sdm	7
1.4. Sarana Dan Prasarana	8
1.5. Isu Strategis	9
1.6. Sistematika Laporan	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Uraian Singkat Renstra	12
2.1.1. Tujuan	12
2.1.2. Sasaran Strategis	12
2.1.3. Arah Kebijakan Dan Strategi	13
2.1.4. Program Dan Kegiatan Pembangunan	14
2.2. Perjanjian Kinerja	16
2.3. Metode Pengukuran	23
2.4. Target Kinerja Tahun 2020 - 2024	26
2.4.1. Target Program Kinerja Berdasarkan Renstra 2020-2024	26
2.4.2. Ringkasan Target Program Kinerja Yang Harus Dicapai Dit. Ppp Berdasarkan Renstra	35
2.4.3. Target 2024 Disandingkan Dengan Baseline Tahun 2023	43
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	45
3.2. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	45
3.3. Analisa Perbandingan Kinerja	71
3.3.1. Perbandingan Kinerja Organisasi	71
3.3.2. Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (Ikk) Tahun 2024	73
3.3.3. Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional (<i>Benchmarking</i>)	75
3.4. Analisis Realisasi Anggaran	78
3.4.1. Perbandingan Realisasi Anggaran Ta 2024 Dengan Tahun Sebelumnya (Ta 2023)	82
3.4.2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa)	86
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	89
3.6. Analisis Pemanfaatan Informasi Dalam Laporan Kinerja	89
3.6.1. Analisis Perhatian Utama Pimpinan Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	89
3.6.2. Analisis Kepedulian Seluruh Pegawai Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja	90

3.6.3 Analisis Penyesuaian Aktivitas Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala	90
3.6.4 Analisis Penyesuaian Penggunaan Anggaran Untuk Mencapai Kinerja Terhadap Informasi Dalam Laporan Kinerja Berkala.....	90
3.6.5 Analisis Pencapaian Keberhasilan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	91
3.6.6 Analisis Penyesuaian Perencanaan Kinerja Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja.....	91
3.6.7 Analisis Perubahan Budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi Dalam Laporan Kinerja	91
3.7 Penghargaan Dan Inovasi Atas Kinerja	91
3.8 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja	96
3.9 Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2023.....	97
3.10 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023	100
BAB 4 PENUTUP	103
4.1 Simpulan Umum.....	104
4.2 Rekomendasi Dan Tindak Lanjut	105
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Sarana dan Prasarana.....	8
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal.....	16
Tabel 2. 2 Revisi Pertama Perjanjian Kinerja.....	18
Tabel 2. 3 Revisi Kedua Perjanjian Kinerja.....	19
Tabel 2. 4 Perbandingan Revisi Perjanjian Kinerja 2024.....	21
Tabel 2. 5 Bobot Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.....	23
Tabel 2. 6 Bobot perhitungan Indikator Rincian Output.....	24
Tabel 2. 7 Cascading Program hingga Paket Kegiatan / Output keluaran Tahun 2024 berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan DIPA.....	26
Tabel 2. 8 Target berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat 2020-2024.....	35
Tabel 2. 9 Target 2024 disandikan dengan Baseline.....	43
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024.....	46
Tabel 3. 2 Rincian Capaian Kinerja SK Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.....	48
Tabel 3. 3 Capaian Proyek KPBU Bidang Perumahan yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2020-2024.....	54
Tabel 3. 4 Rincian Capaian Kinerja SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan.....	56
Tabel 3. 5 Detail Capaian PT SMF Tahun 2024.....	60
Tabel 3. 6 Rincian Penyaluran Fasilitas Pembiayaan PT. SMF (Persero) Tahun 2020-2024.....	60
Tabel 3. 7 Rincian Penerbitan Efek Pembiayaan Tapera Tahun 2024.....	61
Tabel 3. 8 Realisasi Program FLPP dibandingkan Target Tahun 2024.....	64
Tabel 3. 9 Realisasi Penyaluran SBUM dan SSB.....	65
Tabel 3. 10 Progres Kinerja BBA Tahun 2023.....	65
Tabel 3. 11 Rincian Realisasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan.....	69
Tabel 3. 12 Perbandingan Kinerja Tahun 2020 – Tahun 2024.....	71
Tabel 3. 13 Kinerja Realisasi Capaian IKK Tahun 2024.....	73
Tabel 3. 14 Perbandingan Sasaran Program, tugas dan fungsi Dit. PPP dan Dit. Rusun.....	75
Tabel 3. 15 Realisasi Pembangunan Rusun terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	76
Tabel 3. 16 Realisasi Pembangunan Rusun terhadap Target Tahun 2023.....	77
Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023.....	77
Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	78
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	82
Tabel 3. 20 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2023.....	83
Tabel 3. 21 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	97
Tabel 3. 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIN 2023.....	97
Tabel 3. 23 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	100
Tabel 3. 24 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai	4
Grafik 1. 2 Perbandingan SDM menurut Pangkat Golongan.....	4
Grafik 1. 3 Perbandingan SDM menurut Jabatan.....	5
Grafik 1. 4 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Grafik 1. 5 Perbandingan SDM menurut Jenis Kelamin	6
Grafik 1. 6 Perbandingan SDM menurut Usia	6
Grafik 1. 7 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	7
Grafik 1. 8 Perbandingan Kebutuhan SDM PNS Tahun 2024.....	7
Grafik 3. 1 Perbandingan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun, 2021, 2022, 2023, dan 2024.....	72
Grafik 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Pembiayaan Perumahan dengan RPJMN	78
Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan TA 2024.....	78
Grafik 3. 4 Proses Revisi DIPA Tahun 2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	3
Gambar 2. 1 Perjanjian kinerja awal Tahun 2024.....	18
Gambar 2. 2 Lampiran Perjanjian Kinerja revisi pertama Tahun 2024.....	19
Gambar 2. 3 Lampiran Perjanjian Kinerja revisi kedua Tahun 2024	21
Gambar 3. 1 Struktur Hubungan RPJMN dengan Program yang Dijalankan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	72
Gambar 3. 2 Tangkapan Layar Surat Permohonan Revisi Usulan DIPA Dit. PPP TA 2024 dan Surat Tanggapan Setditjen PI terhadap Tindak Lanjut Usulan Revisi DIPA Dit. PPP TA 2024.....	88
Gambar 3. 3 Keterlibatan pimpinan dalam rangka Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024.....	89
Gambar 3. 4 Sertifikat SMAP, 28 November 2024.....	92
Gambar 3. 5 Penghargaan Dit. PPP dalam Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Tahun 2023	93
Gambar 3. 6 Tangkapan Layar E-FLPP 2.0	94
Gambar 3. 7 SOP Pengecakan Pemindahbukuan Dana SBUM	95
Gambar 3. 8 Tangkapan Layar, Surat Permohonan Percepatan ke Kementerian Dalam Negeri	95
Gambar 3. 97 Tangkapan Layar, Keputusan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri.....	96

DAFTAR SINGKATAN

Aset	Sesuatu yang mempunyai nilai tukar atau modal atau kekayaan
Badan usaha	Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi
Kelembagaan	Perihal (yang bersifat) lembaga
Kompensasi	Ganti rugi
Konstruksi	Susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya)
Konsultasi publik	Proses interaksi antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyarakat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU
Kontrak	Persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan
KPBU	Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak
Market sounding	Proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU
Pemantauan dan Evaluasi	Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan
Panitia Pengadaan	Tim yang dibentuk PJKP yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi
Calon Pemrakarsa	Badan Usaha yang mengajukan suatu prakarsa KPBU kepada Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah
PJKP	Penanggung Jawab Proyek Kerja sama - Menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan
Prastudi Kelayakan	Kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial
Simpul KPBU	Unit kerja di kementerian/lembaga pada tingkat nasional atau unit kerja pada tingkat daerah, yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk pelaksanaan perjanjian KPBU
Studi Kelayakan	Dokumen yang disiapkan oleh calon pemrakarsa yang penyusunannya dilaksanakan pada tahap persetujuan usulan KPBU atas prakarsa Badan Usaha untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh surat penetapan sebagai pemrakarsa dari PJKP
Studi Pendahuluan	Kajian awal yang dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Direksi Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu

	Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU
Tim KPBU	Tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan finansial lose, termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<i>Outline Business Case (OBC)</i>	Kajian awal Prastudi Kelayakan
<i>Final Business Case (FBC)</i>	Kajian akhir Prastudi Kelayakan
<i>Solicited</i>	Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah
<i>Unsolicited</i>	Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Badan Usaha
<i>Availability Payment (AP)</i>	Salah satu bentuk skema pengembalian investasi melalui pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Prakualifikasi	Kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi KPBU
<i>Request for Proposal (RfP)</i>	Kegiatan Pelelangan Badan Usaha Pelaksana pada Tahap Transaksi KPBU
<i>Value for Money</i>	Nilai Manfaat Uang
AMDAL	Analisis Dampak Lingkungan
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan Hidup
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)



BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dan isu strategis yang dihadapi.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada unit kerja yang tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung untuk mencapai *outcome* yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 diukur pelaksanaannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam pertanggungjawaban dan sebagai upaya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja dilaporkan menggunakan Laporan Kinerja oleh masing – masing Kementerian atau Lembaga (K/L) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara rinci diatur di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menggunakan kaidah penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR.

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Tahun 2025.

Program dan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 dibiayai melalui APBN rupiah murni. Selain itu Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Perumahan (BA.999.07) dari Kementerian Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran Modal Awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BA.999.03) dari Kementerian Keuangan

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai kedudukan dan menjalankan tugas serta fungsi sebagai berikut:

1.2.1. KEDUDUKAN

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berada di bawah Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

1.2.2. TUGAS

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

1.2.3. FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 570, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.3.1. STRUKTUR ORGANISASI

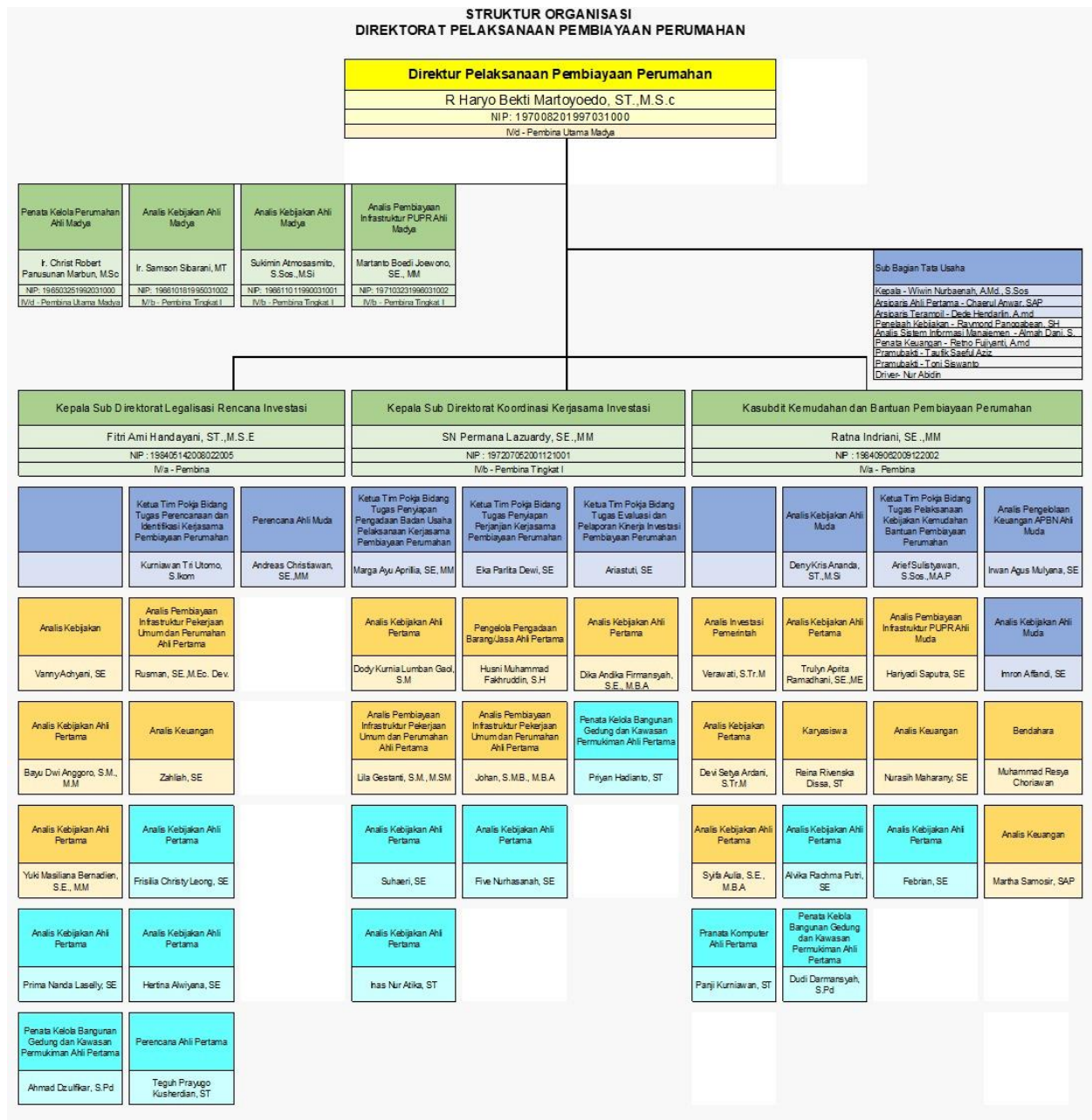
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas:

1. Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
2. Subdirektorat Koordinasi Kerja sama Investasi
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi kerja sama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.
3. Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan
Subdirektorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan bahan

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persurutan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

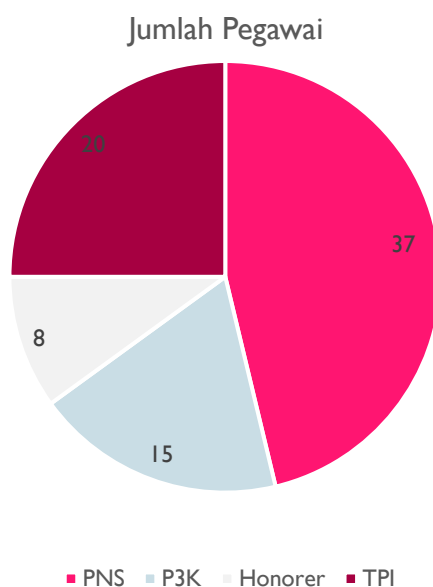
1.3.2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Jumlah SDM turut mempengaruhi tercapainya kinerja yang telah direncanakan. Pengelolaan SDM aparatur bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berAKHLAK (Berorientasi

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Sasaran Strategis Kementerian.

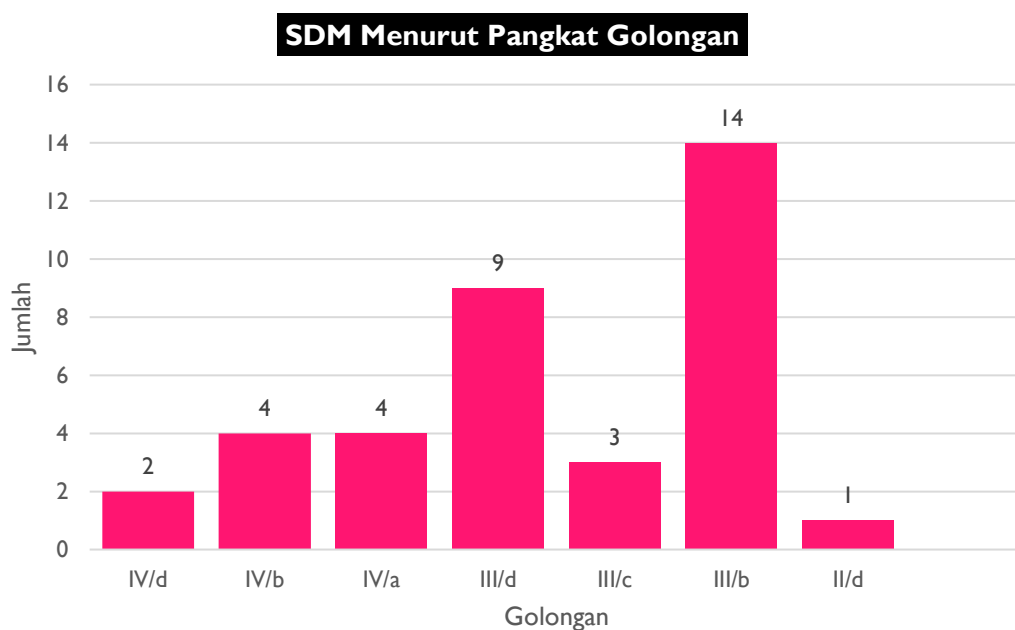
1.3.2.1. JUMLAH SDM BERDASARKAN JENIS

Di tahun 2024 Jumlah pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 80 orang dengan komposisi 37 orang PNS, 15 orang PPPK, 8 orang Honorer, 20 orang Tenaga Pendukung Individual (TPI).



Grafik 1. 1 Perbandingan Jumlah Pegawai

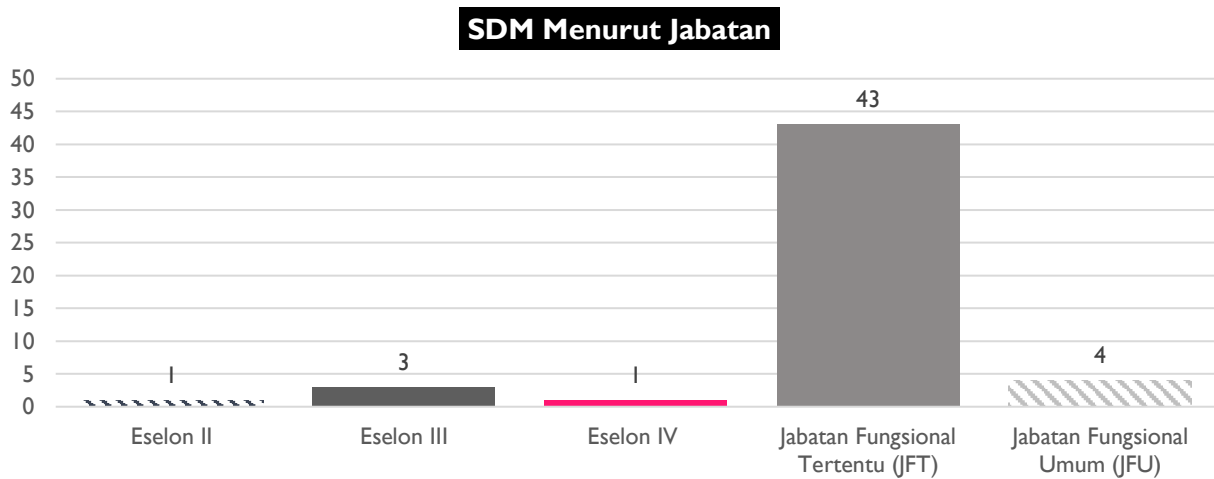
1.3.2.2. JUMLAH SDM BERDASARKAN GOLONGAN DAN KELOMPOK JABATAN



Grafik 1. 2 Perbandingan SDM menurut Pangkat Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan ASN, komposisi SDM di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak 2 orang golongan IV/d, 4 orang IV/b, 4 orang IV/a, 9 orang III/d, 3 orang III/c, 14 orang III/b, dan 1 orang II/d.

14 orang III/b, dan 1 orang dengan pangkat golongan II/d menggambarkan kecukupan pengalaman dalam merencanakan, menyusun dan menyiapkan serta melaksanakan kebijakan dan program.



Grafik 1. 3 Perbandingan SDM menurut Jabatan

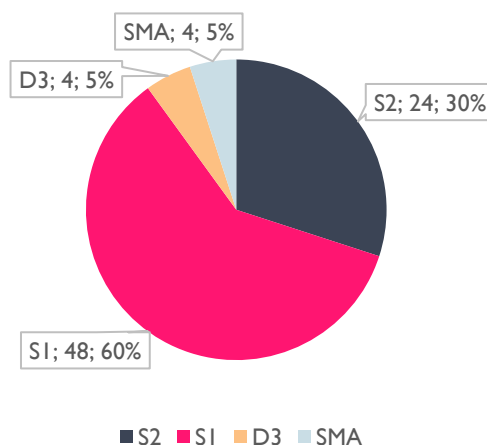
Komposisi SDM Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menurut jabatan adalah terdiri dari 1 orang Eselon II, 3 orang Eselon III, 1 orang Eselon IV, 43 orang memiliki Jabatan Fungsional Tertentu, dan 4 orang memiliki Jabatan Fungsional Umum. Jenis Jabatan Fungsional pegawai di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Arsiparis.
3. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman.
4. Penata Kelola Perumahan.
5. Analis Kebijakan.
6. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN.
7. Pranata Komputer.
8. Analisis Perencana.

1.3.2.3. JUMLAH SDM BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN USIA

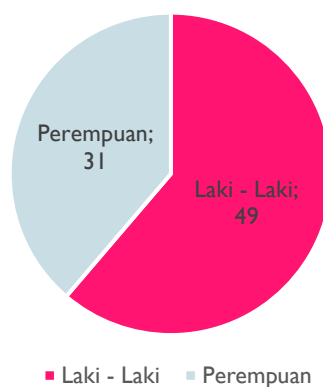
Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 48 orang, D3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 4 orang, komposisi ini mendukung profesionalisme dalam melakukan penelaahan kasus, pengelolaan data dan informasi yang menjadi kekuatan dalam perencanaan program dan kegiatan.

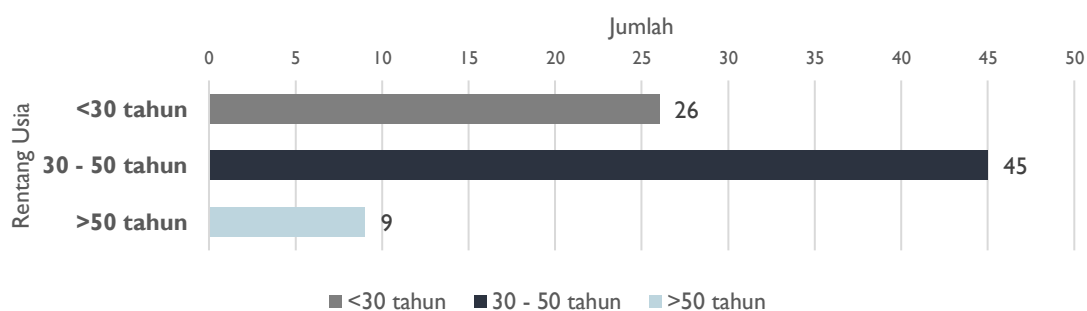
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Grafik 1. 4 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri atas 31 orang perempuan dan 49 orang laki-laki dengan rentang usia <30 tahun sebanyak 26 orang, usia 30 – 50 tahun sebanyak 45 orang, dan usia >50 tahun sebanyak 9 orang.

SDM Menurut Jenis Kelamin

Grafik 1. 5 Perbandingan SDM menurut Jenis Kelamin

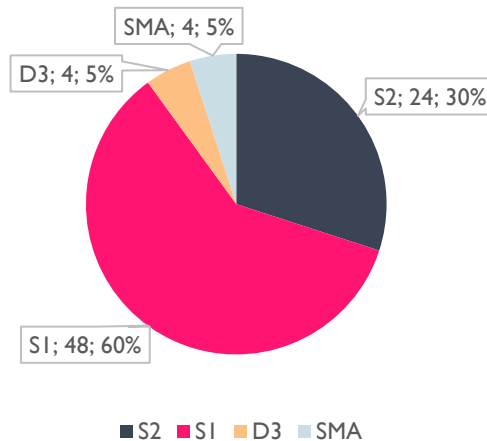
SDM Menurut Usia

Grafik 1. 6 Perbandingan SDM menurut Usia

Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari S2 sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 48 orang, D3 sebanyak 4 orang, SMA sebanyak 4 orang, komposisi ini

mendukung profesionalisme dalam melakukan penelaahan kasus, pengelolaan data dan informasi yang menjadi kekuatan dalam perencanaan program dan kegiatan.

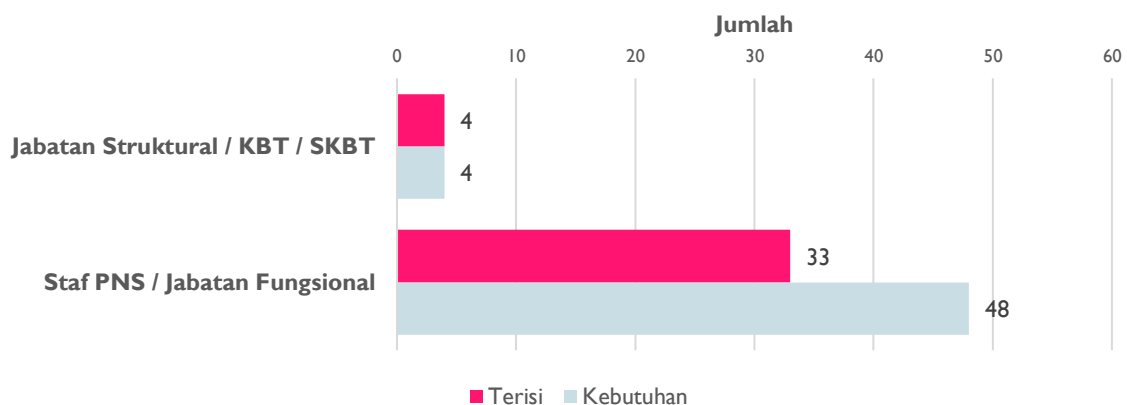
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 1. 7 Perbandingan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pembahasan pemetaan pegawai terkait kebutuhan, bezetting, dan formasi PNS, kebutuhan pegawai di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebanyak 85 orang pegawai PNS. Jumlah PNS saat ini adalah sebanyak 37 orang dan masih membutuhkan 48 orang PNS. Kebutuhan PNS saat ini dibantu oleh Non PNS Substansi dan Pendukung.

Kebutuhan SDM PNS Tahun 2024



Grafik 1. 8 Perbandingan Kebutuhan SDM PNS Tahun 2024

1.3.3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pada Tahun 2024, sebanyak 25 (dua puluh lima) ASN Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Magister Super Spesialis.
2. Pelatihan Sistem Akuntansi Instansi.
3. Pelatihan Tata Persuratan dan Kearsipan.

4. Pelatihan KPBU Sektor Perumahan.
5. *Coaching Clinic* JFT Ahli Madya.
6. *Workshop* Manajemen Risiko.
7. Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural.
8. *Workshop* Pembinaan Kinerja bagi Pengelola Kepegawaian Unit Kerja Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR.
9. Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai Etika pada Instansi Pemerintah.

1.4. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi. Apabila sarana dan prasarana tidak tersedia dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan. Data berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan selama Tahun 2024:

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	PC	48	Baik
2	Access Point	1	Baik
3	Note Book	4	Baik
4	Printer	21	Baik
5	Scanner	2	Baik
6	Tablet PC	2	Baik
7	AC Central	5	Baik
8	AC Split	7	Baik
9	Access Control System	1	Baik
10	Air Cleaner	1	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	10	Baik
12	Camera Conference	1	Baik
13	Cubical	29	Baik
14	Elektrik Termometer	1	Baik
15	Exhaust Fan	1	Baik
16	Filing Cabinet Besi	17	Baik
17	Focusing Screen / Layar	1	Baik

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
18	Kitchen Set	1	Baik
19	Kursi Besi Metal	18	Baik
20	Kursi Fiber Glass	86	Baik
21	LCD Projector	2	Baik
22	Lemari Besi Metal	12	Baik
23	Lemari Kayu	2	Baik
24	Meja Kerja Kayu	49	Baik
25	Meja Makan Kayu	4	Baik
26	Meja Rapat	1	Baik
27	Meja Resepsionis	2	Baik
28	Nakas	4	Baik
29	Rak Kayu	1	Baik
30	Sofa	1	Baik
31	Televisi	3	Baik
32	Unit Power Supply	1	Baik
33	White Board	1	Baik
34	White Board Elektronik	1	Baik

Semua sarana dan prasarana yang berada di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan selama Tahun 2024 dalam kondisi baik.

1.5. ISU STRATEGIS

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- 1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengkomodasi pendanaan di luar skema Non APBN.
- 2) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama.

- 3) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU.
- 4) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN.
- 5) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK.
- 6) Ketersediaan lahan yang *clear and clean* untuk proyek KPBU.
- 7) Reorganisasi pemerintahan (Perubahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP), sehingga diperlukan kepastian peralihan PJPK, dan kepastian kapasitas fiskal PJPK.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- 1) Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan.
- 2) Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi.
- 3) Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR.
- 4) Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR.
- 5) Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Masih besarnya *gap* pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka panjang.
- 7) Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

1.6. SISTEMATIKA LAPORAN

Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2024, dan Target 2024.

BAB III Kapasitas Organisasi

Pada Bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai potensi dan hambatan yang dihadapi karena faktor sumber daya yang dimiliki.

BAB IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja.

BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung pada Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan perencanaan kinerja

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan disusun dalam rangka perwujudan Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, dan Renstra DJPI Tahun 2024 (revisi tanggal 14 Juni 2024). Dokumen Renstra memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan *eksisting* dan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Direktorat yang diterjemahkan ke dalam rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat sesuai tugasnya.

Atas Revisi Renstra DJPI Tahun 2024 pada tanggal 14 Juni 2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah melakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020-2024. Adapun penyesuaian dilakukan pada metode perhitungan bobot penilaian dan jumlah target pada *Output* kegiatan.

2.1.1. TUJUAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan beberapa tujuan Kementerian dalam 2020 – 2024 yang terdiri dari:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko / kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih, dan terpercaya yang didukung oleh SDM aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Peningkatan dan percepatan pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui pembiayaan kreatif dan inovatif;
2. Peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui bantuan dan fasilitasi pembiayaan perumahan.

Adapun tujuan bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan Tahun 2020 – 2024 adalah untuk meningkatkan daya beli dan aksesibilitas MBR ke lembaga-lembaga pembiayaan perumahan yang didukung sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel.

2.1.2. SASARAN STRATEGIS

5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional.

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak.
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi Yang Kompeten Dan Professional.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.
- 2) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.

2.1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat – pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.
4. Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium PUPR 2020 – 2024.
5. Percepatan proses perencanaan dan penyiapan KPBU.
6. Percepatan proses pengadaan KPBU.
7. Pengembangan skema pembiayaan KPBU.
8. Membentuk unit pelaksana teknis / memanfaatkan unit kerja *eksisting* yang berfungsi sebagai *paying agent* serta fungsi lainnya yang terkait dengan pengelolaan anggaran dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
9. Pengembangan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien, dan akuntabel.
10. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilihan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
11. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan.
12. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*).
13. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

STRATEGI

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan RPJMN 2020 – 2024 adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi yang diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yakni sisi permintaan

(*demand side*), sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*). Strateginya adalah sebagai berikut:

1. Sisi Permintaan (*Demand Side*)

- a. Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) dan BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan tepat sasaran.
- c. Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumahnya secara swadaya.
- d. Pengembangan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan.

2. Sisi Patokan (*Supply Side*)

- a. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dengan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
- b. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan.
- c. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- d. Pemanfaatan tanah milik negara / BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
- e. Pengembangan peran dunia usaha termasuk BUMN/BUMD dalam penyediaan perumahan, yaitu Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

3. *Enabling Environment*

- a. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan, serta pengembangan teknologi dan bahan bangunan murah.
- b. Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- c. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- d. Pengembangan sistem intensif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.
- e. Pengembangan Badan Layanan Umum (BLU) Perumahan Nasional dan daerah.

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru (*new town*).

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai apa yang telah tertuang dalam pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan menjalankan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dan **Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman**.

Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi**

Pembiayaan Perumahan. Terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan lainnya pada sasaran program tersebut yang merupakan target yang harus dipenuhi oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Kerja, yaitu **Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan IKK yaitu Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.**

Sedangkan, Sasaran Kegiatan pada Sasaran Program Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman adalah **Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan.**

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami 2 (dua) kali revisi. Berikut Perjanjian Kinerja awal yang dilakukan pada bulan Januari 2024 dengan target kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal

r		TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>		
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan		1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan		1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan		2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan		4 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan		1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi		4 Dokumen
Layanan Perkantoran		1 Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>		
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan		5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi		30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan		2 Kegiatan
Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan		1 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka		1 Layanan
Fasilitas Mikro Kredit Perumahan		1 Layanan
Mikro Kredit Perumahan		100 Rumah Tangga
Kegiatan:		
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan		Rp29.232.000.000
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan		Rp11.500.000.000
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)		Rp5.504.438.646.000

Pada Perjanjian Kinerja awal, pagu anggaran bagi Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan adalah sebanyak Rp29.232.000.000; Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan sebanyak Rp11.500.000.000; dan Kegiatan Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp5.504.438.646.000. Terlampir untuk lampiran Perjanjian Kinerja awal Tahun 2024:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
 Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
 Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Nama RO	Target	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	Output bukan berupa proyek KPBU, namun rekomendasi kebijakan/dokumen perencanaan program dan anggaran Direktorat PPP
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan	1. Rusun Desa Besar Medan 2. Rusun Daan Mogot
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan	1. Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) 2. Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi 3. Rusun Cisaranten Bina Harapan 4. Rusun Karawang Sour

JAKARTA, JANUARI 2024
 DIREKTUR PELAKSANAAN
 PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Haryo Bekti Martoyoedo
 HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Gambar 2. 1 Perjanjian kinerja awal Tahun 2024

Revisi pertama Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada Bulan Juli 2024, dikarenakan adanya pergantian pejabat Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Herry Trisaputra Zuna menjadi Bapak Triono Junoasmono juga adanya perubahan nilai anggaran, *update* nama proyek dan nilai investasi pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga Perjanjian Kinerja revisi pertama adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Revisi Pertama Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
<i>IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan</i>	
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1 Kegiatan
Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	1 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 Layanan

Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	I Layanan
Mikro Kredit Perumahan	100 Rumah Tangga
Kegiatan:	
4. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp29.090.354.000
5. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp10.950.000.000
6. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp5.504.438.646.000

Terlampir Perjanjian Kinerja revisi pertama Tahun 2024:

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Rusun Kota Surabaya Tahap 2	Rp189.227.000.000,00
	Rusun Daan Mogot	Rp717.000.000.000,00
Transaksi	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Rp1.500.000.000.000,00
	Rusun Kota Surabaya	Rp146.086.028.627,00
	Rusun Cisaranten Bina Harapan	Rp680.527.316.891,00
	Rusun Karawang Spuur	Rp272.474.481.923,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN



HARYO BEKTI MARTOYEDO

Gambar 2. 2 Lampiran Perjanjian Kinerja revisi pertama Tahun 2024

Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Dit. PPP Tahun 2024 karena adanya perubahan pada nilai anggaran, jumlah target kesepakatan proyek KPBU perumahan yang siap dikerjasamakan dari 4 (empat) kesepakatan menjadi 2 (dua) kesepakatan dan perubahan target 100 (seratus) rumah tangga mikro kredit perumahan menjadi 1 (satu) layanan fasilitasi mikro kredit perumahan. Berikut Perjanjian Kinerja revisi kedua:

Tabel 2. 3 Revisi Kedua Perjanjian Kinerja

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kesepakatan
NSPK Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2 Dokumen
Layanan Perkantoran	1 Layanan
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
IKSP. Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5 Rekomendasi Kebijakan
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1 NSPK
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2 Kegiatan
Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	1 Kegiatan
Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1 Layanan
Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	1 Layanan
Kegiatan:	
1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	Rp25.090.354.000
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rp10.750.000.000
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)	Rp5.504.438.646.000

Terlampir Perjanjian Kinerja revisi kedua Tahun 2024:

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bekti Martoyoedo**
Jabatan : **Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



TRIONO JUNOASMONO

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Pertama



HARYO BEKTI MARTOYOEDO

REVISI2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDEKATOR	TARGET
(1)	(2)
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman yang Layak dan Aman	
IKSP. Tingkat Penuhnya Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	
SK. Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	
ITK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%
ABF.001. Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
ATA.001. SOPK Penyelenggaraan Skema Pembiayaan Perumahan	1 NDK
ESB.003. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30 Dokumen
PEA.001. Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2 Kegiatan
PSA.002. Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berkeadilan Lingkungan	1 Kegiatan
QMI.001. Fasilitas Subsidy Gaji dan Bantuan Uang Muka	1 Layanan
QMI.002. Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	1 Layanan
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tegas Teknis Lainnya	
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	
SK. Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	
ITK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	25%
ABF.011. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
ABF.012. Pro Studi Kebijakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan
ABF.013. Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan
AZC.004. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2 Kegiatan
ATA.004. NDK Pembiayaan Perumahan	1 NDK
ESB.003. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
ESB.004. Layanan Perantara	1 Layanan

KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Penyelenggaraan Subsidy Perumahan (Rp. 999.00)

ANGGARAN

Rp25.290.204.000,00
 Rp10.750.000.000,00
 Rp14.540.204.000,00

DIREKTUR JENDERAL
 PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TRILAND KUNOASHIRO

JAKARTA, OKTOBER 2024
 DIREKTUR PELAKSANAAN
 PEMBIAYAAN PERUMAHAN

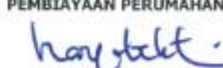
HARYO BEKTI MARTOYOEDO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Rp1.585.757.000.000,00
	Rusun Kota Surabaya	Rp146.066.028.627,00
Transaksi	Rusun Cisaranten Bina Harapan	Rp723.950.000.000,00
	Rusun Karawang Spuur	Rp272.474.481.923,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

Gambar 2. 3 Lampiran Perjanjian Kinerja revisi kedua Tahun 2024

Berikut disampaikan matrik perubahan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024 yang dilakukan terhadap nilai anggaran, jumlah kesepakatan pada proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan, dan target mikro kredit perumahan:

Tabel 2. 4 Perbandingan Revisi Perjanjian Kinerja 2024

Item	PK Awal	PK Revisi I	PK Akhir
Anggaran	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan; Rp29.232.000.000	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan; Rp29.090.354.000	1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan; Rp25.090.354.000
	2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur	2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur	2. Penyelenggaraan Infrastruktur Pembiayaan Perumahan; Rp10.750.000.000

	Perumahan; Rp11.500.000.000 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp5.504.438.646.000	Perumahan; Rp10.950.000.000 3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp5.504.438.646.000	3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07) Rp5.504.438.646.000
Target	1. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan 4 (empat) Kesepakatan 2. Mikro Kredit Perumahan 100 (seratus) Rumah Tangga	Tetap	1. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan diubah menjadi 2 (dua) Kesepakatan 2. Mikro Kredit Perumahan 100 (seratus) Rumah Tangga diubah menjadi 1 (satu) layanan fasilitasi mikro kredit perumahan

2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Bobot Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN	BOBOT
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya							
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target		50,00%
				Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		50,00%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
SP. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman							
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target		30,00%
				Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target		50,00%
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target		20,00%

Bobot perhitungan Indikator Rincian *Output* berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Bobot perhitungan Indikator Rincian *Output*

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)			TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA	%	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT		BOBOT
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya										
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	50%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan			30,00%	
						Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan			0,00%	
						Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan			35,00%	
						Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan			25,00%	
						Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan			10,00%	
					50%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan			35,00%	
						Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan				
						Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan				30,00%
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan			35,00%							
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman										
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera	30%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)			60,00%	
						Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)			40,00%	

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET	KOMPOSIT INDIKATOR KINERJA	%	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	BOBOT
				Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	50%	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	70,00%
				Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya	5%	Jumlah penyaluran FLPP	30,00%
						Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan dan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan	100%
						Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP)	
				Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	15%	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	50,00%
						Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	
						Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	
						Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20,00%
						Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	15,00%
						Jumlah Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	10,00%
						Jumlah Pendampingan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5,00%

2.4. TARGET KINERJA TAHUN 2020 - 2024

2.4.1. TARGET PROGRAM KINERJA BERDASARKAN RENSTRA 2020-2024

Ringkasan target program kinerja yang harus dicapai Dit. PPP berdasarkan Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 dan DIPA revisi terakhir Tahun 2024:

Tabel 2. 7 Cascading Program hingga Paket Kegiatan / Output keluaran Tahun 2024 berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan DIPA

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	N/A	I	Rekom. Kebijakan
							Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU Bidang Perumahan	N/A	N/A	Rekom. Kebijakan
							Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	I	I	Rekom. Kebijakan
							Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi	Pengusahaan Dukungan Pemerintahan	2	I	Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
								Pembiayaan Perumahan	terhadap KPBU Perumahan			
								Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan				
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	Penyusunan NSPK KPBU Perumahan	I	I	NSPK
						Kemitraan	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan PJPB Pemerintah Pusat	2	2	Dokumen
									Pendampingan Transaksi KPBU Perumahan PJPB Pemerintah Daerah			
								Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPB Gabungan	2	4	Kesepakatan
									Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan			

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Transaksi KPBU Perumahan Karawang Spuur			
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	4	3	Dokumen
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan			
									Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan			
							Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	N/A	N/A	Laporan
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan	Koordinasi	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder	11.540	N/A	Rumah Tangga

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
	yang Layak, Aman, dan Terjangkau	yang Layak dan Aman	Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		Pembiayaan Perumahan				Perumahan dan Tapera (SMF)			
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (Tapera)	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tapera (Tapera)	7.251	8.717	Rumah Tangga
							Jumlah Penyaluran FLPP	Penyaluran FLPP	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Program FLPP	220.000	200.000	Rumah Tangga
						Bantuan Keluarga	Bantuan Biaya Administrasi	Jumlah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi	Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	N/A	N/A	Rumah Tangga
						Subsidi kepada Keluarga	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SSB)	Penyaluran SSB (BA.999.07)	N/A	732.927	Rumah Tangga

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
								Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	Penyaluran SBUM (BA.999.07)	220.000	220.000	Rumah Tangga
						Kebijakan Saranan dan Prasarana	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	2	I	Rekom. Kebijakan
									Pengembangan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR			Rekom. Kebijakan
								Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyiapan Kerja Sama Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2	I	Rekom. Kebijakan
									Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan			Rekom. Kebijakan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Kemudahan Pembiayaan Perumahan			
								Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Koordinasi Pelaksanaan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	I	I	Rekom. Kebijakan
						Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	I	I	NSPK
						Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	30	I	Laporan
								Konsolidasi Pelaksanaan			I	Laporan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2			
									Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3		I	Laporan
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I		9	Laporan
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2		9	Laporan

Program	Sasaran Strategis / SS	Sasaran Program / SP	Indikator Kinerja SP / IKSP	Sasaran Kegiatan / SK	Indikator Kinerja Kegiatan / IKK	Klasifikasi Rincian Output / KRO	Rincian Output / RO	Indikator RO	Paket Kegiatan / Output	Target		
										Renstra	DIPA	Satuan
									Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3		9	Laporan
						Pelayanan Publik Lainnya	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	I	I	Layanan
							Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	Jumlah Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Mikro Kredit Perumahan	I	I	Layanan

Berikut penjelasan adanya perbedaan target pada Renstra DJPI TA 2020-2024 dan DIPA TA 2024:

- I. Tidak terdapat target Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian *Output* Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan pada Renstra DJPI TA 2020-2024, namun pada DIPA tercantum I (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan dokumen yang diharapkan berupa Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024.

2. Bantuan Biaya Administrasi dengan Indikator Rincian *Output* Jumlah Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) tidak ada dalam target Renstra DJPI TA 2020-2024 dan DIPA TA 2024. Terdapat tanggapan Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 bahwa program FLPP dengan SBUM sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Maka anggaran BBA untuk Tahun 2024 tidak dialokasikan.
3. Penyaluran SSB (BA.999.07) dengan indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka pada Renstra DJPI TA 2020-2024 tidak memiliki target unit namun pada DIPA TA 2024 terdapat target sebanyak 732.927unit.
4. Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dengan indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan pada Renstra DJPI TA 2020-2024 dan PK 2024 (yang ditandatangani pada bulan Oktober 2024) memiliki target 2 (dua) Kesepakatan, berbeda dengan DIPA Tahun 2024 memiliki target 4 (empat) Kesepakatan. Adanya perbedaan jumlah target ini telah ditindaklanjuti melalui usulan penyesuaian target. Dit. PPP mengusulkan revisi DIPA Tahun 2024 pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan Nota Dinas No.343/ND/Pp/2024 untuk mengubah target pada Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan menjadi 2 (dua) Kesepakatan sesuai target berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan PK 2024. Namun berdasarkan tanggapan Setditjen melalui Nota Dinas Setditjen PI No.339.1/ND/PS/2024 tanggal 22 Oktober 2024 terkait tindak lanjut usulan revisi DIPA, untuk Revisi DIPA Dit. PPP sebaiknya ditunda dahulu, “lebih baik revisi DIPA dilakukan setelah proses transisi reorganisasi selesai”.

Salah satu alasan Dit. PPP mengubah target DIPA nya, karena terdapat permasalahan isu proyek yang masih perlu diselesaikan dan memerlukan tambahan waktu untuk pimpinan dapat mengambil keputusan. Perubahan organisasi di tingkat K/L yaitu Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP menjadi salah satu faktor penentu sehingga diperlukan kepastian PJPk, kepastian BMN dan kepastian kapasitas fiskal PJPk.

5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian *Output* Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan. Pada Renstra DJPI TA 2020-2024 terdapat target 4 (empat) laporan, namun pada DIPA terdapat 3 (tiga) laporan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 karena Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Perumahan dilakukan terhadap masing – masing tahapan KPBU Sektor Perumahan, yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi. Akan ada tambahan realisasi laporan untuk menutupi jumlah target sesuai Renstra DJPI TA 2020-2024 yaitu Laporan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulanan dan Laporan Profil Risiko UPRT2 Dit. PPP TA 2024.
6. Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui SMF dan Tapera berdasarkan Renstra Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terdapat target masing – masing sebanyak 11.540 Rumah Tangga dan 8.717 Rumah Tangga (mengacu pada dokumen Kontrak Kinerja BP Tapera Tahun 2024). Target rumah tangga pada DIPA TA 2024 adalah *Not Applicable* (N/A) dikarenakan sumber pembiayaan untuk Fasilitas Pembiayaan Perumahan berasal dari PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Walaupun

sumber dana tidak berasal dari Dit. PPP, namun Dit. PPP melakukan dukungan kemitraan melalui Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Sekunder Perumahan dan Tapera untuk mendukung para mitra kerja dapat merealisasikan target yang ditetapkan.

2.4.2. RINGKASAN TARGET PROGRAM KINERJA YANG HARUS DICAPAI DIT. PPP BERDASARKAN RENSTRA DJPI TAHUN 2020 – 2024

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 – 2024 berdasarkan Matriks Program, kegiatan, dan Pendanaan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Target berdasarkan Revisi Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1,544,237	2,001,581	383,920	305,076	314,466	4,549,280
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN									90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)							118,182	112,207	91,258	75,938	80,266	477,850
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR		%	100	100	100	100	100							
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)							118,182	112,207	91,258	75,938	80,266	477,850
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		%	100	100	100	100	100							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	118,182	112,207	91,258	75,938	80,266	477,850

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
I	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			%	15	15	15	15	15	15						
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan											1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	OUTPUT KEGIATAN:															
I	Operasionalisasi Kantor Direktorat			Layanan	I	I	I	I	I	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	I	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPP		Layanan	I	I	I	I	I	5	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
I	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			%	72,39	75,61	77,97	84,50	87,81	87,81	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:																
I	Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan			%	55,92	63,35	71,54	90,44	94,58	94,58	90,484	221,221	196,472	202,658	205,872	916,707

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif														
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			%	100	100	100	100	100	100	50,244	170,000	172,870	180,158	183,372	756,644
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan Investasi Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	25	9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan										9,150	14,250	60,159	70,663	74,975	229,197
	OUTPUT KEGIATAN:														
1	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	1	1	1	0	5	600	500	750	1,000	1,000	3,850	
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	1	1	0	4	300	500	750	1,000	1,000	3,550
	2	Jumlah Penyusunan identifikasi Proyek KPBU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	300
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150	
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	1	0	0	3	400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	3	2	2	1	1	9	1,750	5,750	30,000	35,000	36,500	109,000	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	1	0	0	5	875	5,750	15,000	17,500	18,250	57,375	
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	0	1	1	1	4	875	0	15,000	17,500	18,250	51,625	
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Rekom. Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500	
	1	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	1	2	2	2	9	1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500	
5	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan		Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	4,000	4,096	21,000	25,000	26,307	80,403	
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	3	2	2	2	2	11	3,500	2,096	17,000	20,000	20,307	62,903	
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500	
6	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan		NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500	
	1	Jumlah Perumusan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	1,000	500	500	500	2,500	
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576	
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	4	4	11	1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan		Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218	
	I	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	0	0	3	150	300	300	300	168	1,218	
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau										1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,328	3,127,655	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:																
I	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni		%	57,25	57,83	58,37	59,05	59,79	59,79	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,823	3,127,655	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman				%	100	100	100	100	100							
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:																
I	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,823	3,127,655	
KEGIATAN 4: Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan																
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan				%	100	100	100	100	100	1,335,572	1,668,152	69,123	26,480	28,823	3,127,655	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																
I	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	50	50	50	50	50	50	1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299	
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	50	50	50	50	50	50	27,840	27,840	28,675	0	0	84,355	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
						2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan																	
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan												1,307,732	1,640,312	40,448	26,480	28,328	3,043,299
	OUTPUT KEGIATAN:																
I	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan				Rekom. Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3,250	3,250	7,100	7,760	8,486	29,846
	I	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2,500	1,500	4,400	4,840	5,324	18,564
	2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1,000	2,200	2,420	2,662	9,032
	3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan			Rekom. Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2,250
2	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan				NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
	I	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan			NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2,200	2,420	2,662	8,782
3	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan				Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728
	I	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan			Laporan	4	2	2	6	30	44	3,850	1,750	8,648	8,800	9,680	32,728

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Rumah Tangga	31,823	39,684	312	0	0	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
	I	Jumlah Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Rumah Tangga	31,823	39,684	312	-	-	71,819	1,289,782	1,624,562	10,000	0	0	2,924,343	
5	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka		Layanan	I	I	I	I	I	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
	I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	I	I	I	I	I	5	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500	23,000	
		SSB (BA.999.07)	Rumah Tangga	175,000	0	0	0	0	175,000	4,657,982	5,969,486	4,930,376	4,865,899	4,804,866	25,228,609	
		SBUM (BA.999.07)	Rumah Tangga	263,000	157,500	200,000	220,000	220,000	1,060,500	1,064,000	945,000	1,200,000	1,320,000	1,320,000	5,849,000	
6	Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan		Layanan	I	I	I	I	I	5	4,500	5,000	5,000	0	0	14,500	
	I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	I	I	I	I	I	5	4,500	5,000	5,000			14,500	
7	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan		Kegiatan	I	I	I	I	I	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100	
	I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	I	I	I	I	I	5	600	500	3,000	3,000	3,000	10,100	
		SMF (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	8,460	10,000	10,000	10,000	11,540	50,000							

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/IN DIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Juta Rupiah)						
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tapera (Dana Masyarakat)	Rumah Tangga	50,000	75,000	100,000	10,000	7,251	242,251							

2.4.3. TARGET 2024 DISANDINGKAN DENGAN ***BASELINE*** TAHUN 2023

Target yang harus dicapai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan *baseline* atau dengan dasar capaian pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Target 2024 disandikan dengan Baseline

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	BASELINE 2023	TARGET 2024
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,56%	25%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	106,07%	100%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai sesuai dengan kesepakatan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sejak diterimanya DIPA sampai dengan habis Tahun Anggaran 2024.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dilakukan melalui upaya strategis yang terarah dan terimplementasi. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja melalui pelaksanaan pelaporan dan pembahasan evaluasi kinerja secara berkala dan konsisten. Pada Tahun 2024 mekanisme pembahasan akuntabilitas evaluasi capaian kinerja dilakukan per triwulanan bersama mitra kerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dilakukan secara bulanan.

Penerapan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan sesuai standar dan dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Upaya peningkatan SDM juga dilakukan dengan mengikuti pegawai untuk mengikuti *Workshop Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2024 pada tanggal 22 November 2024.

Peningkatan akuntabilitas kinerja tercermin dari capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2024 yang rata-rata nilai realisasinya meningkat dan mayoritas di atas 90% dari target yang ditetapkan tiap bulannya. Dit. PPP aktif berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan monitoring evaluasi capaian kinerja yang diselenggarakan di tingkat eselon I (satu) dalam rangka memperoleh strategi yang tepat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat.

Dit. PPP telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023. Adapun rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pada hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 yaitu telah dilakukan perencanaan kinerja yang matang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan yang didukung dengan Rencana Aksi TA 2024, penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan secara tepat waktu dan disiplin, serta pelaksanaan evaluasi AKIP Tahun 2023 menggunakan aplikasi e-SAKIP yang ada di iemon.pu.go.id/sakip.

3.2. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan pengelolaan kegiatan yang akuntabel memanfaatkan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam menerapkan akuntabilitas di lingkungan Instansi Pemerintah. Akuntabilitas diharapkan dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran secara jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Pengukuran capaian kinerja Dit. PPP dilakukan berdasarkan metode perhitungan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2020 – 2024 (Renstra DJPI Tahun 2020-2024), membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dan target pada Renstra DJPI Tahun 2020-2024.

Pada Perjanjian Kinerja, target sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Dit. PPP yaitu:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dan target capaian pada Tahun 2024 sebesar 25%.

2. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan dengan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dan target capaian pada Tahun 2024 sebesar 100%.

Secara teknis pengukuran capaian kinerja menggunakan *Cascading Kinerja*. Secara umum *Cascading Kinerja* merupakan struktur penjabaran program hingga paket kegiatan, penjabaran struktur program terdiri atas Sasaran Strategis yang diturunkan menjadi Sasaran Program yang dibagi menjadi beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) kemudian diturunkan kembali menjadi Sasaran Kegiatan dengan Indikator Kinerja (IKSK). Sasaran Kegiatan dan IKSK diturunkan menjadi beberapa Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) yang diturunkan menjadi Rincian *Output* (RO) dengan Indikator Rincian *Output*. RO dan Indikator RO diturunkan menjadi Paket Kegiatan yang dilaksanakan.

Setelah penjelasan *cascading* di atas maka berikutnya akan dilakukan sandingan antara Renstra DJPI TA 2020-2024, DIPA TA 2024, Perjanjian Kinerja dengan capaian paket kegiatan TA 2024 yang telah direalisasikan. Maka capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didapatkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
Program Dukungan Manajemen						
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24,73%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	100.55%

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Capaian
		Pembiayaan Perumahan				

Pada Program Dukungan Manajemen terdapat Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang harus dicapai.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi 100% (setara dengan 25%) hanya sebesar 24,73%. Adapun nilai capaian kinerja di bawah target disebabkan belum tercapainya 1 (satu) kesepakatan dari 2 (dua) Kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang ditargetkan pada Renstra. Belum tercapainya 1 (satu) Kesepakatan proyek KPBU Bidang perumahan dikarenakan proyek tersebut masih memerlukan penyelesaian isu dan konfirmasi keberlanjutan Proyek karena masa transisi reorganisasi pemerintahan (Perubahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP), kepastian PJP, kepastian BMN dan kepastian kapasitas fiskal PJP.

Kontribusi Dit. PPP dalam memberikan capaian untuk tingkat ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 120% pada tahap penyiapan yang berasal dari 3 (tiga) proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, KPBU Rusun Perkotaan Surabaya, dan Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) dan sebesar 50% pada tahap transaksi yang berasal dari 1 (satu) yaitu Proyek KPBU Rusun Karawang Spuor.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan IKK Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dapat terealisasi di atas target 100% yaitu sebesar 100,55%. Adapun pendukung keberhasilan ini diperoleh dari:

1. Realisasi Penyaluran Program SMF sebesar 333.988 unit di atas target Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 11.540 unit.
2. Realisasi *Output* di atas target Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Rincian *Output* Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebanyak 8 (delapan) rekomendasi kebijakan dari target 5 (lima) rekomendasi kebijakan.
3. Realisasi *Output* di atas target Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada indikator tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya sebanyak 2 (dua) kegiatan dari 1 (satu) target kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dihasilkan berdasarkan rincian capaian dari *Output* paket sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rincian Capaian Kinerja SK Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan

Program Dukungan Manajemen							
(SS2) Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan manajemen dan Tugas Lainnya IKSP: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan IKK: Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan							
Target			Capaian				
25,00%			24,73%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator RO / Paket Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian Bobot (%)
Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		%	100%	100%	99,25%	50%	51%
I. Kebijakan Sarana dan Prasarana		%	100%	100%	100%	100%	100%
A	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	10%	12%
I	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
a	Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	2	120%	100%	120%
B	Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	35%	35%
I	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
a	Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
C	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	30%	30%
I	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekom. Kebijakan	2	2	100%	100%	100%
a	Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
b	Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	Rekom. Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
II. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		%	100%	100%	100%	100%	100%
D	NSPK Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	25%	25%
I	Jumlah Penyusunan NSPK Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
a	Penyusunan NSPK KPBU Bidang Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan		%	100%	95,85%	95,85%	50%	47,93%
I. Kemitraan		%	100%	71%	71%	35,00%	24,85%
F	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	%	100%	71%	71%	35,00%	24,85%

I	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Dokumen	2	3	36,00%	30,00%	36,00%
a	Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Pusat	Dokumen	1	2	120%	100%	120%
b	Pendampingan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	100%	100%	100%
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	2	1	35,00%	70,00%	35,00%
a	Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Gabungan	Kesepakatan	2	1	35,00%	70,00%	35,00%
b	Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan Karawang Spuur						
II. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		%	100%	100%	100%	35,00%	35,00%
G	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	35,00%	35,00%
I	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	4	4	100%	100%	100%
a	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	Laporan	2	2	100%	100%	100%
b	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%
c	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	Laporan	1	1	100%	100%	100%
H	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	120%	30,00%	36,00%
I	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	0	2	120%	100%	120%
a	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024	Laporan	0	2	120%	100%	120%
SK: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			100%	100%	98,93%	24,73%	24,73%

Berikut uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 pada Program Dukungan Manajemen berdasarkan Jenis Indikator Komposit IKK:

Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Kegiatan Perencanaan dan Penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan adalah 100% dari target yang ditentukan, jenis indikator komposit IKK ini memiliki bobot 50% sehingga Capaian Kinerja jenis indikator IKK adalah sebesar 50% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian *Output* sebagai berikut:

A. Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki satu Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket Kegiatan yang menunjang target capaian Rincian *Output* yaitu Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Paket kegiatan ini berhasil mencapai lebih dari target *Output* 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan yaitu:

- 1) Laporan Progres Pelaksanaan Kegiatan/Progres Anggaran Dit. PPP.
- 2) Dokumen Revisi Renstra Dit. PPP TA 2020-2024.
- 3) Dokumen Rencana Kerja / Rencana Aksi.
- 4) Dokumen usulan PHLN IGAHP.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan yaitu finalisasi rancangan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2025-2029 masih dalam tahap sinkronisasi dengan rancangan RPJMN dan rancangan Renstra Kementerian PKP dan SOTK Kementerian PKP masih tahap transisi dari Kementerian PUPR ke Kementerian PKP.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja yaitu penyesuaian terhadap Renstra dan SOTK dengan adanya Kementerian PKP yang baru terbentuk dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja TA 2024 sesuai dengan *timeline* berdasarkan kesepakatan bersama di lingkungan Dit. PPP.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2024, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Program dan Anggaran serta Identifikasi Potensi Pembiayaan Perumahan pada Kementerian PKP.
- 2) Penyesuaian SOTK Kementerian PKP.
- 3) Pemutakhiran rencana pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2025.
- 4) Monitoring pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2025.
- 5) Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA 2025-2029.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target lebih dari 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 120% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 10%.

B. Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki satu Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian

Output yaitu Fasilitasi Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Perumahan PJPK Pemerintah Daerah. Keluaran yang dihasilkan adalah Laporan Fasilitasi Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Proyek KPBU SKBG Surabaya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan:

- 1) Proyek akan didirikan di atas lahan BMD Kota Surabaya dengan skema Rusunami SKBG, namun belum ada regulasi mengenai penerbitan SKBG.
- 2) Pemerintah Kota Surabaya memiliki formula tarif sewa lahan BMD yang diatur dalam Perwali Nomor 1/2020 yang berdampak pada peningkatan biaya investasi proyek.
- 3) Penyempurnaan kajian FBC.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemkot Surabaya untuk menyiapkan regulasi SKBG. dan merevisi formula tarif sewa lahan BMD untuk pemanfaatan hunian MBR menjadi Rp0.
- 2) Rencana pelaksanaan *market sounding* untuk melihat potensi investor.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah melakukan penyiapan proses transaksi untuk Proyek KPBU SKBG Surabaya.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasarkan bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 35%.

C. Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan yaitu Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan dan Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan. Adapun keluaran yang dihasilkan oleh kegiatan Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan yaitu Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan (Revitalisasi Rusun TOD Lebak Bulus - Pasar Jumat) dan untuk kegiatan Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan yaitu Dokumen Usulan Penjaminan Proyek KPBU Karawang Spuur. Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 30%.

Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan

Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan adalah terkait persetujuan komitmen pembayaran AP dari Menteri PUPR selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Adapun strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah koordinasi dengan Kemenkeu terkait proses konfirmasi final AP yang sebelumnya dianggarkan menggunakan kapasitas fiskal Kemen PUPR yang sekarang dipisah menjadi Kemen PU dan Kemen PKP.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2024, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah melakukan penyiapan proses transaksi untuk proyek Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus).

Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan adalah adanya reorganisasi Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, sehingga memerlukan kepastian peralihan PJPK dan kepastian kapasitas fiskal. Adapun strategi

yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah koordinasi antara Kementerian PU dan Kementerian PKP untuk memastikan kelanjutan PJPk.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2024, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah memastikan pembentukan regulasi KPBU di Kementerian PKP.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target sebanyak 2 (dua) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 30%.

D. NSPK Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* NSPK Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Penyusunan NSPK Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian *Output* yaitu Draf Kepmen Desain *prototype*/purwarupa Rumah Sederhana Hijau untuk Bangunan Klas 1a dan Surat Edaran Dirjen PI untuk lampiran SOP KPBU Perumahan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan NSPK KPBU Perumahan yaitu penyusunan NSPK KPBU menunggu pengundangan Rapermen PUPR tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 2/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja adalah penyiapan draf SE Dirjen tentang juknis pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan sesuai dengan nomenklatur Kementerian PKP.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2024, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah Penyusunan NSPK KPBU di Kementerian PKP.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan atau sebesar 100%, yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 25%.

Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan

Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Kegiatan Transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki bobot 50% dengan rincian bobot 35% untuk rincian *Output* Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dan sisa bobot 15% dibagi untuk porsi paket kegiatan lainnya.

A. Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan

Rincian *Output* Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan memiliki 2 (dua) indikator rincian *Output* yaitu Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) dokumen dan Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) kesepakatan berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja 2024.

Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas 2 (dua) paket kegiatan yaitu Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Pusat dan Pendampingan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Daerah. Untuk Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan terdiri atas paket Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Gabungan dan Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan Karawang Spuur.

Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan

Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan berhasil mencapai 4 (empat) dokumen keluaran yaitu Laporan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Pusat, Laporan Pendampingan Transaksi KPBU Perumahan PJPk

Daerah, Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Rusun Cisaranten, dan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dukungan dan penyiapan transaksi pembiayaan perumahan diantaranya:

- 1) Perikatan calon penghuni Proyek KPBU Pemerintah Pusat.
- 2) Reorganisasi Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP sehingga memerlukan kepastian peralihan PJPk dan kepastian kapasitas fiskal PJPk.

Strategi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antara Kementerian PU dan Kementerian PKP untuk memastikan peralihan PJPk.
- 2) Dalam Proyek Rusun PJPk Daerah, perlu disiapkan proses regulasi yang akan memayungi mekanisme lelang apabila menggunakan skema BTO.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2024, tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah

- 1) Memastikan pembentukan regulasi dan organisasi kelembagaan KPBU di Kementerian PKP.
- 2) Memastikan kapasitas fiskal di Kementerian PKP.
- 3) Finalisasi Dokumen FBC.
- 4) Pendampingan pelaksanaan transaksi pada Proyek KPBU Rusun Perkotaan Surabaya.

Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan

Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan pada paket kegiatan Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Gabungan dapat terealisasi 1 (satu) dokumen yaitu Laporan Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Gabungan (Revitalisasi Rusun Pasar Jumat – TOD Lebak Bulus).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah kepastian pembagian wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Perumnas, sehingga perlu adanya penugasan dari Kementerian PUPR/BUMN kepada Perumnas sebagai Badan Pelaksana untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan kemudahan perizinan selama proses pengadaan dan pemilihan mitra swasta serta penetapan Peraturan Pemerintah yang mengatur PMN *non* tunai.

Strategi yang dilakukan untuk dapat terlaksananya paket kegiatan Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPk Gabungan yaitu melakukan koordinasi dengan Perumnas, Pemda DKI Jakarta, MRT Jakarta terkait dengan skema proyek, berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Perumnas terkait bentuk penugasan dan skema pemilihan mitra swasta, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait lokasi proyek yang belum *clean and clear*. Adapun tindak lanjut pada Tahun 2025 yaitu melakukan pemutakhiran FBC dengan skema proyek hasil koordinasi dengan semua *stakeholder*.

Pada Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan juga terdapat 2 (dua) target Kesepakatan Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan. Terkait target tersebut Dit. PPP hanya dapat mencapai 1 (satu) Kesepakatan dari 2 (dua) Kesepakatan target Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan. Adapun 1 (satu) kesepakatan tersebut yaitu Proyek Rumah Susun Karawang Spuur.

Rekapitulasi capaian Proyek KPBU Yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2020-2024:

Tabel 3. 3 Capaian Proyek KPBU Bidang Perumahan yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2020-2024

PROYEK	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
TARGET	1	2	2	2	2	9
REALISASI	0	0	2	2	1	5

Terdapat kendala dalam merealisasikan target kesepakatan pada proyek KPBU Bidang Perumahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Dit. PPP, terdapat permasalahan isu proyek yang masih perlu diselesaikan dan memerlukan tambahan waktu untuk pimpinan (PJPK) untuk mengambil keputusan dikarenakan adanya reorganisasi di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L).

Perubahan organisasi di tingkat K/L yaitu Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP menjadi salah satu penyebab utama tidak dapat terealisasinya target secara penuh. Perubahan organisasi membuat PJPK menunda (*hold*) sementara pelaksanaan proyek KPBU Perumahan, terutama pada proyek KPBU Perumahan dengan PJPK Pemerintah Pusat. Dampaknya Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang telah siap untuk dilelangkan tidak dapat mengajukan surat permohonan lelang kepada Menteri PUPR. Selain itu diperlukan adanya kepastian keberlanjutan proyek KPBU Perumahan terutama kepastian PJPK, lahan PJPK, dan kapasitas fiskal PJPK.

Faktor keberhasilan yang dilakukan sehingga proyek KPBU Rusun Karawang Spuur dapat diakui sebagai proyek KPBU perumahan yang siap dikerjasamakan yaitu:

1. Dokumen FBC dan dokumen pengadaan telah selesai sehingga proyek lanjut ke tahap berikutnya yaitu pelaksanaan pengumuman Prakualifikasi.
2. Telah disampaikan surat permohonan persetujuan pengadaan BUP Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur berdasarkan Nota Dinas dari Dirjen PI kepada Menteri PUPR No.52/ND/DP/2024 tanggal 15 Februari 2024.
3. Telah disampaikan Nota Dinas dari Dirjen PI kepada Menteri PUPR No.182/ND/DP/2024 tanggal 6 September 2024 terkait penyampaian strategi penghuni dan manfaat Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur.
4. Telah disampaikan Nota Dinas dari Dirjen PI kepada Sekjen PUPR No: 200/ND/DP/2024 tanggal 7 Oktober 2024 hal Permohonan Konfirmasi Kapasitas Fiskal Kementerian PUPR untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 antara lain Pelaksanaan *Financial Close* dan Konstruksi pada Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur.

Berdasarkan keluaran tersebut, maka total rincian *Output* berhasil mencapai 90% yang kemudian dikonversikan bobot penilaian capaian komponen menjadi sebesar 31,50% dibawah target komponen 35%.

B. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan memiliki indikator Rincian *Output* yaitu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target 4 (empat) Laporan berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024. Paket kegiatan yang menunjang target capaian Rincian *Output* yaitu Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU

Sektor Perumahan, dan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan. Berdasarkan Rincian *Output* tersebut terdapat keluaran *Output* di atas target terdiri dari:

- 1) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan.
- 2) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan.
- 3) Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan.
- 4) Profil Risiko UPRT2 Dit. PPP TA 2024.
- 5) Profil Risiko *Corruption Risk Assesment* Dit. PPP TA 2024.
- 6) Laporan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Triwulanan TA 2024.

Berdasarkan keluaran tersebut capaian yang diperoleh adalah 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* memperoleh persentase sebesar 30%.

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berjalan sesuai rencana baik pemantauan dan evaluasi pada Proyek KPBU Bidang Perumahan maupun pemantauan dan evaluasi pada penerapan manajemen risiko UPRT2 Dit. PPP.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai *Output*:

1. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proyek KPBU Bidang Perumahan melibatkan Kantor Bersama KPBU dan dilaksanakan berdasarkan pedoman money KPBU sektor perumahan Dit. PPP.
2. Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi KPBU.
3. Koordinasi dengan Pengampu MR tingkat UPRT-I dan tertib dalam penyampaian Laporan Penerapan MR UPRT2 TA 2024.
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan secara berkala.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi proyek KPBU Bidang Perumahan tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi, penyusunan laporan penerapan manajemen risiko UPRT I dan UPRT 2 Tahun 2024, dan penyusunan profil risiko Dit. PPP TA 2025.

C. Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan memiliki 1 (satu) indikator Rincian *Output* yaitu Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Berdasarkan Revisi Renstra DJPI Tahun 2020-2024 tidak terdapat target Laporan di Tahun 2024 namun Dit. PPP telah menyusun dan menghasilkan keluaran untuk Rincian *Output* yaitu:

1. Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024.
2. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dit. PPP TA 2023.
3. Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan Dit. PPP TA 2024
4. Laporan Money Bulanan Dit. PPP TA 2024.

Adapun tindak lanjut setelah penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024 adalah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024.

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pada Indikator Rincian *Output* Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dilakukan rutin secara Triwulanan di Tahun 2024 dengan melibatkan para mitra kerja dan Dit. PPP berperan aktif dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja bulanan di lingkungan DJPI yang diselenggarakan oleh Tim Kepatuhan Intern DJPI.

Tindaklanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah finalisasi laporan kinerja pada minggu ke-2 Bulan Januari 2025, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja bulanan, pelaksanaan evaluasi AKIP Dit. PPP TA 2024, dan pelaksanaan rekomendasi atas laporan hasil evaluasi AKIP Dit. PPP TA 2024.

Berdasarkan keluaran tersebut, Rincian *Output* berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) laporan atau sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 35%.

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dihasilkan berdasarkan rincian capaian dari *Output* paket sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Rincian Capaian Kinerja SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman, yang Layak, Aman, dan Terjangkau							
Sasaran Program: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman							
IKSP: Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan							
IKK: Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan							
Target			Capaian				
100,00%			100,55%				
No	Jenis Indikator Komposit IKK / KRO / RO / Indikator RO / Paket Kegiatan/Output	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi (%)	Bobot (%)	Capaian (%)
	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	%	100%	103,89%	87,82%	30,00%	31,17%
	I. Koordinasi	%	100%	103,89%	103,89%	30,00%	31,17%
A	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	%	100%	103,89%	103,89%	100%	103,89%
1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)	%	100%	100%	100%	60,00%	72,00%
a	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Sekunder dan Tapera (PT.SMF)	Rumah Tangga	11.540	271.653	120%	100%	120%
2	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera)	%	100%	17,82%	31,89%	40%	31,89%
a	Kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Sekunder dan Tapera (Tapera)	Rumah Tangga	7.251	5.780	31,89%	40%	31,89%
	Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya	Layanan	100%	120%	120%	5,00%	6,00%
1	Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan dan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui	%	100%	100%	100%	100%	100%

	Pembiayaan Sekunder Perumahan						
a	Laporan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan	Kegiatan	1	1	100%	100%	100%
b	Laporan Kegiatan Dukungan PT. SMF untuk penyaluran pembiayaan perumahan	Kegiatan					
	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	%	1	2	120%	100	120%
2	Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP)	%	100%	120%	120%	100%	120%
a	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP)	Kegiatan	1	2	120%	120%	120%
Persentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100%	93,77%	93,77%	50%	46,89%
I. Subsidi kepada Keluarga		%	100%	91,05%	91,05%	100%	27,31%
B	Fasilitasi Penyaluran FLPP	%	100%	91,05%	91,05%	30,00%	27,31%
I	Jumlah Penyaluran FLPP	%	100%	91,05%	91,05%	30,00%	27,31%
a	Penyaluran FLPP	Rumah Tangga	220.000	200.300	91,05%	30,00%	27,31%
C	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	%	100%	100%	100%	70,00%	66,46%
I	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Bantuan Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM)	%	100%	100%	100%	70,00%	66,46%
a	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)	Rumah Tangga	220.000	208.869	100%	70,00%	66,46%
Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan		%	100%	110%	110%	15,00%	16,50%
II. Kebijakan Sarana dan Prasarana		%	100%	120%	120%	50,00%	60,00%
E	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	%	100%	120%	120%	50,00%	60,00%
I	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	120%	50,00%	60,00%
a	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	100%
b	Pengembangan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	Rekomendasi Kebijakan	1	2	120%	100%	120%
2	Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Penandatanganan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	120%	30,00%	36,00%

a	Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	100%	30,00%
b	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	120%	100%	36,00%
3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	120%	20,00%	24,00%
a	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	2	120%	100%	24,00%
III. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		%	100%	100%	100%	20,00%	20,00%
E	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
a	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	NSPK	1	1	100%	100%	100%
IV. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		%	100%	100%	100%	15,00%	15,00%
F	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	Laporan	30	30	100%	100%	100%
a	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	Laporan	1	1	100%	100%	100%
b	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan	1	1	100%	100%	100%
c	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan	1	1	100%	100%	100%
d	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	Laporan	1	1	100%	100%	100%
e	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan	1	1	100%	100%	100%
f	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan	Laporan	1	1	100%	100%	100%

	Pembiayaan Perumahan Wilayah 3						
V. Pelayanan Publik Lainnya		%	100%	100%	100%	10%	10,00%
G	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	%	100%	100%	100%	100%	100%
I	Jumlah Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	I	I	100%	100%	100%
a	Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	Layanan	I	I	100%	100%	100%
V. Pelayanan Publik Lainnya		%	100%	100%	100%	5,00%	5,00%
H	Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	%	100%	100%	100%	5,00%	5,00%
I	Jumlah Pendampingan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	Layanan	I	I	100%	100%	100%
a	Jumlah Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	Layanan	I	I	100%	100%	100%
SK: Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan			100%	100,55%	100,55%	100%	100,55%

Berikut adalah uraian capaian kinerja Sasaran Kegiatan meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Jenis Indikator Komposit IKK:

Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera Serta

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Persentase Rumah Tangga yang mendapat Fasilitasi Pembiayaan Perumahan melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera adalah 103,89% dari target 100%. Jenis indikator ini memiliki bobot sebesar 30%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK adalah sebesar 31,17%. Adapun uraian capaian berdasarkan Rincian *Output* sebagai berikut:

Fasilitasi Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Fasilitasi Pembiayaan Perumahan memiliki 2 (dua) Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (SMF) dengan target penyaluran kepada 11.540 Rumah Tangga berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan Jumlah Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Tapera) dengan target berdasarkan Kontrak Kerja BP Tapera sebanyak kepada 8.717 unit dan target penerbitan efek pembiayaan perumahan tapera berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 sebanyak 7.251 unit.

Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan (SMF)

Berdasarkan penyampaian informasi pada Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tanggal 20 Desember 2024, PT. SMF (Persero) telah merealisasikan penyaluran dengan memfasilitasi pembiayaan perumahan kepada 268.663 debitur / rumah. Selanjutnya dilakukan *update* data status per 31 Desember 2024 menjadi 271.653 debitur / rumah.

Tingginya NoA (*Number of Account*) merupakan dampak dari masifnya penyaluran pembiayaan mikro perumahan sebagai bagian dari implementasi perluasan mandat Perpres Nomor 100 Tahun 2020. Berikut detail capaian PT SMF Tahun 2024:

Tabel 3. 5 Detail Capaian PT SMF Tahun 2024

Produk	Plafon Pembiayaan (Rp)			Jumlah Debitur		
	Konvensional	Syariah	Total Plafon	Konvensional	Syariah	Total Debitur
KPR Komersial	641.257.405.000	1.254.571.734.437	1.895.829.139.437	1.456	5.391	6.847
Kredit Konstruksi	2.400.000.000	-	2.400.000.000	1	-	1
Kredit Mikro Perumahan	85.465.942.340	184.279.356.535	269.745.298.875	52.310	105.744	158.054
Kredit Multiguna	9.422.651.784.000	809.100.000.000	10.231.751.784.000	99.109	7.641	106.750
Kredit Rumah Usaha	-	-	-	-	-	-
KPR Sewa-Beli	-	800.000.000	800.000.000	-	1	1
Total	10.151.775.131.340	2.248.751.090.972	12.400.526.222.312	152.876	118.777	271.653

Terdapat peningkatan realisasi dari tahun ke tahun (Tahun 2020 s.d Tahun 2024). Pada Realisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF (Persero) selalu memperoleh capaian unit di atas target Renstra DJPI TA 2020-2024.

Tabel 3. 6 Rincian Penyaluran Fasilitas Pembiayaan PT. SMF (Persero) Tahun 2020-2024 dan Perbandingan Target dan Realisasi dalam Unit

Jumlah Debitur/NoA	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
	Target	8.460	10.000	10.000	10.000	11.540
	Realisasi	8.460	12.921	65.263	333.935	271.653

Tingginya realisasi penyaluran SMF dikarenakan adanya perluasan mandat PT SMF berdasarkan Perpres RI No.100 Tahun 2020 tentang pembiayaan sekunder, sehingga yang sebelumnya hanya dapat menyalurkan untuk produk KPR Siap Huni diperluas menjadi berbagai produk (seperti mikro perumahan, kredit konstruksi, dan KPR inden/PPJB).

Capaian realisasi jumlah unit PT SMF tidak semua dimasukkan ke dalam perhitungan capaian kinerja Dit. PPP karena capaian unit terlampaui tinggi jika dibandingkan dengan target unit berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024. Pada pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan nilai realisasi unit (PT. SMF) yang diperhitungkan sebagai capaian adalah maksimal 120% dari target unit. Adapun alasan tidak semua realisasi jumlah unit PT SMF tidak diakui karena akan menghasilkan nilai persentase capaian cukup tinggi dan kurang menggambarkan kondisi capaian secara umum.

Tantangan PT SMF dalam fasilitas pembiayaan perumahan adalah kemungkinan penurunan permintaan pembiayaan mikro perumahan dari PT PNM. Hal ini disebabkan PT PNM memperoleh opsi pendanaan lain dari induk Perusahaan dengan bunga yang lebih murah. Adanya volatilisasi suku bunga surat utang, menyebabkan kurang kompetitifnya *rate* yang diberikan PT PNM, dan terbatasnya lembaga keuangan mikro yang dapat menyalurkan pembiayaan mikro semasif PT PNM.

Adapun solusi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan ini yaitu melakukan pendekatan/perluasan mitra pembiayaan mikro perumahan. Hingga saat ini sudah ada 17 mitra di luar PT PNM yang melakukan *refinancing* atas pembiayaan mikro perumahan, yang berasal dari segmen BPR, *Multifinance*, dan Lembaga Keuangan Lainnya.

Perhitungan *cascading* capaian kinerja Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan oleh PT. SMF (Persero) dinilai sebesar 100%. Indikator Rincian *Output* Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF) memiliki bobot sebesar 60% sehingga capaian kinerja adalah sebesar 72%.

Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera)

BP Tapera memiliki target penerbitan efek pembiayaan perumahan tapera sebanyak 8.717 unit sesuai Kontrak Kinerja BP Tapera 2024 dan memiliki target penerbitan efek pembiayaan perumahan Tapera berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 sebanyak 7.251 unit.

Tabel 3. 7 Rincian Penerbitan Efek Pembiayaan Tapera Tahun 2024

Efek Pemanfaatan Tapera							
	Bank	Nama Efek	Jumlah Debitur	Nominal Realisasi (100%)	% Pendanaan BP Tapera	Nominal Pendanaan Tapera	Keterangan
3							
4	BTN	LTN BTN I Tahun 2021	69	Rp 10,185,851,000	100%	Rp 10,185,851,000	DONE
5		TOTAL 2021	69	Rp 10,185,851,000		Rp 10,185,851,000	
6							
7	BTN	LTN BTN II Tahun 2022 Seri A	320	Rp 47,740,324,676	100%	Rp 47,740,324,676	DONE
8	BTN	LTN BTN II Tahun 2022 Seri B	708	Rp 105,838,274,580	75%	Rp 79,378,705,935	DONE
9	BTN	LTN BTN II Tahun 2022 Tahap 1	1,882	Rp 281,155,042,771	75%	Rp 210,866,282,078	DONE
10	BRI	LTN BRI I Tahun 2022	457	Rp 69,776,810,000	75%	Rp 52,332,607,500	DONE
11	BTN	LTN BTN III Tahun 2022 Tahap 2	1,167	Rp 174,913,180,600	75%	Rp 131,184,885,450	DONE
12		TOTAL 2022	4,534	Rp 679,423,632,627		Rp 521,502,805,639	
13							
14	BSI	Sukuk BSI 2023 Tahap 1	34	Rp 5,011,650,000	75%	Rp 3,758,737,500	DONE
15	BTN	LTN BTN IV 2023 Tahap 1	320	Rp 47,864,186,500	75%	Rp 35,898,139,875	DONE
16	BTN SYARIAH	Sukuk Mudharabah BTN Tahap 1 2023	835	Rp 123,404,232,028	75%	Rp 92,553,174,021	DONE
17	BTN	LTN BTN IV 2023 Tahap 2	2,653	Rp 404,745,014,255	100%	Rp 404,745,014,255	DONE
18	BRI	LTN BRI 2023	514	Rp 79,313,430,500	75%	Rp 59,485,072,875	DONE
19	bjb	NCD bjb 2023	140	Rp 20,222,996,117	100%	Rp 20,222,996,117	DONE
20	BTN	EBUS BTN A 2023	55	Rp 8,322,228,251	75%	Rp 6,241,671,188	DONE
21	BTN	EBUS BTN B 2023	1,467	Rp 234,541,750,854	100%	Rp 234,541,750,854	DONE
22	BTN SYARIAH	Sukuk BTN Syariah Tahap 2 2023	1,154	Rp 175,038,964,000	100%	Rp 175,038,964,000	DONE
23	bjb	NCD bjb 2 2023	30	Rp 4,562,185,000	100%	Rp 4,562,185,000	DONE
24	Kalsel	NCD Kalsel 2023	10	Rp 1,677,350,000	75%	Rp 1,258,012,500	DONE
25	Kalsel Syariah	NCD Kalsel Syariah 2023	37	Rp 6,053,650,000	75%	Rp 4,540,237,500	DONE
26		TOTAL 2023	7,249	Rp 1,110,757,637,505		Rp 1,042,845,955,685	
27							
28	NTB Syariah	NCD NTB SYARIAH TAHAP 1 2023	8	Rp 1,371,090,000	100%	Rp 1,371,090,000	DONE
29	BRI	LTN BRI III TAHUN 2024	466	Rp 74,560,477,000	75%	Rp 55,920,357,750	DONE
30	BSI	SUKUK BSI 2023 TAHAP 2	70	Rp 10,348,815,359	75%	Rp 7,761,611,519	DONE
31	BTN	LTN BTN IV TAHUN 2023 TAHAP 4	1,242	Rp 203,350,626,300	100%	Rp 203,350,626,300	DONE
32	Kalsel	NCD KALSEL TAHAP 1 2024	11	Rp 1,804,410,000	75%	Rp 1,353,307,500	DONE
33	bjb	NCD bjb III Tahun 2024	56	Rp 8,906,845,000	100%	Rp 8,906,845,000	DONE
34	Kalsel Syariah	NCD Kalsel Syariah Tahap 1 2024	9	Rp 1,479,230,000	100%	Rp 1,479,230,000	DONE
35	Jambi	NCD Bank Jambi 2024	17	Rp 2,648,340,000	100%	Rp 2,648,340,000	DONE
36	NTB Syariah	NCD NTB SYARIAH Tahun 2024 Tahap 2	6	Rp 1,017,820,000	100%	Rp 1,017,820,000	DONE
37	Kalsel	NCD Kalsel Tahap 2 Tahun 2024	21	Rp 3,684,540,000	75%	Rp 2,763,405,000	DONE
38	BTN SYARIAH	SUKUK BTN 2024	501	Rp 80,955,793,000	100%	Rp 80,955,793,000	DONE
39	BTN	LTN BTN IV 2024 TAHAP 5	1,870	Rp 312,678,083,000	100%	Rp 312,678,083,000	DONE
40	KALSEL SYARIAH	NCD Kalsel Syariah Tahap 1 2024	27	Rp 4,635,245,000	100%	Rp 4,635,245,000	DONE
41	JAMBI	NCD JAMBI 2 2024	27	Rp 4,370,480,000	100%	Rp 4,370,480,000	DONE
42	BJB	NCD BJB IV TAHUN 2024	80	Rp 12,855,240,000	100%	Rp 12,855,240,000	DONE
43	BSI	SUKUK BSI TAHAP 3 2023	68	Rp 10,625,059,951	75%	Rp 7,968,794,963	DONE
44	BTN	LTN BTN IV TAHUN 2024 TAHAP 6	884	Rp 147,909,042,000	100%	Rp 147,909,042,000	DONE
45	BTN SYARIAH	SUKUK BTN 1 TAHUN 2024 TAHAP 1	321	Rp 52,444,485,000	100%	Rp 52,444,485,000	DONE
46	JAMBI	NCD BANK JAMBI Thp III Thn 2024	8	Rp 1,285,920,000	100%	Rp 1,285,920,000	DONE
47	JAMBI SYARIAH	NCD JAMBI SYARIAH TAHUN 2024	8	Rp 1,284,360,000	100%	Rp 1,284,360,000	DONE
48	BJB	NCD II Bank BJB Thn 2024	45	Rp 11,360,786,569	100%	Rp 11,360,786,569	DONE
49	KALSEL	NCD PT BPD Kalsel Thp III Thn 2024	7	Rp 2,074,951,389	100%	Rp 2,074,951,389	DONE
50	KALSEL SYARIAH	NCD SYR BPD Kalsel Thp III Thn 2024	28	Rp 7,826,569,316	100%	Rp 7,826,569,316	DONE
51		TOTAL 2024	5,780	Rp 934,222,383,307		Rp 934,222,383,307	
52		TOTAL KESELURUHAN TERBIT EFEK	17,632	Rp 2,759,845,339,016		Rp 2,508,756,995,631	

Data realisasi capaian BP Tapera penerbitan efek dari penyaluran pembiayaan perumahan pada Tahun 2024 sebanyak 5.780 unit atau setara dengan nilai Rp934.222.383.307.

Pada perbandingan realisasi terhadap target penyaluran Pembiayaan Tapera, BP Tapera berhasil merealisasikan sebanyak 79,71% atau 5.780 unit dari target sebesar 7.251 debitur rumah tangga (mengacu pada target Renstra DJPI TA 2020-2024). Indikator Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera) memiliki bobot perhitungan sebesar 40%, sehingga capaian kinerja Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (Tapera) adalah sebesar 31,89%

Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran Pembiayaan Tapera diantaranya implementasi Program Tapera masih menunggu penetapan regulasi teknis yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta Tapera.

Strategi yang dilakukan oleh BP tapera untuk memperoleh realisasi dalam penyaluran pembiayaan Tapera Tahun 2024:

1. Pembatasan komitmen menjadi kuota (melihat ketersediaan dana).
2. Promosi dan edukasi dengan Bank Penyalur kepada MBR dan Pengembang terkait hak & kewajiban rumah subsidi.
3. Melakukan pengecekan fisik rumah atas akad setelah 14 hari kerja, guna memastikan rumah sesuai standar saat akad.
4. *Stakeholder gathering* Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan.

Tindaklanjut yang disiapkan untuk Tahun 2025 oleh BP Tapera diantaranya memberikan sosialisasi dan edukasi bagi *stakeholder* perumahan (instansi dan calon debitur), memberikan *reward & punishment* kepada Bank Penyalur atas evaluasi kinerja penyaluran yang telah dilakukan, dan memastikan seluruh Bank Penyalur

memiliki potensi *developer* kelolaan yang dapat melakukan akad dengan tepat waktu dan rumah terbangun 100%.

Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya

Pada Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya memiliki Rincian *Output* yaitu Fasilitasi Pembiayaan Perumahan dengan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Sekunder Perumahan. Adapun target keluaran dalam Renstra DJPI TA 2020-2024 adalah 1 (satu) kegiatan. Realisasi capaian kinerja berhasil dilakukan 100%.

Dit. PPP di Tahun 2024 menambah 1 (satu) keluaran kegiatan baru pada Rincian *Output* Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan yaitu Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP) diluar dari target kegiatan yang ada pada Renstra DJPI TA 2020-2024.

Atas penambahan keluaran kegiatan ini maka untuk perhitungan capaian kinerja Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya memperoleh realisasi sebesar 6,00% di atas bobot perhitungan 5,00%.

Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan

Indikator Rincian *Output* Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan memiliki Paket kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan dengan keluaran Laporan Kegiatan Dukungan PT. SMF untuk penyaluran pembiayaan perumahan.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan kegiatan yaitu pelaksanaan *Pilot Project Build Change* rumah swadaya terkendala oleh perijinan, karena belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kab. Kendal. Strategi Pelaksanaan target penyaluran pada Tahun 2024 adalah kolaborasi dengan klinik rumah swadaya DJP untuk fasilitasi pengurusan perijinan. Adapun tindak lanjut yang dilakukan pada Tahun 2025 dengan melanjutkan *Pilot Project Build Change* dan menyiapkan skema IGAHP Tahap II.

Pada Indikator Rincian *Output* Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan berhasil mencapai target sebanyak 1 (satu) Rekomendasi Kebijakan dengan keluaran Laporan Kegiatan Dukungan PT SMF untuk penyaluran pembiayaan perumahan. Capaian keluaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya sebesar 100% yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja sebesar 5%.

Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan (Tapera)

Dit. PPP turut memberikan dukungan kepada BP Tapera dalam merealisasikan targetnya melalui paket kegiatan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan. Paket kegiatan ini menghasilkan kegiatan/keluaran Laporan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan dukungan kepada BP Tapera adalah belum ditetapkannya Keppres Komite Tapera. Strategi yang dilakukan dalam menghadapi kendala yang dihadapi dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dalam rangka percepatan penetapan Keppres Komite Tapera.

Menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

Strategi BP Tapera dalam menyukseskan 3 juta rumah yaitu berperan sebagai Operator Investasi Pemerintah, *leverage* unit melalui implementasi Program Tapera (*collection* ASN, BUMN/D, dan pekerja mandiri), dan pengembang skema pembiayaan untuk hunian vertikal dan berwawasan lingkungan. Selain itu BP Tapera terus berupaya dan mendukung kebijakan ke depan melalui percepatan PKS dengan Bank

Penyalur (23 Desember 2024), perubahan Kepmen terkait batas atas penghasilan MBR penerima bantuan/kemudahan, dan penetapan skema baru FLPP (50:50, dengan suku bunga *tiering*).

Jumlah Dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan

Rincian *Output* pada Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan memiliki Indikator Rincian *Output* Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui *Indonesian Green and Affordable Housing Program* (IGAHP) dengan *Output* yaitu Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Perumahan melalui *Indonesian Green and Affordable Housing Program* (IGAHP).

Pelaksanaan kegiatan dukungan pembiayaan perumahan melalui *Indonesian Green and Affordable Housing Program* (IGAHP) terdiri dari:

1. Penyusunan *Roadmap* IGAHP Tahun 2025 - 2030
2. Pendampingan *Pilot Project* IGAHP
3. Identifikasi Proyek IGAHP
4. Pendampingan Sertifikasi BGH
5. Penyusunan *Housing Queue* BNBA Calon Penerima Manfaat Pembiayaan Perumahan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah perubahan *implementing agency* dari Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. Strategi yang telah dilakukan melanjutkan penyiapan *Roadmap* IGAHP 2025-2030. Adapun tindak lanjut pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Finalisasi skema pemanfaatan dana PLN.
2. Penyepakatan modalitas pinjaman dari ADB ke Pemerintah Indonesia.
3. *Piloting* HMF di Jawa Tengah dan Bekasi.
4. *Piloting* Pembiayaan Konstruksi Hijau di Serang, Banten
5. Penyusunan *readiness criteria* agar IGAHP dapat masuk ke dalam daftar rencana kegiatan.
6. Pendataan *Housing Queue* dan peminatan program pembiayaan perumahan di 13 (tiga belas) Provinsi Prioritas pendataan.

Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah 100% dari target 100%. Jenis rincian *Output* ini memiliki bobot sebesar 50%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK adalah sebesar 50%. Persentase bobot perhitungan pada indikator Rincian *Output* terbagi menjadi 2 (dua) indikator yaitu Jumlah penyaluran Program FLPP dengan bobot 30% dan jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan bobot 70%. Berikut uraian capaian berdasarkan Rincian *Output*:

A. Fasilitas penyaluran FLPP

Rincian *Output* Fasilitas Penyaluran FLPP memiliki 1 (satu) Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Pelaksanaan Penyaluran FLPP. Pada pelaksanaannya target FLPP diawal Tahun 2024 sebanyak 166.000 unit atau setara Rp.13.720.000.000.000 dan dilakukan tambahan kuota untuk program FLPP sehingga mengubah target unit pada bulan Oktober 2024 menjadi 200.000 unit atau Rp.17.020.000.000.000 berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal permintaan dokumen kelengkapan pencairan atas tambahan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Tahun 2024. Program FLPP juga memiliki target penyaluran berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 sebanyak 220.000 unit, nilai target ini yang akan digunakan oleh Dit. PPP dalam melakukan perhitungan capaian kinerja TA 2024.

Realisasi penyaluran FLPP Tahun 2024 sebanyak 200.300 rumah tangga dengan nilai Rp24.577.192.153.214. Capaian realisasi ini masih di bawah target Renstra DJPI TA 2020-2024 (220.000 unit) dengan persentase 91.05%. Namun jika kinerja penyaluran FLPP menggunakan target

berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024 (200.000 unit) maka realisasi unit di atas target dengan persentase 100.15%. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari kecermatan dalam melakukan strategi optimalisasi pemanfaatan dana FLPP. Adapun keberhasilan ini disebabkan realisasi nilai anggaran penyaluran dana FLPP melebihi target dikarenakan realisasi pengembalian pokok FLPP melebihi target.

Tabel 3. 8 Realisasi Program FLPP dibandingkan Target Tahun 2024

PROGRAM FLPP	TARGET UNIT	REALISASI UNIT	PRESENTASE
Target Berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024	220.000	200.300	91,05%
Target Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No.S-260/PB.4/2024	200.000	200.300	100.15%.

Rincian *Output* pada fasilitasi penyaluran FLPP memiliki bobot 30% sehingga capaian kinerja yang Rincian *Output* yang diperoleh adalah 27,31%.

Program FLPP memiliki minat yang cukup tinggi dari masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat bunga KPR FLPP sebesar 5,00%, tenor panjang sampai dengan 20 tahun dan memperoleh tambahan fasilitas subsidi bantuan uang muka sebesar Rp4.000.000.

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan

Layanan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) Pada Tahun 2024 sudah tidak lagi dilakukan, karena *Loan Agreement* berakhir pada Bulan Februari 2023. Sebagai informasi Capaian kinerja, BP2BT berhasil melakukan realisasi secara akumulasi dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 sebanyak 30.422 unit dengan profil pekerja penerima manfaat BP2BT mayoritas dari kalangan wiraswasta dengan persentase sebesar 58,95%, swasta sebesar 36,14%, dan sisanya berasal dari PNS serta TNI/Polri.

B. Fasilitasi Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka

Rincian *Output* Fasilitasi Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka memiliki 1 (satu) Indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Bantuan Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUM). Realisasi Rincian *Output* Fasilitasi Subsidi Bunga dan Bantuan Uang Muka sebesar 66,64% dari target bobot sebesar 70% berdasarkan realisasi penyaluran program SBUM TA 2024 sebesar 94,94% atau 208.869 unit.

Target awal penyaluran SBUM berdasarkan Renstra DJPI Tahun 2020-2024 sebesar 220.000 rumah tangga atau sebanyak Rp 895.000.000.000 Sedangkan untuk Penyaluran Subsidi Selisih Bunga / Selisih Margin (SSB/SSM) yang menggulung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebanyak Rp4.609.438.646.000 atau kepada 751.735 unit (Tagihan SBK merupakan pembayaran untuk akad-akad Tahun 2015-2020, tidak ada akad baru sejak 2021).

Pada Tahun 2024 pencapaian Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2024 penyaluran program SBUM sebanyak 208.869 unit atau sebesar Rp852.348.000.000, dimana terdapat sisa anggaran senilai Rp42.652.000.000 yang diblokir atau tidak dapat disalurkan karena penyaluran FLPP hanya sebanyak 200.300 unit. Sedangkan untuk realisasi program SBK sebanyak 732.927 unit atau sebesar Rp4.609.438.646.000, dengan rincian pembayaran untuk akad menggulung TA 2024 senilai Rp4.208.873.972.892 dan utang akad menggulung TA 2023 senilai Rp400.564.673.000.

Tabel 3. 9 Realisasi Penyaluran SBUM dan SSB

ITEM	SBUM	SSB
Target	220.000 unit Rp895.000.000.000	751.735 unit Rp4.609.438.646.000
Pencapaian	208.869 unit Rp852.348.000.000	732.927 unit Rp4.609.438.646.000
Persentase Capaian	94,94%	97,50%

Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran program SBUM adalah diperlukan penyusunan Nota Kesepahaman antara Satker DJPI dengan BP Tapera terkait pelaksanaan rekonsiliasi data debitur sebagai langkah tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2024, adanya kurang bayar SBUM pada Tahun 2023 senilai Rp38.112.000.000 serta kuota tambahan sebanyak 34.000 unit Tahun 2024, adanya pengembangan fitur integrasi antara FLPP dan SBUM melalui aplikasi eFLPP 2.0 (*fitur early warning sistem*).

Strategi yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan BP Tapera untuk pelaksanaan penyusunan Nota Kesepahaman, revisi DIPA untuk mengakomodasi kurang bayar SBUM Tahun 2023, penambahan kuota 34.000 unit Tahun 2024, dan penerapan *fitur early warning sistem*.

Tindaklanjut yang telah disiapkan untuk Tahun 2025 adalah optimalisasi penggunaan sistem e-FLPP 2.0 agar pemindahbukuan dana SBUM tidak terlambat dan pelaksanaan penyaluran program SBUM sesuai target Tahun 2025 sebanyak 240.000 unit.

C. Fasilitas Bantuan Biaya Administrasi

Bantuan Biaya Administrasi (BBA) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam pemenuhan sebagian atau seluruh biaya administrasi pembiayaan pemilikan rumah sejahtera. Rincian *Output* BBA tidak ada pada Renstra DJPI Tahun 2020-2024 namun pada Tahun 2023 Dit. PPP telah berhasil melakukan inovasi dengan melaksanakan penyaluran program BBA yang tata caranya diatur berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi pemilik rumah bagi MBR.

Tabel 3. 10 Progres Kinerja BBA Tahun 2023

No	Bank Pelaksana/Penyalur	Prognosa Bank (tanggal akad) TA 2023				Status eFLPP			Permintaan Pembayaran BBA Bank Pelaksana			Nilai Permintaan Pembayaran BBA yang disetujui (sudah proses pengujian oleh Satker)	
		13-30 Nov	1-10 Des	10-31 Des	Total Prognosa Bank	Jumlah Akad 13 Nov - 10 Des 2023	Upload Dokumen BBA	Upload G-Drive (BTN)	Unit	%	Rp	Rp	%
		Unit				Unit			Unit	%	Rp	Rp	%
1	BANK BTN	10.000	14.330	1.500	25.830	15.222	10.798	460	11.264	80,50	46.094.309.497	44.939.553.897	80,29
2	BTN SYARIAH	1.900	-	200	2.100	2.860	1.820	-	1.814	12,96	7.249.461.250	7.249.461.250	12,95
3	BANK BRI	1.164	20	80	1.264	1.032	-	-	-	-	-	-	-
4	BANK BSI	370	60	20	450	342	-	-	-	-	-	-	-
5	BANK MANDIRI	326	40	-	366	266	-	-	-	-	-	-	-
6	BPD JAWA BARAT DAN BANTEN	195	10	-	205	233	-	-	-	-	-	-	-
8	Bank NTB	10	-	5	15	65	59	-	59	0,42	240.200.000	236.000.000	0,42
7	BPD KALIMANTAN SELATAN SYARIAH	10	5	5	20	-	13	-	13	0,09	52.000.000	52.000.000	0,09
9	BPD YOGYA	6	-	-	6	6	6	-	6	0,04	20.340.000	20.340.000	0,04
10	Bank SUMSEL BABEL	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Bank SUMSEL BABEL SYARIAH	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BPD KALSEL	2	2	-	4	-	4	-	4	0,03	17.440.000	16.000.000	0,03
13	BANK BNI	-	-	10	10	15	-	-	-	-	-	-	-
14	BANK PAPUA	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		13.993	14.477	1.830	30.300	20.041	12.700	460	13.160	94,05	53.673.750.747	52.513.355.147	93,82

a. Prognosa Akad Bank TA 2023	30.300	Rp	121.200.000.000
b. Target BBA yang akan di tagihkan pada TA 2023 (akad 13-30 Nov) (DIPA)	13.993	Rp	55.972.000.000
c. Permintaan Pembayaran BBA Bank Pelaksana 2023 (disetujui)	13.160	Rp	52.513.355.147
d. Potensi Sisa Anggaran BBA TA 2023 berdasarkan Target pada huruf b (b-c)	833	Rp	3.458.644.853
e. Perkiraan Permintaan BBA akad 2023 yang akan di tagihkan pada TA 2024	17.140	Rp	68.560.000.000

Capaian Realisasi BBA berdasarkan DIPA 93,81% atau Senilai Rp52.513.355.147

Realisasi capaian penyaluran program BBA Tahun 2023 sebanyak 13.160 rumah tangga atau 93,81% dengan nilai rupiah sebesar Rp52.513.355.147. Adapun target DIPA pada BBA adalah 13.993 rumah tangga atau Rp 55.972.000.000.

Program BBA Tahun 2024 dengan Indikator Rincian *Output* Jumlah Penyaluran BBA tidak ada penyaluran. Kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BBA Pembiayaan Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah terdapat tanggapan Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 bahwa program FLPP dengan SBUM sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Maka anggaran BBA untuk Tahun 2024 tidak dialokasikan.

Strategi yang telah dilakukan dalam penyelesaian Program BBA Tahun 2024:

1. Telah disampaikan Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan tanggal 27 Februari 2024 perihal Penambahan Anggaran FLPP dan BBA TA 2024.
2. Telah disampaikan Surat Dirjen PI Nomor KU 0102-Dp/141 tanggal 6 Juni 2024 perihal penghentian program BBA kepada Bank Pelaksana dan Pengembang serta permintaan inventarisasi data BBA yang telah ditalangi pengembang.
3. Telah dilakukan rekonsiliasi dengan Bank Pelaksana FLPP & Tapera, terdapat Potensi Utang Pemerintah senilai ±Rp.174,84 miliar atau sebanyak 43.862 unit apabila BBA TA 2024 tidak dilanjutkan;
4. Telah disampaikan Nota Dinas Dirjen PI Nomor 183/ND/DP/2024 perihal Permohonan Penyediaan Anggaran BBA TA 2024 melalui optimalisasi anggaran Kementerian PUPR kepada Menteri PUPR pada tanggal 6 September 2024.
5. Disposisi Nota Dinas Permohonan Penyediaan Anggaran BBA TA 2024 dari Menteri PUPR kepada Sekjen dan Dirjen PI untuk melakukan pengecekan ketersediaan anggaran pada tanggal 9 September 2024.

Tindaklanjut yang dapat dilakukan dalam penyaluran Program BBA adalah proses revisi DIPA setelah Komisi V DPR RI terbentuk dengan memanfaatkan sisa dana dari Direktorat Jenderal SDA sebagaimana hasil koordinasi dengan Biro PAKLN.

Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Realisasi Jenis Indikator Komposit IKK Tingkat Implementasi Penyusunan Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah 100% dari target 100%. Jenis indikator ini memiliki bobot sebesar 15%, sehingga Capaian Kinerja Jenis Indikator IKK sebesar 15% dengan uraian capaian berdasarkan Rincian *Output* adalah sebagai berikut:

D. Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan memiliki 3 (tiga) Indikator Rincian *Output* yaitu:

1. Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) rekomendasi kebijakan yaitu Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR serta Pengembangan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR.
2. Jumlah Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target 2 (dua) rekomendasi kebijakan yaitu Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan
3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target 1 (satu) rekomendasi kebijakan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan

Realisasi jumlah keluaran Rincian *Output* Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024 di atas target Renstra DJPI TA 2020-2024. Dari jumlah target 5 (lima) rekomendasi kebijakan yang ditargetkan, berhasil menghasilkan 8 (delapan) rekomendasi kebijakan sehingga nilai capaian Rincian *Output* sebesar 60,00% dari target 50,00%.

Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Keluaran paket kegiatan Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR:

1. Revisi Besaran Penghasilan MBR.
2. Revisi Juknis Perhitungan Penghasilan.
3. Kajian Estimasi dan Revisi Harga Jual Rumah Tapak dan Rumah Susun 2025.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu diperlukan data desil penghasilan dari BPS namun belum ada jawaban dan perlu kesepakatan prototipe rumah subsidi yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Strategi yang telah dilakukan yaitu pertemuan dengan Eselon I BPS dan ekosistem pembiayaan perumahan, serta percepatan revaluasi harga jual atas prototipe rumah subsidi.

Tindak lanjut yang telah dipersiapkan untuk Tahun 2025:

1. Perumusan Revisi KepmenPUPR Nomor 22/2023 tentang Besaran Penghasilan MBR
2. Perumusan Revisi SE Dirjen 06/2023 Juknis Perhitungan Penghasilan
3. Perumusan Revisi KepmenPUPR Nomor 995/2021 dan Revisi KepmenPUPR Nomor 689/2023 tentang Harga Jual Sarusun dan Rumah Tapak

Jumlah Penyusunan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Komponen Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan memiliki 2 (dua) paket kegiatan yaitu Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan dan Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan.

Adapun keluaran pada kegiatan Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan adalah dokumen kesepakatan bersama (MoU) Tentang Pembangunan Perumahan bagi MBR di Kabupaten Kendal dan Pilot Project Kab. Brebes

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan:

1. PBG belum dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Brebes
2. Perlu penyesuaian PBG untuk mengakomodasi penggunaan *interlock brick* SIG

Strategi yang dilakukan untuk merealisasikan capaian *Output* perubahan *Siteplan* untuk persetujuan dan penerbitan PBG oleh Pemda Kab. Brebes dan Pemkab. Kendal segera memproses permohonan PBG yang diajukan oleh PT Asatu Realty Asri.

Tindak lanjut yang telah disiapkan untuk Tahun 2025 adalah penyelesaian pembangunan dan penjualan unit pilot project Kab. Brebes dan Kab. Kendal

Pada keluaran Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan memperoleh *Output* Dokumen terkait Bank Pelaksana yang telah melakukan pembaruan KSB dan Draft SK penetapan sebagai Bank Pelaksana.

Kendala yang dihadapi antara lain adanya perubahan nomenklatur Kementerian PUPR Menjadi Kementerian PKP, Tahapan Proses Pembaharuan Dokumen KSB mulai penyampaian Surat Minat sampai penandatanganan perlu menunggu KePres Pengangkatan Direktur Jenderal sebagai Pejabat Berwenang.

Strategi yang dilakukan untuk merealisasikan capaian *Output* akan dilakukan rapat bersama BHKP Setditjen PI membahas strategi penyelesaian pembaharuan status KSB.

Tindaklanjut yang disiapkan untuk Tahun 2025:

1. Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan
2. Korespondensi aktif dengan seBank Pelaksana yang akan pembaharuan dokumen KSB Tentang Penyaluran SBUM.

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Paket kegiatan pada Rincian *Output* Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah:

1. Skema Pembiayaan MBR Informal (Gotong Royong)
2. Pilot Project SMARTI
3. Penyelesaian BBA TA 2024

Kendala yang dihadapi:

1. Diperlukan kajian yang komprehensif oleh Tim Koalisi
2. Konsep KSB SMARTI masih dalam proses legal reuiu oleh BP Tapera
3. Perlu persetujuan Komisi V DPR RI untuk optimalisasi anggaran

Strategi yang dilakukan untuk dapat tercapainya kinerja yaitu melakukan reuiu kajian dengan Tenaga Ahli Tim Koalisi *follow up* dengan BP Tapera dan koordinasi intens dengan Biro PAKLN dan Itjen.

Tindak lanjut untuk Tahun 2025 adalah

1. Penyelesaian Kajian Pengembangan Alternatif Skema Pembiayaan Perumahan bagi MBR Informal berbasis Perumahan Gotong Royong
2. Penyelesaian KSB SMARTI
3. Penyelesaian BBA TA 2024

E. NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan memiliki indikator rincian *Output* yaitu Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan dengan paket kegiatan Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Adapun keluaran dari kegiatan ini yaitu *Draft* Perubahan SE Dirjen PI tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Rincian *Output* berhasil terealisasi 100% berdasarkan target Revisi Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024, yang kemudian dikonversikan berdasar bobot penilaian untuk kinerja Rincian *Output* sehingga capaian kinerja sebesar 20%. *Output* dari kegiatan *Draft* Revisi SE Dirjen No. 3/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian KBPP. Adapun kendala yang dihadapi *Draft* Petunjuk Teknis *Money* masih dalam proses reuiu oleh Tenaga Ahli dan Strategi yang dilakukan dalam menghadapi tantangan untuk memperoleh keberhasilan adalah percepatan reuiu draf petunjuk teknis *money* yang komprehensif oleh Tenaga Ahli.

Adapun tindaklanjut yang telah dipersiapkan untuk Tahun 2025 adalah penerbitan revisi SE Dirjen No. 3/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian KBPP.

F. Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Rincian *Output* pada Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan memiliki indikator Rincian *Output* yaitu Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan

Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan dengan target laporan berdasarkan Renstra DJPI Tahun 2020 – 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) laporan.

Dit. PPP berhasil mencapai realisasi laporan 100% berdasarkan jumlah yang telah ditargetkan. Nilai capaian 100% yang bila dikonversikan ke persentase nilai total capaian komponen sebesar 15%.

Tabel 3. 11 Rincian Realisasi Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan

Paket Kegiatan	Output Laporan	Jumlah	Satuan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	1	Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II	1	Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III	1	Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	9	Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah II	9	Laporan
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah III	9	Laporan

Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I,2, dan 3.

Pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, 2, dan 3 berhasil menghasilkan *Output* 3 (tiga) Laporan hasil Pemantauan dan evaluasi dengan penyebab keberhasilan telah dilakukannya pelaksanaan monev sesuai wilayah dan diselesaikan laporan tepat waktu. Adapun strategi yang telah dilakukan dengan berkoordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka pemantauan dan evaluasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan, yaitu melakukan evaluasi kinerja kuartalan dan semesteran, dan pembahasan evaluasi penyediaan rumah dan kualitas konstruksi rumah.

Tindak lanjut yang telah dipersiapkan yaitu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan mengacu Juknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, 2, dan 3

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah memiliki target 27 (dua puluh tujuh) laporan dengan keluaran laporan berdasarkan wilayah. Dit. PPP berhasil menyelesaikan target laporan dengan setiap wilayah menghasilkan 9 (Sembilan) laporan.

Pembagian 3 (tiga) wilayah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yaitu Wilayah I meliputi provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Wilayah II meliputi provinsi: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada Wilayah III meliputi provinsi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan Bank Pelaksana, Pengembang, BP Tapera, Satker DJPI, Satker PI dan per bantuan tenaga surveyor. Strategi yang dilakukan agar tercapainya kegiatan tersebut yaitu telah dilaksanakan kegiatan monev tinjauan fisik dan percepatan penyelesaian kegiatan monev dan penyusunan Laporan Akhir. Adapun tindak lanjut yang telah dipersiapkan untuk Tahun 2025 adalah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan mengacu Juknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dan Tindak Lanjut Hasil Monev dengan bersurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja masing-masing pengelola program SSB dan Komisioner BP Tapera.

G. Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

Rincian *Output* Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka memiliki 1 (satu) indikator rincian *Output* yaitu Jumlah Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka atas kegiatan Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan penyaluran dana subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Kegiatan ini memiliki realisasi capaian *Output* sesuai dengan jumlah target hasil keluaran yaitu 1 (satu) layanan yang kemudian dikonversi ke bobot perhitungan menjadi 10%.

H. Fasilitas Mikro Kredit Perumahan

Rincian *Output* Fasilitas Mikro Kredit Perumahan memiliki 1 target layanan Pelaksanaan Fasilitas Mikro Kredit Perumahan. Pelaksanaan kegiatan ini untuk operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan penyaluran mikro kredit perumahan (Penyaluran Bantuan Kredit Mikro Perumahan *Housing Micro Finance* TA 2024). Bobot Indikator Rincian *Output* sebesar 5% dan dapat tercapai 100%.

Salah satu dukungan dalam kegiatan ini yaitu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan terkait pembukaan blokir anggaran *Housing Micro Finance* (HMF) pada DIPA TA 2024. Adapun hasil dari koordinasi ini yaitu DJA merekomendasikan pelaksanaan penyaluran program HMF dapat dilakukan sepanjang terdapat dasar hukum yang jelas. Menindaklanjuti hal tersebut, Dit. PPP telah menyusun draf Rapermen PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Swadaya.

3.3. ANALISA PERBADINGAN KINERJA

3.3.1 PERBADINGAN KINERJA ORGANISASI

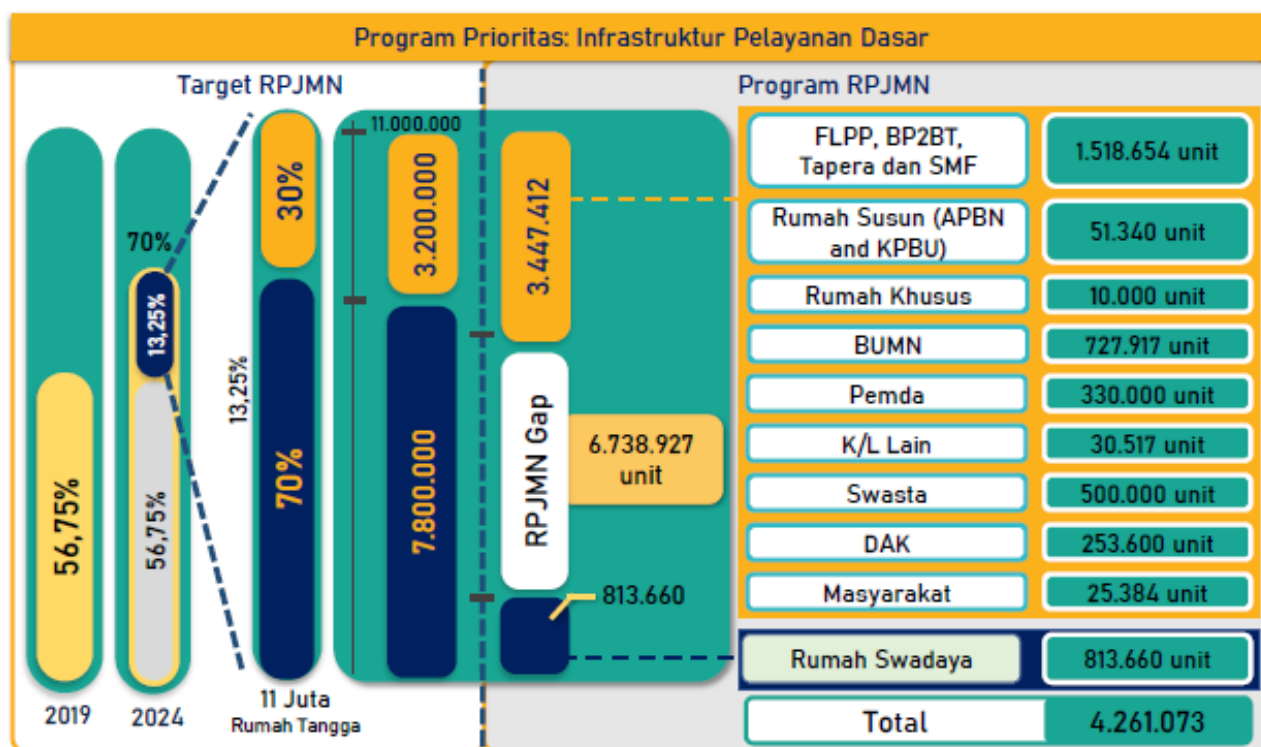
Perbandingan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Kinerja Tahun 2020 – Tahun 2024

Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja SP (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen									
Meningkatnya Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	24,25%	23,25%	25,00%	24,56%	24,73%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman									
Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Tingkat pemenuhan aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	42,06%	48,38%	49,35%	106,07%	100,55%

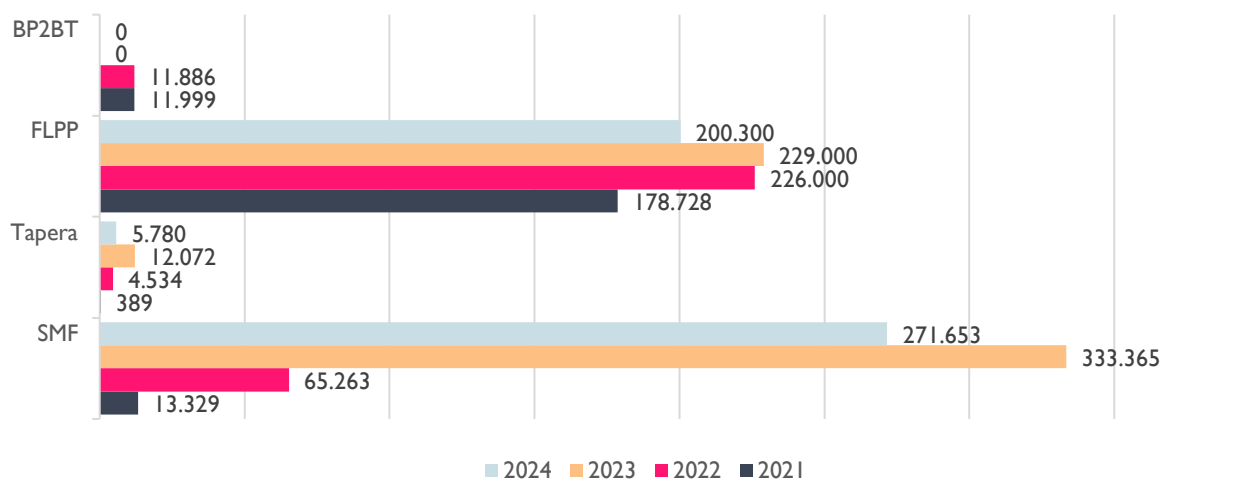
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Salah satu Agenda Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, khususnya terkait dengan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau yaitu Indikator Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau dengan target hingga Tahun 2024 yaitu 70%. Hubungan antara RPJMN dengan program yang dijalankan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah sebagai berikut:

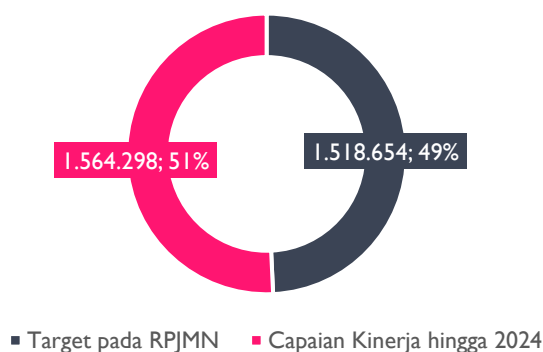


Gambar 3. 1 Struktur Hubungan RPJMN dengan Program yang Dijalankan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Program RPJMN 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yaitu BP2BT serta program yang terkait dengan mitra kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan adalah FLPP, Pembiayaan Tapera, dan Pembiayaan PT SMF. Perbandingan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terhadap standar nasional RPJMN 2020 – 2024 pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Perbandingan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun, 2021, 2022, 2023, dan 2024



Grafik 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Pembiayaan Perumahan dengan RPJMN

Total capaian kinerja seluruh program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 sebanyak 1.564.298 unit atau sebesar 103% jika dibandingkan dengan target pada RPJMN 2020 – 2024 sebesar 1.518.645 unit.

3.3.2 KINERJA REALISASI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TAHUN 2024

Pelaksanaan monitoring kinerja realisasi capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan proyek atau program. Proses ini mencakup analisis data, perbandingan dengan target yang telah ditetapkan, dan identifikasi potensi perbaikan. Berikut tabel informasi target, realisasi, dan kinerja pada indikator kinerja kegiatan Dit. PPP TA 2024:

Tabel 3. 13 Kinerja Realisasi Capaian IKK Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SPT	OKT	NOV	DES
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Target	0.20%	0.42%	1.42%	4.34%	6.25%	8.99%	10.24%	12.33%	15.27%	16.87%	20.44%	25.00%
	Realisasi	0.01%	0.53%	2.37%	3.52%	5.00%	8.55%	10.41%	12.54%	15.97%	16.88%	20.81%	24.73%
	Kinerja	5.00%	125.60%	166.73%	81.11%	79.96%	95.11%	101.66%	101.70%	104.58%	100.06%	101.81%	98.92%
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan													
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target	0.46%	2.24%	5.02%	13.49%	16.55%	21.99%	35.00%	45.00%	55.00%	75.00%	85.00%	100.00%
	Realisasi	1.47%	2.80%	5.38%	7.97%	11.61%	43.06%	50.71%	59.47%	67.66%	77.07%	85.06%	100.55%
	Kinerja	319.57%	125%	107.17%	59.08%	70.15%	195.82%	144.89%	132.16%	123.02%	103.60%	100.07%	100.55%

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan

a. Keterangan

Akumulasi realisasi capaian indikator kinerja Tahun 2024 pada IKK tingkat pencapaian pelaksanaan penyiapan investasi pembiayaan perumahan sebesar 24,73% nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 25% sehingga masih terdapat deviasi.

b. Permasalahan

Terdapat kendala dalam merealisasikan target kesepakatan pada proyek KPBU Bidang Perumahan yang siap dikerjasamakan. Berdasarkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Dit. PPP dan Kantor Bersama KPBU, terdapat isu dan permasalahan proyek yang masih perlu diselesaikan dan memerlukan tambahan waktu untuk pimpinan (PJPK) untuk mengambil keputusan karena adanya reorganisasi Kementerian/Lembaga (K/L).

Perubahan organisasi di tingkat K/L yaitu Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP menjadi salah satu penyebab utama tidak dapat terealisasinya target secara penuh. Perubahan organisasi membuat PJPK menunda (*Hold*) sementara pelaksanaan proyek KPBU Perumahan, terutama pada proyek KPBU Perumahan dengan PJPK Pemerintah Pusat. Dampaknya Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung yang telah siap untuk dilelangkan tidak dapat melanjutkan ke tahap permohonan lelang kepada Menteri PUPR. Selain itu diperlukan adanya kepastian keberlanjutan proyek KPBU Perumahan terutama terkait kepastian PJPK, kepastian lahan PJPK, dan kapasitas fiskal PJPK.

c. Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Kementerian PU, Kementerian PKP dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan keberlanjutan Proyek KPBU Perumahan terutama terkait peralihan PJPK, kapasitas fiskal PJPK, dan pembentukan regulasi KPBU Perumahan di Kementerian PKP. Melaksanakan pengumuman Prakualifikasi Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Proyek Rusun Perkotaan Surabaya, dan Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus).

IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

a. Keterangan

Realisasi capaian indikator kinerja IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan Perumahan sebesar 100.55% dengan target 100%. Pelaksanaan realisasi bantuan pembiayaan perumahan seperti program FLPP, SBUM, dan (SBK SSB/SSM) berjalan dengan baik dengan mayoritas mampu merealisasikan target unit yang telah ditetapkan.

b. Permasalahan

1. Realisasi penyaluran program SBUM TA 2024 sebesar 208.869 unit, masih di bawah target 220.000 unit. Terdapat pagu anggaran program SBUM yang di blokir sebesar Rp42.652.000.000, sehingga realisasi program SBUM TA 2024 belum optimal 100%. Pagu anggaran yang diblokir merupakan sisa dana yang tidak dapat dilakukan penyaluran lagi karena realisasi jumlah unit program FLPP telah tercapai.
2. Penyaluran BBA TA 2024 tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan tanggapan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 bahwa program FLPP dengan SBUM sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Maka dengan demikian anggaran BBA untuk Tahun 2024 tidak dialokasikan.

c. Tindak Lanjut

Finalisasi perhitungan harga jual rumah tapak dan sarusun milik Tahun 2025, memastikan penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan, dan mendukung mitra kerja untuk meningkatkan kinerja terutama dalam hal merealisasikan target unit Tahun 2025 dan program pemerintah 3 juta rumah.

3.3.3 PERBANDINGAN KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL (*BENCHMARKING*)

Perbandingan kinerja dengan standar nasional dilakukan dengan membandingkan kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP) dengan Direktorat Rumah Susun (Dit. Rusun), Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alasan dilakukan perbandingan dengan unit kerja tersebut yaitu:

1. Memiliki fokus dan tujuan utama yang sama dalam rangka penyediaan dan pemenuhan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Memiliki kesamaan pada sasaran program yaitu meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman.
3. Memiliki program kegiatan yang mendukung optimalisasi bantuan pembangunan pelaksanaan Proyek KPBU Bidang Perumahan bagi MBR.
4. Memiliki kesamaan pada *Output* berupa jumlah unit rumah tangga yang diharapkan dapat mengurangi jumlah *backlog* perumahan yang ada.

Berikut merupakan sasaran program, indikator kinerja sasaran program, tugas dan fungsi dari Dit. PPP dan Dit. Rusun:

Tabel 3. 14 Perbandingan Sasaran Program, tugas dan fungsi Dit. PPP dan Dit. Rusun

Unit Kerja	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Rumah Susun
Sasaran Program	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman.	
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja kedua yaitu Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.	
IKSP	1. Tingkat pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan. 2. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur PU dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
Tugas	Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.	Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun, pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan standar dan pedoman, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, fasilitasi pengelolaan dan penghunian, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi,

		serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun.
Fungsi (salah satunya)	3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 5. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan. 6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.	1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan rumah susun. 2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun. 3. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penghunian rumah susun. 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun. 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun.

Capaian Kinerja

Target kinerja Dit. Rusun di Tahun 2023 merupakan dukungan atas Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023, yaitu persentase pemenuhan kebutuhan layak huni sebesar 57,40%. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dit. Rusun tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berupa jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui pembangunan rumah susun sebanyak 4.658 unit. Capaian terhadap Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Realisasi Pembangunan Rusun terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
IKSP :		
1. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	57,40%	
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni		
IKSK :		
Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	4.658 Unit	4.724 Unit

Dit Rusun telah melaksanakan pembangunan sebanyak 4.724 unit rumah susun atau 101,42% dari target yang diperjanjikan pada DIPA Tahun 2023. Capaian tersebut disebabkan adanya pekerjaan yang mengalami penambahan jumlah realisasi karena perubahan tipe Rumah Susun, serta penambahan *Output* dari pekerjaan lanjutan yang belum terhitung pada tahun sebelumnya. Berikut detail capaian *Output* pembangunan rumah susun pada Tahun 2023 terdiri atas rumah susun penyelesaian MYC 2022-2023, pembangunan baru SYC 2023, dan pembangunan lanjutan yang selesai pada Tahun 2023. Berikut pelaksanaan pembangunan rumah susun berdasarkan target Tahun 2023:

Tabel 3. 16 Realisasi Pembangunan Rusun terhadap Target Tahun 2023

NO	KLASIFIKASI	PEMBANGUNAN TA. 2023 (Unit)	PERHITUNGAN OUTPUT TA. 2023 (UNIT)	
			TARGET	REALISASI
1	SYC 2023	1.175	1.175	1.248
2	Lanjutan MYC 2022-2023	2.411	2.411	2.404
3	Rusun HPK IKN	1.072	1.072	1.072
4	MYC 2023-2024 (termasuk Rusun ASN Hankam IKN)	2.669	*	*
TOTAL		7.327	4.658	4.724

Kolaborasi dan sinergi turut dilakukan antara Dit. PPP dengan Dit. Rusun misalkan dalam hal penyiapan dan transaksi proyek KPBU Perumahan, pembahasan teknis pelaksanaan pembangunan rumah susun, dan kerja sama dalam rangka mengembangkan kebijakan dan pembiayaan rumah bagi MBR.

Dit. PPP pada Tahun 2023 berhasil melakukan 2 (dua) capaian kinerja pada paket pembiayaan KPBU siap dikerjasamakan yaitu Rusun Hankam WP IA dan Rusun North Government WP IA di IKN dengan estimasi nilai investasi Rp.16.660.000.000. Selain itu capaian kinerja pada bantuan pembiayaan perumahan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Realisasi Capaian Kinerja Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Kesimpulan dari *Benchmarking* ini Dit. Rusun lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan penyediaan tempat tinggal vertikal dengan pembiayaan berasal dari APBN. Keberhasilan kinerja lebih terukur melalui jumlah unit yang dibangun dan kualitas pengelolaan hunian. Sedangkan Dit. PPP fokus pada penyediaan akses pembiayaan untuk masyarakat (utamanya MBR) dalam rangka kepemilikan rumah. Keberhasilan kinerja diukur dari besarnya pembiayaan yang tersalurkan, jumlah proyek KPBU perumahan yang siap dikerjasamakan, dan jumlah penyaluran program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR.

Dit. PPP dan Dit. Rusun memiliki peran yang sangat penting dalam sektor perumahan di Indonesia dan sering saling mendukung untuk memastikan tercapainya tujuan Pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR.

3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target yang direncanakan pada awal tahun dengan realisasi. Berdasarkan Struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024, Alokasi Pagu Tahun 2024 sebesar Rp35.840.354.000,00. Status per tanggal 31 Desember 2024, kinerja anggaran adalah sebesar 96,63% atau sejumlah Rp34.633.296.000,00 dan kinerja fisik sebesar 99,99%.



Grafik 3. 3 Perbandingan Realisasi Anggaran Bulanan TA 2024

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fisik
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%
033.16.IA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.090.354	24.032.934	95,79%	100,00%
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	25.090.354	24.032.934	95,79%	100,00%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5.789.642	5.581.536	96,41%	100,00%
4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.789.642	5.581.536	96,41%	100,00%
051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2.500.000	2.392.383	95,70%	100,00%
051.A	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	1.500.000	1.423.851	94,92%	100,00%
051.B	Pengembangan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	1.000.000	968.532	96,85%	100,00%
052	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama	1.512.000	1.482.656	98,06%	100,00%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fisik
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%
	Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan				
052.A	Penyiapan Kerja Sama Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.000.000	970.658	97,07%	100,00%
052.B	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	512.000	511.999	100,00%	100,00%
053	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.777.642	1.706.497	96,00%	100,00%
053.A	Koordinasi Pelaksanaan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.499.800	1.428.655	95,26%	100,00%
053.B	Tindak Lanjut Hasil Reviu Perhitungan Cost of Fund atas dana Talangan FLPP Tahun 2019	277.842	277.842	100,00%	100,00%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%
4976.AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%
051	Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%
051.A	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%
4976.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%
051.A	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	240.000	221.728	92,39%	100,00%
051.B	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	240.000	221.233	92,18%	100,00%
051.C	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	240.000	213.443	88,93%	100,00%
051.D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	1.879.351	1.873.869	99,71%	100,00%
051.E	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	1.843.007	1.834.965	99,56%	100,00%
051.F	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	1.858.354	1.839.923	99,01%	100,00%
PEA	Koordinasi	5.000.000	4.758.315	95,17%	100,00%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fisik
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%
4976.PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.000	2.800.977	93,37%	100,00%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.000	2.800.977	93,37%	100,00%
051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan	1.500.000	1.301.320	86,75%	100,00%
051.B	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.500.000	1.499.657	99,98%	100,00%
4976.PEA.002	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%
005.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP)	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	7.000.000	6.529.863	93,28%	100,00%
4976.QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%
4976.QAH.002	Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%
033.WA	Program Dukungan Manajemen	10.750.000	10.600.362	98,61%	99,97%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%
EBA	Layanan Perkantoran	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%
4194.EBA.994	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%
002	Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%
002.P	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	9.750.000	9.600.773	98,47%	99,97%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4.540.000	4.413.621	97,22%	100,00%
4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fisik
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%
051	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%
051.A	Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%
4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%
052	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%
052.A	Fasilitasi Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Perumahan PJPK Pemerintah Daerah	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%
4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.540.000	1.539.455	99,96%	100,00%
051	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.540.000	1.539.455	99,96%	100,00%
051.A	Pengusahaan Dukungan Pemerintahan terhadap KPBU Perumahan	900.000	899.796	99,98%	100,00%
051.B	Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	640.000	639.659	99,95%	100,00%
AEE	Kemitraan	3.950.000	3.949.735	99,99%	100,00%
4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	3.950.000	3.949.735	99,99%	100,00%
051	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2.950.000	2.949.739	99,99%	100,00%
051.A	Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan PJPK Pemerintah Pusat	1.500.000	1.499.741	99,98%	100,00%
051.B	Pendampingan Transaksi KPBU Perumahan PJPK Pemerintah Daerah	1.450.000	1.449.998	100,00%	100,00%
052	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	1.000.000	999.996	100,00%	100,00%
052.A	Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBU Perumahan PJPK Gabungan	500.000	499.999	100,00%	100,00%
052.B	Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan Karawang Spuor	500.000	499.997	100,00%	100,00%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	450.000	431.082	95,80%	100,00%
4197.AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%
051	Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%
051.A	Penyusunan NSPK KPBU Bidang Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	810.000	806.335	99,55%	99,67%
4197.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	810.000	806.335	99,55%	99,67%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)	
				Keu.	Fisik
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%
057	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	810.000	806.335	99,55%	99,67%
057.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	240.000	239.999	100,00%	100,00%
057.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	240.000	239.999	100,00%	100,00%
057.C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	240.000	239.862	99,94%	100,00%
057.D	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	90.000	86.475	96,08%	97,00%
TOTAL		35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%

3.4.1 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TA 2024 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (TA 2023)

Berdasarkan Struktur Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun Anggaran 2024, alokasi Pagu Tahun 2024 sebesar Rp40.732.000.000,00. Pagu Anggaran mengalami 5 (lima) kali perubahan sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terakhir menjadi Rp35.840.354.000,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 Dit. PPP status 31 Desember 2024 sebesar 96,63% atau sejumlah Rp34.633.296.000,00 dan kinerja fisik sebesar 99,99%.

Alokasi Pagu Tahun 2023 sebesar Rp41.909.390.000. Pada tanggal 22 Desember 2023 terdapat penambahan Pagu Anggaran pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp55.972.000.000 sehingga pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan termasuk BBA menjadi sebesar Rp97.881.390.000

Realisasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan *Integrated e-Monitoring* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat status 31 Desember 2023 sebesar 91,04% atau sejumlah Rp89.109.376.147 dan kinerja fisik sebesar 92,28%..

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023

TAHUN 2024				TAHUN 2023			
Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)		Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
		Keu.	Fisik			Keu.	Fisik
35.840.354.000	34.633.296.000	96,63%	99,99%	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%

Secara keseluruhan terjadinya peningkatan kemampuan realisasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, dikarenakan Dit.PPP melakukan perbaikan dalam perencanaan program dan anggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Anggaran yang terealisasi dengan baik mendukung pencapaian target dan tujuan dari program dan kegiatan yang telah direncanakan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai dengan rencana.

Berikut Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2023:

Tabel 3. 20 Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2023

Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
			Keu.	Fisik
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%
Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%
Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033.000	78.100.734.147	91,66%	91,93%
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%
Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	7.822.000.000	7.519.727.000	96,14%	96,70%
Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	3.800.000.000	3.723.996.000	98,00%	98,64%
Kajian Pembiayaan Perolehan Sarusunami Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1.364.280.000	1.323.978.000	97,05%	98,00%
Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR	2.435.720.000	2.400.018.000	98,53%	99,00%
Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2.172.000.000	2.008.816.000	92,49%	93,06%
Penyiapan Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	1.200.000.000	1.154.117.000	96,18%	97,00%
Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	956.097.000	838.796.000	87,73%	88,00%
Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Dit. PPP	15.903.000	15.903.000	100,00%	100,00%
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan	1.850.000.000	1.786.915.000	96,59%	97,00%
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%
NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%
Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	2.190.000.000	2.036.281.000	92,98%	93,75%
Pengembangan Skema dan Mekanisme Pembiayaan Perolehan Sarusun Dengan Sewa Beli	1.000.000.000	970.807.000	97,08%	98,00%
Penyusunan Tata Laksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM	500.000.000	386.400.000	77,28%	78,00%
Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	690.000.000	679.074.000	98,42%	99,00%
Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%
Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%
Bantuan Biaya Administrasi	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%
Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA)	55.972.000.000	52.513.355.147	93,82%	94,00%
Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	6.720.000.000	5.278.650.000	78,55%	79%
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I	253.648.000	239.134.000	94,28%	95,00%

Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
			Keu.	Fisik
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	240.000.000	237.334.000	98,89%	99,00%
Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	226.352.000	122.062.000	53,93%	54,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	2.000.000.000	1.556.052.000	77,80%	78,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	2.000.000.000	1.543.661.000	77,18%	78,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	2.000.000.000	1.580.407.000	79,02%	80,00%
Koordinasi	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%
Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%
Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%
Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tabungan Perumahan Rakyat	3.000.033.000	2.963.689.000	98,79%	99,00%
Pelayanan Publik Lainnya	9.500.000.000	7.789.032.000	81,99%	82,34%
Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%
Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%
Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	4.500.000.000	4.404.011.000	97,87%	98,00%
Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan	5.000.000.000	3.385.021.000	67,70%	68,24%
Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan PHLN	2.477.345.000	2.397.734.000	96,79%	97,00%
Dana Operasional untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Biaya Administrasi	2.522.655.000	987.287.000	39,14%	40,00%
Program Dukungan Manajemen	12.677.357.000	11.008.642.000	86,84%	94,62%
Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%
Layanan Perkantoran	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%
Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%
Pelaksanaan Operasional Pekantoran Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000.000	997.239.000	99,72%	100,00%
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11.677.357.000	10.011.403.000	85,73%	94,16%
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5.217.357.000	5.148.575.000	98,68%	99,09%
Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%
Penyusunan Program dan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1.000.000.000	960.244.000	96,02%	97,00%

Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (x Rp 1,00)	Realisasi (x Rp 1,00)	Progres (%)	
			Keu.	Fisik
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390.000	89.109.376.147	91,04%	92,28%
Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%
Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%
Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Rusun Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	2.467.357.000	2.464.604.000	99,89%	100,00%
Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%
Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.750.000.000	1.723.727.000	98,50%	99,00%
Pengusahaan Dukungan Pemerintahan terhadap KPBU Perumahan	1.000.000.000	981.908.000	98,19%	99,00%
Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	750.000.000	741.819.000	98,91%	99,00%
Kemitraan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%
Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	5.000.000.000	3.714.016.000	74,28%	93,40%
Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%
Pelaksanaan Dukungan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.816.193.000	90,81%	91,00%
Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	3.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%
Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	2.000.000.000	1.897.823.000	94,89%	95,00%
Pendampingan Pelaksanaan Transaksi KPBU Perumahan	1.000.000.000	913.563.000	91,36%	92,00%
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%
NSPK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%
Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%
Penyusunan NSPK KPBU Bidang Perumahan	500.000.000	454.099.000	90,82%	91,00%
Layanan Manajemen Kinerja Internal	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	960.000.000	694.713.000	72,37%	73,00%
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	183.420.000	76,43%	77,00%
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	195.972.000	81,66%	82,00%
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBU Sektor Perumahan	240.000.000	168.302.000	70,13%	71,00%
Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	240.000.000	147.019.000	61,26%	62,00%

3.4.2 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan terdiri dari BA.033 untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan dan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan dengan Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 dan BA.999.07 untuk Pengelolaan Subsidi Perumahan dengan Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2024.

BA.033

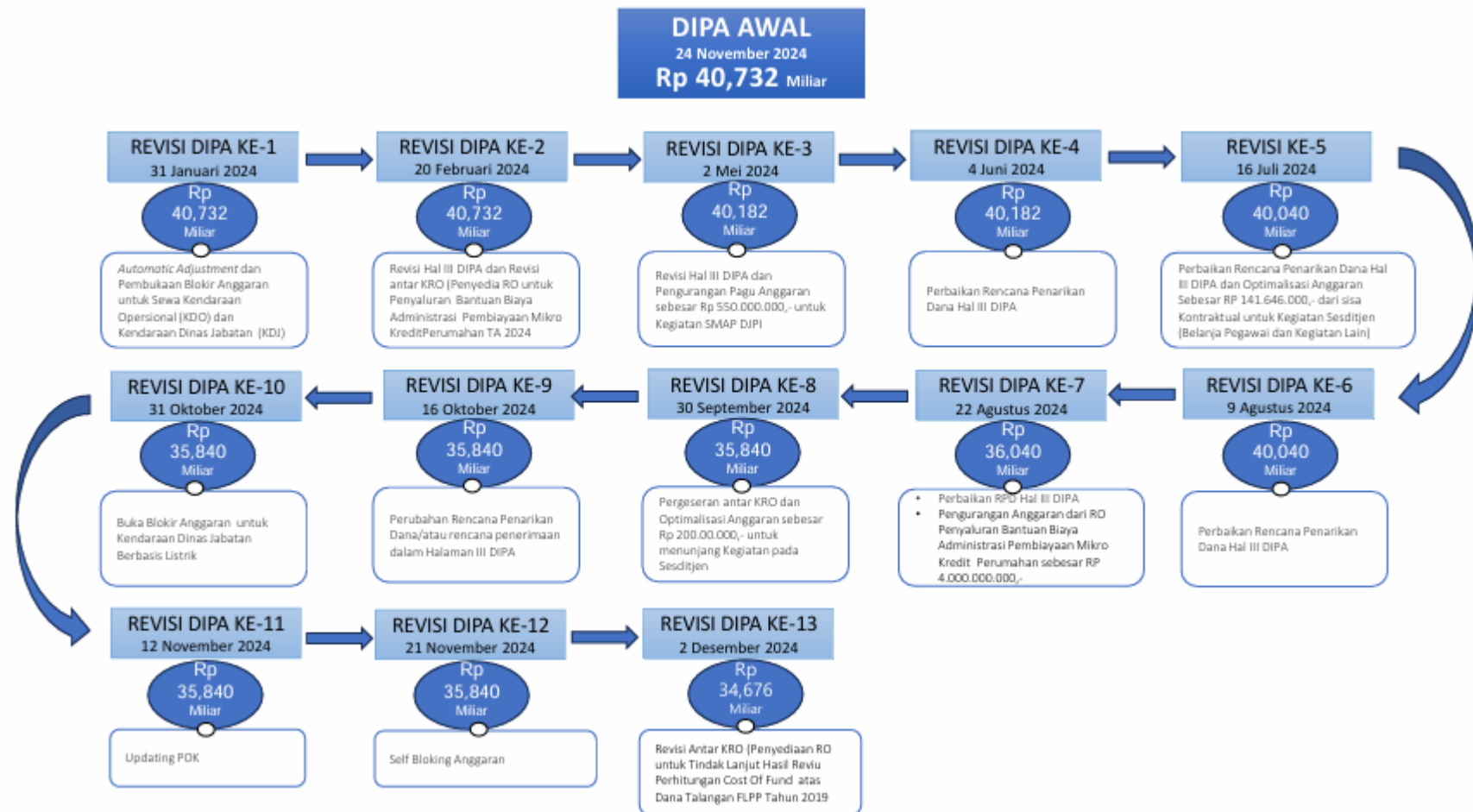
Penerbitan DIPA Nomor SP DIPA-033.16.1.631003/2024 pertama pada tanggal 24 November 2023 dengan pagu anggaran sebanyak Rp 40.732.000.000. DIPA kemudian mengalami 13 (Tiga belas) kali revisi:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Revisi ke 01: 31 Januari 2024 | 8. Revisi ke 08: 30 September 2024 |
| 2. Revisi ke 02: 20 Februari 2024 | 9. Revisi ke 09: 16 Oktober 2024 |
| 3. Revisi ke 03: 02 Mei 2024 | 10. Revisi ke 10: 31 Oktober 2024 |
| 4. Revisi ke 04: 04 Juni 2024 | 11. Revisi ke 11: 12 November 2024 |
| 5. Revisi ke 05: 16 Juli 2024 | 12. Revisi ke 12: 21 November 2024 |
| 6. Revisi ke 06: 09 Agustus 2024 | 13. Revisi ke 13: 02 Desember 2024 |
| 7. Revisi ke 07: 22 Agustus 2024 | |

Untuk pagu anggaran mengalami 5 (lima) kali perubahan, dengan perubahan sebagai berikut:

1. DIPA Revisi ke 03 tanggal 2 Mei 2024, ada pengurangan pagu Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan untuk kegiatan SMAP sebesar Rp550.000.000. Sehingga jumlah pagu anggaran semula menjadi Rp40.182.000.000.
2. DIPA Revisi ke 05 tanggal 16 Juli 2024, Optimalisasi sisa anggaran di Kegiatan Kontraktual Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3 sebesar Rp141.646.000 untuk Kegiatan Seditjen. Sehingga jumlah pagu anggaran semula Rp40.182.000.000 menjadi Rp40.040.354.000.
3. DIPA Revisi ke 07 tanggal 22 Agustus 2024, penghapusan blokir di Kegiatan Penyaluran Pembiayaan Mikro Kredit Perumahan Bagi MBR sebesar Rp4.000.000.000.000 karena belum terdapat pedoman umum terkait pelaksanaan program Mikro Kredit sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan. Pagu anggaran semula Rp 40.040.354.000 menjadi Rp36.040.354.000.
4. DIPA Revisi ke 08 tanggal 30 September 2024, Optimalisasi anggaran sebesar Rp200.000.000 untuk menunjang Kegiatan pada Seditjen sehingga pagu anggaran semula Rp36.040.354.000 menjadi Rp35.840.354.000.
5. DIPA Revisi ke 13 tanggal 2 Desember 2024, Revisi Antar KRO sehingga Pagu Anggaran semula menjadi Rp34.676.645.133.

Terlampir proses Revisi DIPA Tahun 2024:



Grafik 3. 4 Proses Revisi DIPA Tahun 2024

BA999.07

DIPA Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2024 diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 dan mengalami satu kali Revisi pada tanggal 22 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran tetap. Adapun besaran pagu anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000 dan pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp4.609.438.646.000 yang dibayarkan kepada 751.735 unit. Namun di Revisi ke I, untuk target penyaluran pengelolaan SBUM menjadi 199.959 unit dan pembayaran SBK menjadi 732.927 unit.

Usulan Revisi DIPA Dit. PPP TA 2024

Dit. PPP telah mengusulkan revisi DIPA Tahun 2024 pada Tanggal 14 Oktober 2024 melalui Nota Dinas No.343/ND/Pp/2024 kepada Setditjen PI untuk menyelaraskan jumlah target pada Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan menjadi 2 (dua) Kesepakatan sesuai target berdasarkan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selain itu terdapat permasalahan isu proyek yang masih perlu diselesaikan dan memerlukan tambahan waktu untuk pimpinan dapat mengambil keputusan sehingga jumlah target proyek perlu disesuaikan.

Adapun tanggapan dari Setditjen PI terkait usulan DIPA sebagai berikut:

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

NOTA DINAS
 NOMOR: 343 / ND / Pp / 2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Dari : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
 Hal : Usulan Revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024
 Tanggal : 14 Oktober 2024

Sehubungan dengan rencana revisi DIPA ke-09 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Dit. PPP), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Diusulkan perubahan jumlah target DIPA pada Rincian Output (RO) AEE.004 Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2024:

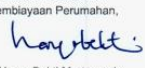
Semula	Menjadi
Sebanyak 4 (empat) kesepakatan: 1. Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung 2. Rusun Karawang Spuur 3. Rusun Perkotaan Surabaya 4. Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Sebanyak 2 (dua) kesepakatan: 1. Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung 2. Rusun Karawang Spuur

Sisa anggaran yang ada akan direalokasi ke RO ABF.015 Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan usulan nama paket kegiatan baru yaitu 052.B Penyediaan Skema Pra-akad Calon Penghuni pada Proyek KPBU Sektor Perumahan.

- Revisi jumlah target DIPA perlu dilakukan karena terdapat isu proyek yang masih dalam proses penyelesaian sehingga proyek tidak dapat diselesaikan sesuai *timeline* yang telah ditetapkan dan berpotensi akan melewati periode Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang diperlukan dalam revisi DIPA Dit. PPP TA 2024 (Matriks Semula-Menjadi, KAK dan RAB) sebagaimana terlampir, kiranya Ibu Setditjen PI dapat memfasilitasi dan memproses lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan,

R. Haryo Bekti Martoyoedo
 NIP. 19700820 199703 1 002

Tembusan:
 1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; dan
 3. Kuasa Pengguna Anggaran/Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

NOTA DINAS
 NOMOR: 339.1/ND/Ps/2024

Yth. : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
 Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 Hal : Tindak Lanjut Usulan Revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024
 Tanggal : 22 Oktober 2024

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Nomor 343/ND/Pp/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Usulan Revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Telah terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara ("Perpres 140/2024"), pada Pasal 2 Bab II Perpres 140/2024 disampaikan bahwa terdapat perubahan semula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ("Perpres 139/2024"), pada Pasal 14 Bab II Perpres 139/2024 disampaikan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman akan memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- Berdasarkan nomor 1 dan 2 di atas, maka menurut hemat kami usulan revisi DIPA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ("Dit. PPP") pada Rincian Output (RO) AEE 004 Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan Tahun 2024 sebaiknya ditunda dahulu, karena dalam usulan revisi DIPA tersebut akan mengubah target output dari Dit. PPP. Sehingga akan lebih baik apabila revisi DIPA tersebut dilakukan apabila proses transisi reorganisasi telah selesai;
- Oleh karena itu, proses revisi DIPA Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke 10 direncanakan akan dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024 dalam rangka pembukaan blokir untuk pembayaran Kenderaan Dinas Jabatan (KDJ) Eselon I Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan,

Beni Ahjantini
 NIP. 199510181996032002

Tembusan:
 1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; dan
 3. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Gambar 3. 2 Tangkapan Layar Surat Permohonan Revisi Usulan DIPA Dit. PPP TA 2024 dan Surat Tanggapan Setditjen PI terhadap Tindak Lanjut Usulan Revisi DIPA Dit. PPP TA 2024

Berdasarkan tanggapan Nota dinas Setditjen PI No. 339.1/ND/Ps/2024 tanggal 22 Oktober 2024 terkait tindak lanjut usulan revisi DIPA, untuk Revisi DIPA Dit. PPP sebaiknya ditunda dahulu, "lebih baik revisi DIPA dilakukan setelah proses transisi reorganisasi selesai".

3.5 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan terhadap pagu anggaran Tahun 2024. Upaya pelaksanaan efektivitas dan efisiensi anggaran adalah dengan melakukan beberapa kegiatan koordinasi, rapat, dan FGD secara *daring* serta pelaksanaan koordinasi yang harus dilakukan secara parsial dilakukan secara paralel seperti:

1. Pelaksanaan kegiatan pemantauan penerapan inovasi pengendalian manajemen risiko dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan penyelesaian isu proyek terkait.
2. Pelaksanaan tambahan dukungan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran *eksisting* sebagai contoh melakukan sertifikasi SMAP Dit. PPP di Tahun 2024.

Selain itu efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan juga dilakukan pada paket kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Telah dilakukan *refocusing* anggaran dari pagu awal Rp240.000.000 menjadi Rp90.000.000. Pelaksanaan kegiatan ini tetap berjalan dan *Output* tetap dapat terselesaikan. Pelaksanaan koordinasi dan pembahasan kegiatan dilakukan secara *daring* dan secara *luring* di ruang rapat yang ada di lingkungan Kementerian PUPR.

3.6 ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja sangat penting untuk memberikan gambaran akurat tentang pencapaian dan efektivitas program. Dengan analisis data yang tepat, pimpinan dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi hambatan, serta merencanakan langkah perbaikan yang lebih efisien. Informasi yang terkandung dalam laporan kinerja juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat komunikasi dengan *stakeholders*.

3.6.1 ANALISIS PERHATIAN UTAMA PIMPINAN TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Pimpinan Dit. PPP memiliki perhatian khusus dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja. Keterlibatan pimpinan dalam rangka Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2024 menjadi salah satu bukti perhatian pimpinan pada Laporan Kinerja TA 2024.



Gambar 3. 3 Keterlibatan pimpinan dalam rangka Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024

3.6.2 ANALISIS KEPEDULIAN SELURUH PEGAWAI TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Seluruh pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sangat peduli terhadap informasi dalam Laporan Kinerja, karena menyadari pentingnya data yang akurat untuk evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai berkomitmen untuk berkontribusi memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu, karena mereka tahu bahwa laporan ini merupakan alat utama bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kepedulian ini mencerminkan budaya kerja yang transparan dan akuntabel, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya laporan kinerja, pegawai Dit. PPP turut berkontribusi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit.

3.6.3 ANALISIS PENYESUAIAN AKTIVITAS UNTUK MENCAPAI KINERJA TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA BERKALA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala (mingguan, bulanan, dan triwulanan) yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Berkala. Pemantauan dan evaluasi mingguan dilakukan untuk me-monitoring kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mingguan disajikan dalam bentuk Laporan Mingguan Direktorat yang disampaikan kepada Pimpinan.

Pemantauan dan evaluasi bulanan dilakukan untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, capaian IKK bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan. Pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan dalam bentuk Laporan Monev Bulanan yang hasilnya disampaikan ke Pimpinan dan di-*upload* pada aplikasi *e-sakip* (https://iemon.pu.go.id/sakip_dashboard.php).

Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara Triwulanan untuk dapat mengukur kinerja anggaran dan penyaluran program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan serta prognosinya hingga akhir tahun anggaran, mengetahui secara keseluruhan kendala dan isu permasalahan yang dihadapi oleh masing – masing subdirektorat dan mitra kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, serta menyusun strategi dan percepatan terhadap isu dan kendala yang dihadapi.

3.6.4 ANALISIS PENYESUAIAN PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENCAPAI KINERJA TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA BERKALA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah menggunakan Laporan Kinerja sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran guna mencapai kinerja tahunan yang optimal. Melalui Laporan Kinerja yang komprehensif, Dit. PPP dapat mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Jika terdapat kendala atau kekurangan dalam pencapaian target, informasi dari Laporan Kinerja memungkinkan pimpinan untuk melakukan penyesuaian anggaran, mengalihkan sumber daya ke area yang lebih membutuhkan, atau memperbaiki strategi pelaksanaan. Dengan cara ini, Dit. PPP memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai kinerja tahunan yang diinginkan.

3.6.5 ANALISIS PENCAPAIAN KEBERHASILAN KINERJA BERDASARKAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah secara efektif menggunakan Laporan Kinerja untuk mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja tahunan. Laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan di awal tahun. Dengan data yang terkandung dalam laporan, Dit. PPP dapat menilai tingkat efisiensi dan efektivitas program serta kegiatan yang dilaksanakan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan merencanakan strategi untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya. Pemanfaatan Laporan Kinerja ini menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil yang terukur, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian tujuan organisasi.

3.6.6 ANALISIS PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA BERDASARKAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan telah memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai dasar perencanaan untuk menghadapi kinerja tahun berikutnya. Melalui analisis mendalam terhadap hasil yang tercapai, tantangan yang dihadapi, dan pemanfaatan sumber daya, Dit. PPP dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan menyusun strategi yang lebih efektif. Laporan Kinerja memberikan informasi yang berguna untuk merumuskan tujuan yang lebih realistis dan terukur, serta menentukan prioritas yang lebih tepat. Dengan menggunakan data dan evaluasi dari Laporan Kinerja periode sebelumnya, Dit. PPP dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efisien, memastikan pencapaian target yang lebih optimal di tahun berikutnya.

3.6.7 ANALISIS PERUBAHAN BUDAYA KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Pemanfaatan informasi dalam Laporan Kinerja dapat menjadi acuan penting untuk perubahan budaya kinerja pada Dit. PPP. Dengan menganalisis data yang ada, pimpinan dan pegawai Dit. PPP dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap kinerja yang ada dan fokus pada ketepatan capaian kinerja menjadi perhatian penting di lingkungan kerja Dit. PPP.

3.7 PENGHARGAAN DAN INOVASI ATAS KINERJA

SERTIFIKASI SMAP

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun 2024 telah memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Nomor 3624039 tanggal 28 November 2024.



Gambar 3. 4 Sertifikat SMAP, 28 November 2024

Perolehan sertifikat SMAP sebagai bagian dari upaya Dit. PPP untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sertifikat SMAP ini menjadi bukti bahwa Dit. PPP telah memenuhi standar dan prosedur yang ditetapkan dalam rangka mencegah tindak penyuapan di lingkungan kerjanya.

Proses sertifikasi melibatkan penerapan prosedur operasional yang ketat dan sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk pengawasan terhadap tindakan yang mencurigakan, melakukan sosialisasi anti gratifikasi, dan menyediakan layanan *coaching clinic* secara internal.

Secara keseluruhan, sertifikat SMAP bagi Dit. PPP tidak hanya meningkatkan kredibilitas unit kerja, tetapi juga memberikan jaminan bagi publik bahwa sektor pembiayaan perumahan beroperasi dengan integritas yang tinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

PIAGAM UNIT KERJA TERBAIK PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DJPI

Berdasarkan Nota dinas Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan No.73/ND/Pk/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal penyampaian piagam unit kerja terbaik atas efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan DJPI TA 2023, disampaikan bahwa Dit. PPP menjadi salah satu unit kerja yang meraih penghargaan unit kerja terbaik dalam penerapan manajemen risiko dengan peringkat terbaik ketiga, dengan nilai 82,38 atau level 4/*Managed*.



Gambar 3. 5 Penghargaan Dit. PPP dalam Penerapan Manajemen Risiko UPR T-2 Tahun 2023

Penghargaan yang diraih ini sebagai bukti bahwa Pimpinan beserta para pegawai Dit. PPP menaruh perhatian besar akan budaya manajemen risiko di lingkungan kerja. Ke depan Dit. PPP berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini dengan harapan dapat menjadi unit kerja terbaik kembali dalam penerapan manajemen risiko di periode berikutnya.

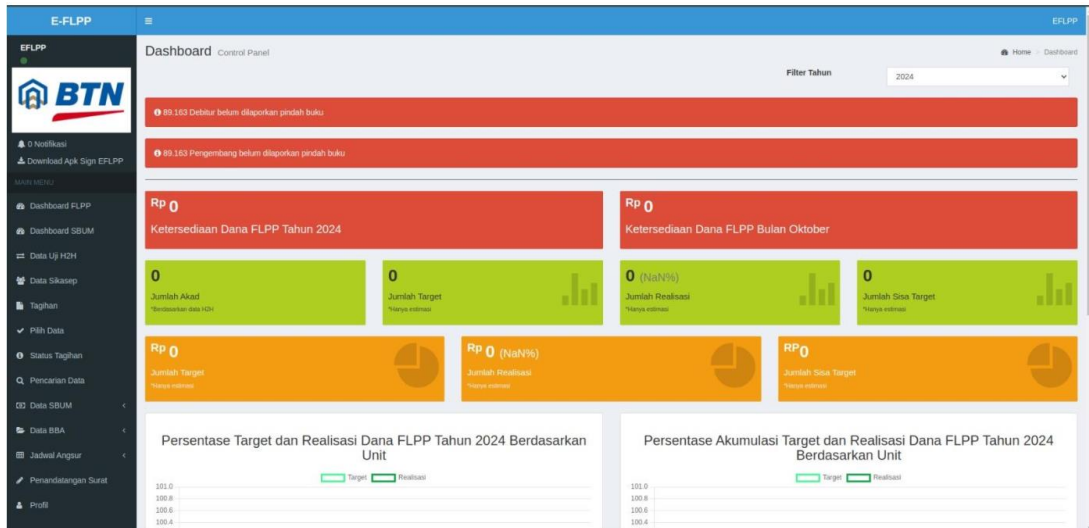
PENGEMBANGAN FITUR *EARLY WARNING SISTEM* UNTUK PERCEPTAN PENCAIRAN DANA SBUM.

Salah satu Inovasi yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah pengembangan Fitur *Early Warning Sistem* (EWS). Pengembangan fitur ini dalam rangka percepatan pencairan dana SBUM melalui integrasi sistem *e-flpp* 2.0. EWS dapat mengurangi waktu keterlambatan pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL di Bank Pelaksana ke rekening debitur (masyarakat).

Fitur EWS telah ditambahkan pada sistem *e-flpp*. Notifikasi perintah laporan pemindahbukuan dana SBUM muncul dalam *Dashboard* Bank Pelaksana setelah 3 hari kerja setelah tanggal SP2D/SI dan Bank Pelaksana wajib melaporkan status proses pemindahbukuan dana SBUM di dalam sistem *e-flpp* 2.0.

Sistem ini dapat memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini terkait hambatan dalam proses pencairan, sehingga program SBUM dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat waktu. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan debitur, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan program pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi MBR.

Pelaksanaan integrasi sistem melibatkan mitra kerja Dit. PPP yaitu BP Tapera. Fitur EWS mendapat perhatian khusus dari pimpinan Dit. PPP, hingga dimasukkan ke dalam inovasi pengendalian pada Profil Risiko UPRT-2 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2024.

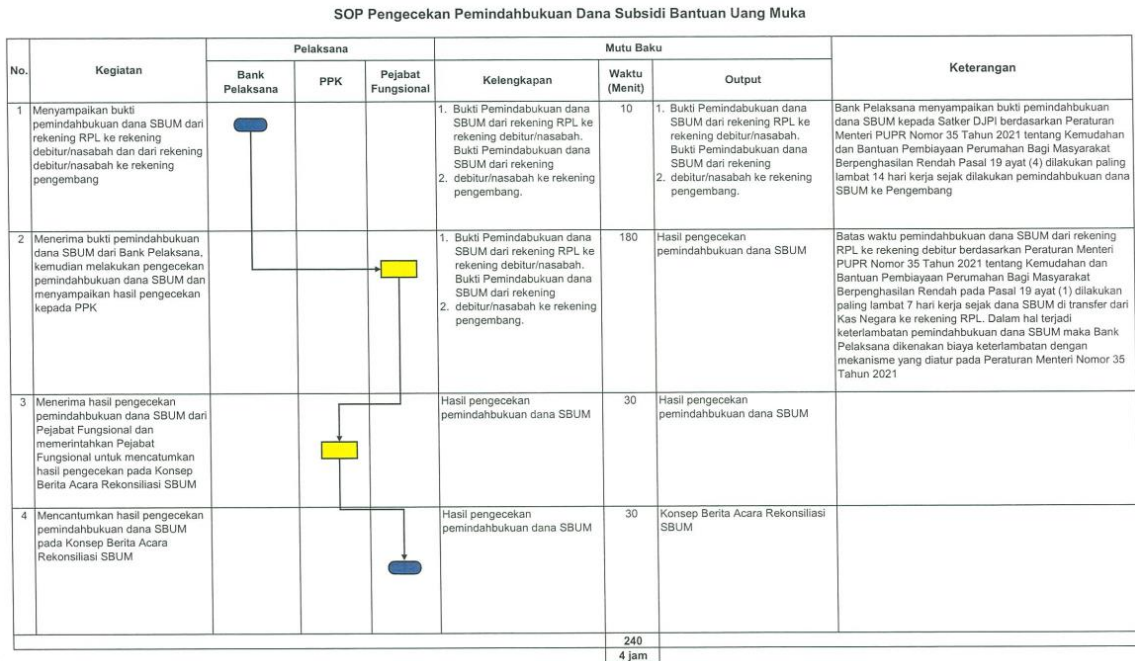


Gambar 3. 6 Tangkapan Layar E-FLPP 2.0

Selain melakukan inovasi pada integrasi sistem, Dit. PPP juga telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengecekan pemindahbukuan dana SBUM kepada Bank Pelaksana, sehingga dapat menurunkan jumlah ke terjadinya keterlambatan.

Batas waktu pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak dana SBUM di transfer dari Kas Negara ke rekening RPL. Apabila terjadi keterlambatan, maka Bank Pelaksana dikenakan biaya keterlambatan dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Menteri PUPR No.35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR.

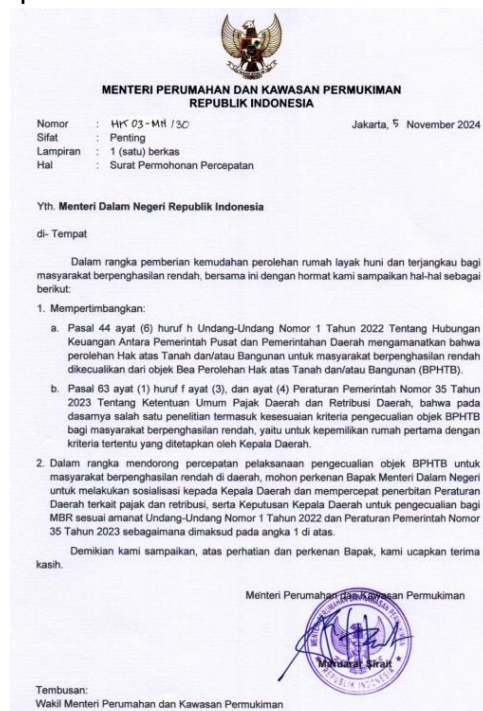
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	NOMOR SOP	04.0202/Satres-0391/1
	TANGGAL PEMBUATAN	24 Juni 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2024
	DISAHKAN OLEH	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  R. Haryo Bakti Marlowepodo NIP.197008201997031002
	NAMA SOP	PENGECEKAN PEMINDAHBUKUAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK/05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK/05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/IM/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		1. Memahami Kebijakan dan Regulasi terkait dengan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 3. Memahami Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 4. Mampu mengecek pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur dan dari rekening debitur ke rekening pengembang
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (SBUM-KPR Sejahtera/FLPP) 2. SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Dengan Bank Pelaksana 3. SOP Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Berbasis Elektronik		1. Laporan bukti pemindahbukuan dana SBUM 2. Laporan Realisasi Penyaluran SBUM Berdasarkan SP2D 3. Jaringan Internet 4. Komputer/Printer/Scanner
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat terjadi ketidakpahaman staf dalam melakukan pengecekan pemindahbukuan dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		Dokumentasi bukti pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur dan dari rekening debitur ke rekening pengembang



Gambar 3. 7 SOP Pengecekan Pemindahbukuan Dana SBUM

SKB DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH

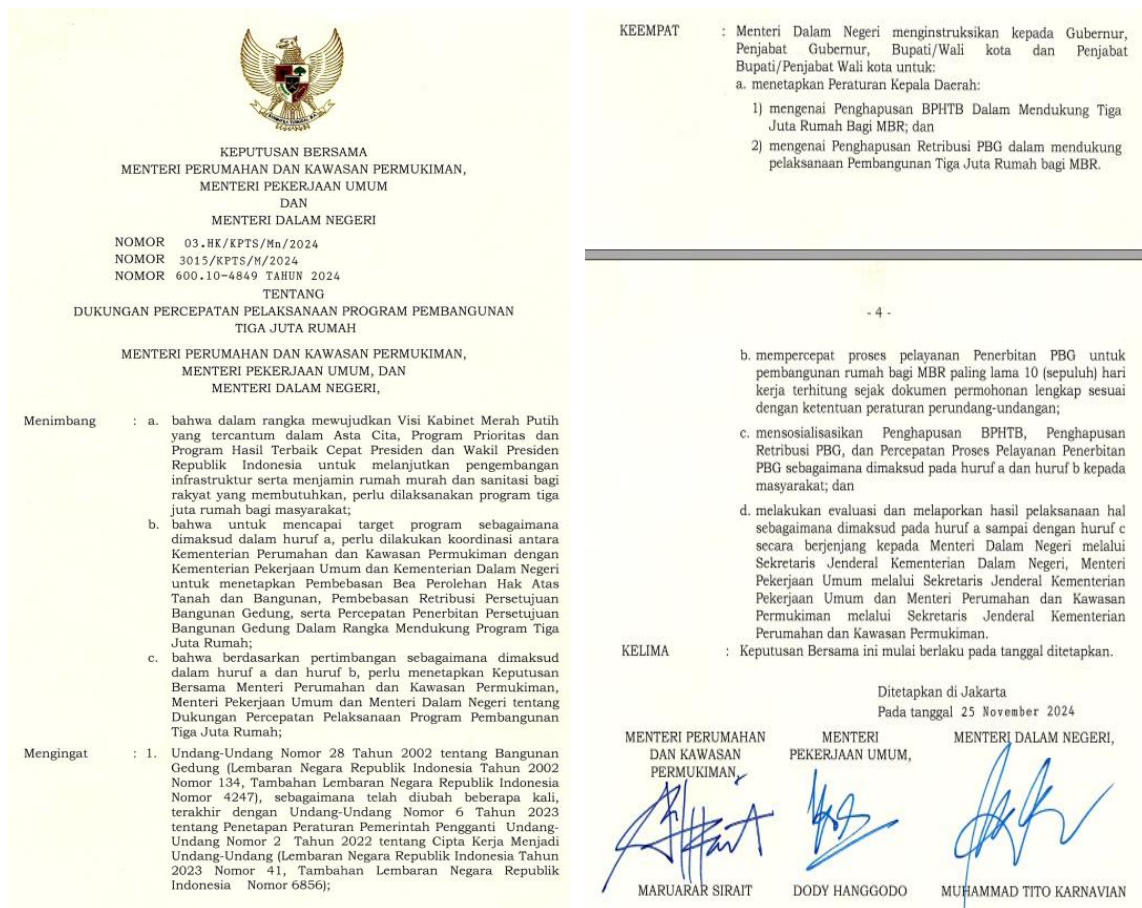
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan turut mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Adapun Keterlibatan Dit. PPP dengan melakukan pengusulan permohonan percepatan ke Menteri Dalam Negeri RI untuk mendorong percepatan pelaksanaan pengecualian Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan BPHTB untuk MBR di daerah. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR adalah untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.



Gambar 3. 8 Tangkapan Layar, Surat Permohonan Percepatan ke Kementerian Dalam Negeri

Selanjutnya usulan ini dituangkan dalam Keputusan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/20204,

Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta rumah yaitu “Mengenai Penghapusan BPHTB dalam Mendukung Rumah bagi MBR”.



Gambar 3. 97 Tangkapan Layar, Keputusan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri

3.8 PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala (mingguan, bulanan, dan triwulanan). Pemantauan dan evaluasi mingguan dilakukan untuk *me-monitoring* kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mingguan disajikan dalam bentuk Laporan Mingguan Direktorat yang disampaikan kepada Pimpinan.

Pemantauan dan evaluasi bulanan dilakukan untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, capaian IKK bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan. Pelaksanaan kegiatan ini akan disajikan dalam bentuk Laporan Monev Bulanan yang hasilnya disampaikan ke Pimpinan dan di *upload* pada aplikasi *e-sakip* (https://iemon.pu.go.id/sakip_dashboard.php).

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja dilakukan secara triwulanan untuk dapat mengukur kinerja anggaran dan penyaluran program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan serta prognosinya hingga akhir tahun anggaran, mengetahui secara keseluruhan kendala dan isu permasalahan yang dihadapi

oleh masing – masing subdirektorat dan mitra kerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, serta menyusun strategi dan percepatan terhadap isu dan kendala yang dihadapi.

Berikut sekilas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2024:

Tabel 3. 21 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pembahasan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2023	25 Maret 2024
2	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q1 TA 2024 dan Penyiapan Strategi Pelaksanaan Target Q2 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	23 April 2024
3	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q2 TA 2024 dan Penyiapan Strategi Pelaksanaan Target Q3 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	9 Agustus 2024
4	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q3 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	5 November 2024
5	Penyiapan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	2 Desember 2023
6	Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	20 Desember 2024

Selain pembahasan evaluasi capaian kinerja secara berkala yang dilakukan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan juga melakukan pembahasan atas rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator AKIP Tahun Anggaran 2023 sebagai upaya untuk melakukan perbaikan.

3.9 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi LAKIN 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
I	Penyelesaian Isu dan Pelaksanaan Tahap Transaksi Proyek KPBU Bidang Perumahan sesuai rencana target yang telah ditetapkan.	Terealisasi 1 (satu) proyek yaitu KPBU Rusun Karawang Spuur dari 2 (dua) target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada Tahun 2024. Adapun kendala isu yang belum dapat diselesaikan di Tahun 2024 karena adanya reorganisasi Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP, sehingga memerlukan kepastian keberlanjutan proyek KPBU terkait peralihan PJPk dan kepastian kapasitas Fiskal PJPk.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi berdasarkan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan Tahap Perencanaan, Tahap Penyiapan, dan Tahap Transaksi berdasarkan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan dilakukan rutin dan secara berkala (Triwulanan) di Tahun 2024.
3	<i>Financial Close</i> Berjalan Paralel dengan Proses Konstruksi.	Proyek KPBU Bidang Perumahan saat ini masih pada tahap persiapan lelang, sehingga pelaksanaan <i>Financial Close</i> dengan proses konstruksi belum dilakukan pada Tahun 2024.
4	Pengusulan PSN dan Major Project Proyek KPBU Perumahan pada RPJMN Periode 2025-2029.	Pengusulan PSN pada Tahun 2024 ditunda sementara karena terdapat masa transisi reorganisasi pemerintahan (Perubahan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP), sehingga diperlukan kepastian peralihan PJPk, dan kepastian kapasitas fiskal PJPk dalam pelaksanaan KPBU Perumahan. Adapun usulan <i>Major Project</i> Proyek KPBU Perumahan pada RPJMN Periode Tahun 2025-2029 yaitu 5 proyek KPBU Perumahan yang terdiri dari Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung, Rusun Karawang Spuur, Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus), Rusun Perkotaan Surabaya (Tambak Wedi), dan Rusun Perkotaan Surabaya Tahap 2.
5	Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Optimalisasi FLPP dengan Model Pengelolaan Dana Investasi.	Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BP Tapera, dan PT SMF terkait optimalisasi FLPP model pengelolaan dana investasi. Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait aspek legalitas, kelembagaan, akuntansi, penganggaran, risiko, dan manfaat pengelolaan dana investasi perumahan.
6	Pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Skema Pembiayaan untuk masyarakat Informal bersama Koalisi Perumahan Gotong Royong.	Telah dilakukan pembahasan dengan koalisi gotong royong, Kementerian Koperasi dan UKM, BP Tapera, PT SMF, Baznas, Kementerian ATR/BPN, Perumnas, Bank BTN, Kementerian Keuangan terkait skema pembiayaan masyarakat informal. Saat ini disiapkan 3 (tiga) tenaga ahli untuk menyiapkan mekanisme penyaluran pembiayaan perumahan melalui Koperasi Perumahan.
7	Pelaksanaan skema KPR ASN PUPR Pelopor di IKN.	Telah disampaikan Surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan No. Ru 0301-Mn/I98 tanggal 25 Maret 2024 Hal Permohonan Persetujuan Kebutuhan Dana Perumahan KPR Hunian ASN PUPR Pelopor di IKN.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Telah dilakukan pembahasan dengan DJKN dan DJA pada 15 Mei 2024, pengalokasian APBN untuk hunian ASN PUPR dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan dan menyebabkan kesenjangan dengan K/L lain yang anggarannya lebih rendah dari PUPR.
8	Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi TA 2024.	Penyaluran BBA pada TA 2024 tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2024 tanggal 18 Mei 2024 bahwa, program FLPP dengan SBUM sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Maka dengan demikian anggaran BBA untuk tahun 2024 tidak dialokasikan lagi Atas tanggapan Kementerian Keuangan tersebut, telah disampaikan surat permintaan reviu Program BBA dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PW 0105-DP/296 tanggal 25 November 2024.
9	Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan bersama dengan BP Tapera dan Bank Pelaksana melakukan optimalisasi fitur integrasi antara FLPP dan SBUM (<i>e-flpp</i> 2.0), dalam mengurangi GAP waktu penyaluran dan jumlah unit antara FLPP dan SBUM.	Pelaksanaan pembahasan Pengembangan Sistem Informasi <i>Early Warning System</i> (EWS) Pemindahbukuan Dana SBUM Pada Aplikasi <i>e-flpp</i> pada 9 Oktober 2024 dihadiri oleh BP Tapera dan Bank Pelaksana (Bank BTN, BTN Syariah, Bank BSI, Bank BNI, dan BPD NTT). Penambahan fitur EWS telah ditambahkan di sistem <i>e-flpp</i>. Notifikasi perintah laporan pemindahbukuan dana SBUM muncul dalam <i>Dashboard</i> Bank Pelaksana setelah 3 hari kerja setelah tanggal SP2D/SI dan Bank Pelaksana wajib melaporkan status proses pemindahbukuan dana SBUM di dalam sistem <i>e-flpp</i> 2.0.
10	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Keterhunian Rumah yang difasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I, II, dan III.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keterhunian rumah yang difasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan mulai dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024 untuk Wilayah III, tanggal 25 Juni 2024 untuk Wilayah I, dan pada Wilayah II tanggal 09 Agustus 2024. Dokumen hasil monev disampaikan pada akhir Desember 2024.
11	Penyelesaian Desain Prototype Rumah Sederhana Hijau.	Telah dilakukan pembahasan Desain Prototype Rumah Sederhana Hijau. Saat ini telah disusun draf Kepmen Desain Prototype Rumah Sederhana Hijau.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
12	Penyelesaian <i>Readiness Criteria</i> pengusulan <i>Green Book</i> 2024.	Telah dilakukan penyusunan draf <i>Readiness Criteria</i> pengusulan <i>Green Book</i> 2024.
13	<i>Piloting</i> 25-30 <i>Green HMF</i> melalui Dana Hibah <i>Build Change</i> di Jawa Tengah.	<i>Piloting Green HMF</i> melalui Dana Hibah <i>Build Change</i> di Jawa Tengah dan Jawa Barat terlaksana 8 (delapan) unit rumah. Terdapat kendala RDTR di Daerah dan banyak dari calon penerima manfaat tidak memenuhi kriteria program sehingga pelaksanaan <i>piloting</i> belum maksimal.
14	Pencapaian Target 100.000 unit rumah hijau di Tahun 2024.	Telah dilaksanakan sertifikasi rumah hijau Tahun 2024 sebanyak 324 unit. Kendala utama tidak tercapainya target adalah mayoritas Pemerintah Daerah belum siap melakukan Sertifikasi BGH dan Platform SIMBG saat ini masih dalam tahap pengembangan.

3.10 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT EVALUASI AKIP TAHUN 2023

Berdasarkan surat Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan No.PR0304-PK/250 tanggal 28 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dit. PPP TA 2023 disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	a. Melakukan perencanaan kinerja yang baik agar target dapat dicapai. b. Memanfaatkan hasil capaian kinerja untuk pemberian promosi atau kenaikan/penurunan insentif terkait dengan <i>reward and punishment</i>.
2	Pengukuran Kinerja	a. Menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian <i>Output</i> masing-masing kegiatan dalam laporan monev bulanan, sehingga mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan. b. Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam e-sakip. c. Mendorong BPSDM untuk menyusun Peraturan terkait pemberian tunjangan kinerja berdasarkan capaian kinerja (<i>reward and punishment</i>.)
3	Pelaporan Kinerja	a. Menyusun dan mempublikasikan laporan monev bulanan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. b. Menyusun Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR (terutama pada bagian ringkasan eksekutif belum disampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya).

No	Komponen	Rekomendasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progres pengembangan aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja. b. Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal (link bukti dukung dapat disampaikan).

Adapun tindaklanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Evaluator:

Tabel 3. 24 Rekomendasi dan Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Perencanaan Kinerja	a. Melakukan perencanaan kinerja yang baik agar target dapat dicapai. b. Memanfaatkan hasil capaian kinerja untuk pemberian promosi atau kenaikan/penurunan insentif terkait dengan <i>reward and punishment</i> .	a. Telah dilakukan perencanaan kinerja yang matang untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan didukung dengan telah terdapat Rencana Aksi TA 2024 dan pembahasan Capaian <i>Output</i> dan IKK secara berkala. b. Telah terdapat SE Menteri PUPR No.23/SE/M/2023 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di PUPR yang telah ditetapkan pada 14 Desember 2023 dan berlaku pada 1 Januari 2024, yang didalamnya mengatur evaluasi kinerja pegawai dalam pemberian <i>reward & punishment</i>
2	Pengukuran Kinerja	a. Menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian <i>Output</i> masing-masing kegiatan dalam laporan monev bulanan, sehingga mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan. b. Lebih disiplin dalam mengupload dokumen laporan monitoring kinerja bulanan ke dalam <i>e-sakip</i> . c. Mendorong BPSDM untuk menyusun Peraturan terkait pemberian tunjangan Kinerja berdasarkan capaian kinerja (<i>reward and punishment</i>).	a. Pada laporan monev bulanan telah disajikan: 1. Capaian indikator persentase fisik yang relevan dengan capaian <i>Output</i> berdasarkan sasaran program 2. Capaian progres persentase fisik per paket kegiatan berdasarkan cascading dan realisasi anggaran b. Penyusunan Laporan monev bulanan dimulai pada Minggu terakhir setiap bulannya. Telah dilakukan upaya ketepatan waktu dalam

No	Komponen	Rekomendasi	Tindaklanjut
			mengupload dokumen ke dalam e-sakip. c. Telah terdapat SE Menteri PUPR No.23/SE/M/2023 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN di PUPR yang telah ditetapkan pada 14 Desember 2023 dan berlaku pada 1 Januari 2024, yang didalamnya mengatur evaluasi kinerja pegawai dalam pemberian <i>reward and punishment</i>.
3	Pelaporan Kinerja	a. Menyusun dan mempublikasikan laporan monev bulanan tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR. b. Menyusun Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR (terutama pada bagian ringkasan eksekutif belum disampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya).	a. Telah dilakukan penyusunan dan publikasi laporan monev bulanan secara tepat waktu dan disiplin. (September: 7-10-2024, Agustus: 4-09-2024, Juli: 7-08-2024, dan Mei: 4-07-2024). b. Laporan Kinerja Dit. PPP telah disusun sesuai Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan menggunakan Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR. Pada bagian ringkasan eksekutif LAKIN akan dilengkapi penjelasan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya pada LAKIN Tahun 2024.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	a. Berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait progres pengembangan aplikasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja b. Untuk tahun selanjutnya agar rekomendasi hasil evaluasi AKIP dapat ditindaklanjuti secara maksimal (<i>link bukti dukung</i> dapat disampaikan).	a. Pelaksanaan evaluasi AKIP telah menggunakan aplikasi e-sakip yang ada di iemon.pu.go.id/sakip. b. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP TA 2023 telah ditindaklanjuti disertai bukti dukung pelaksanaannya.

BAB 4

PENUTUP

Bab ini menguraikan keberhasilan dan/atau kegagalan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2024 serta rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki kondisi yang ada

4. PENUTUP

4.1 SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja menyajikan informasi berupa uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, kapasitas organisasi, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan simpulan dan rekomendasi yang dapat diimplementasi sebagai peningkatan untuk kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami revisi sebanyak 2 (dua) kali.

Metode pengukuran yang digunakan pada perhitungan capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan tertera di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020 – 2024 dan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024.

Penerbitan DIPA pertama Dit. PPP (BA.033) pada tanggal 24 November 2024, Nomor. SP DIPA-033.16.1.631003/2024 dengan pagu anggaran sejumlah Rp40.732.000.000. Berjalannya waktu DIPA kemudian mengalami 13 (tiga belas) kali revisi dan pagu anggaran mengalami 4 (empat) kali perubahan. Adapun pagu anggaran terakhir Dit. PPP sebesar Rp34.633.298.000 berdasarkan DIPA terakhir.

Pada DIPA pengelolaan program subsidi DIPA (BA999.07) pertama kali diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Nomor SP DIPA-999.07.1.987252/2024. Adapun nilai Pagu Anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 untuk penyaluran pengelolaan subsidi perumahan dengan target penyaluran SBUM kepada 220.000 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000 dan pembayaran SBK penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp4.609.438.646.000 yang dibayarkan kepada 751.735 unit. Terdapat revisi DIPA (BA999.07) pada tanggal 22 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp5.504.438.646.000 dengan rincian *Output* dengan target penyaluran SBUM 199.959 unit dengan pagu anggaran sebanyak Rp895.000.000.000 dan pembayaran SBK penerbitan tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak Rp4.609.438.646.000 yang dibayarkan kepada 732.927 unit.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi 100% (setara dengan 25%) hanya sebesar 24,73%.

Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan IKK Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tidak dapat terealisasi di atas 100% yaitu sebesar 100,55%.

Kinerja Anggaran Dit. PPP status 31 Desember 2024 dengan Alokasi Pagu Tahun 2024 sebesar Rp35.840.354.000. adalah 96,63% atau sejumlah Rp34.633.296.000 dengan kinerja fisik sebesar 99,99%.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Pendukung keberhasilan Laporan Kinerja melibatkan kontribusi positif terhadap capaian kinerja. Faktor pendukung yang telah diterapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan diantaranya keterlibatan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan capaian kinerja, sumber daya yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan fokus pada capaian organisasi.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan turut melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala mingguan, bulanan, dan triwulanan. Pemantauan dan evaluasi mingguan yang dilakukan untuk

melihat kinerja anggaran, kinerja penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, dan *update* kegiatan dan isu / permasalahan yang ditemukan saat Pelaksanaan proyek KPBU dan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Laporan Bulanan merupakan bentuk pelaporan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya untuk mengukur kinerja anggaran dan penyaluran Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disandingkan dengan target kinerja bulanan, serta identifikasi dan tindak lanjut terhadap isu dan permasalahan.

4.2 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025:

1. *Major Project* Proyek KPBU Perumahan dan Pembiayaan Kreatif Bidang Perumahan pada RPJMN Periode Tahun 2025 - 2029.
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Perumahan dan Pembiayaan Kreatif Bidang Perumahan.
3. Pendataan *Housing Queue* dan peminatan program pembiayaan perumahan di 13 (tiga belas) Provinsi Prioritas Pendataan.
4. *Piloting Green HMF* melalui Dana Hibah *Build Change* di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.
5. Perumusan Perubahan Besaran Penghasilan MBR dan Juknis Perhitungan Penghasilan.
6. Perumusan Perubahan Harga Jual Sarusun dan Rumah Tapak yang difasilitasi KPR Bersubsidi Tahun 2025.
7. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
8. Mendukung Program Pemerintah dalam Pelaksanaan 3 (tiga) Juta Rumah.

A decorative graphic in the top right corner of the page. It consists of a series of concentric, nested diamond shapes (rhombuses) that point downwards. The lines are thin and light blue, creating a subtle geometric pattern against the solid blue background.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Herry Trisaputra Zuna**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2024

Pihak Kedua

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%	
ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Dokumen
PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2	Kegiatan
PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	1	Kegiatan
QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan
QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	1	Layanan
QFC.001	Mikro Kredit Perumahan	100	Rumah Tangga
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%	
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

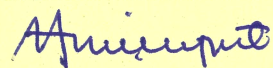
KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp29.232.000.000,00
Rp11.500.000.000,00
Rp5.504.438.646.000,00

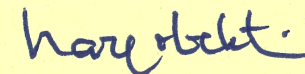
**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

JAKARTA, 5 JANUARI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



HARYO BEKTI MARTOYOEDO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Nama RO		Target	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	Output bukan berupa proyek KPBU, namun rekomendasi kebijakan/dokumen perencanaan program dan anggaran Direktorat PPP	0
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1 Rekomendasi Kebijakan	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	189.227.000.000
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2 Rekomendasi Kebijakan	1. Rusun Desa Besar Medan 2. Rusun Daan Mogot	1) 498.000.000.000 2) 717.000.000.000
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4 Kesepakatan	1. Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus) 2. Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi 3. Rusun Cisaranten Bina Harapan 4. Rusun Karawang Spuur	1) 797.000.000.000 2) 161.850.000.000 3) 653.710.000.000 4) 273.500.000.000

JAKARTA, JANUARI 2024
DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Haryo Bekti Martoyoedo

HARYO BEKTI MARTOYOEDO



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%	
ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Dokumen
PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2	Kegiatan
PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	1	Kegiatan
QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan
QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	1	Layanan
QFC.001	Mikro Kredit Perumahan	100	Rumah Tangga
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%	
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	4	Kesepakatan
AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp29.090.354.000,00

Rp10.950.000.000,00

Rp5.504.438.646.000,00

DIREKTUR JENDERAL

PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TRIONO JUNOASMONO

JAKARTA, 31 JULI 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN

PEMBIAYAAN PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Rusun Kota Surabaya Tahap 2	Rp189.227.000.000,00
	Rusun Daan Mogot	Rp717.000.000.000,00
Transaksi	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Rp1.500.000.000.000,00
	Rusun Kota Surabaya	Rp146.086.028.627,00
	Rusun Cisaranten Bina Harapan	Rp680.527.316.891,00
	Rusun Karawang Spuur	Rp272.474.481.923,00

JAKARTA, 31 JULI 2024

**DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**



HARYO BEKTI MARTOYOEDO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Haryo Bkti Martoyoedo**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Triono Junoasmono**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2024

Pihak Kedua

TRIONO JUNOASMONO

Pihak Pertama

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TARGET	
(1)		(2)	
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan			
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan		100%	
ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5	Rekomendasi Kebijakan
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	30	Dokumen
PEA.001	Fasilitas Pembiayaan Perumahan	2	Kegiatan
PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	1	Kegiatan
QAH.001	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	1	Layanan
QAH.002	Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	1	Layanan
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif			
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan		25%	
ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan
ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan
AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	2	Kesepakatan
AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	Dokumen
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan

KEGIATAN

1. Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan
2. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
3. Pengelolaan Subsidi Perumahan (BA.999.07)

ANGGARAN

Rp25.090.354.000,00
Rp10.750.000.000,00
Rp5.504.438.646.000,00

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

TRIDNO JUNOASMONO

JAKARTA, OKTOBER 2024
**DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN**

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Daftar Proyek KPBU Sektor Perumahan Tahun 2024

Tahapan	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
Perencanaan	-	-
Penyiapan	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat (TOD Lebak Bulus)	Rp1.585.757.000.000,00
	Rusun Kota Surabaya	Rp146.086.028.627,00
Transaksi	Rusun Cisaranten Bina Harapan	Rp723.950.000.000,00
	Rusun Karawang Spuur	Rp272.474.481.923,00

JAKARTA, OKTOBER 2024

DIREKTUR PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN

HARYO BEKTI MARTOYOEDO

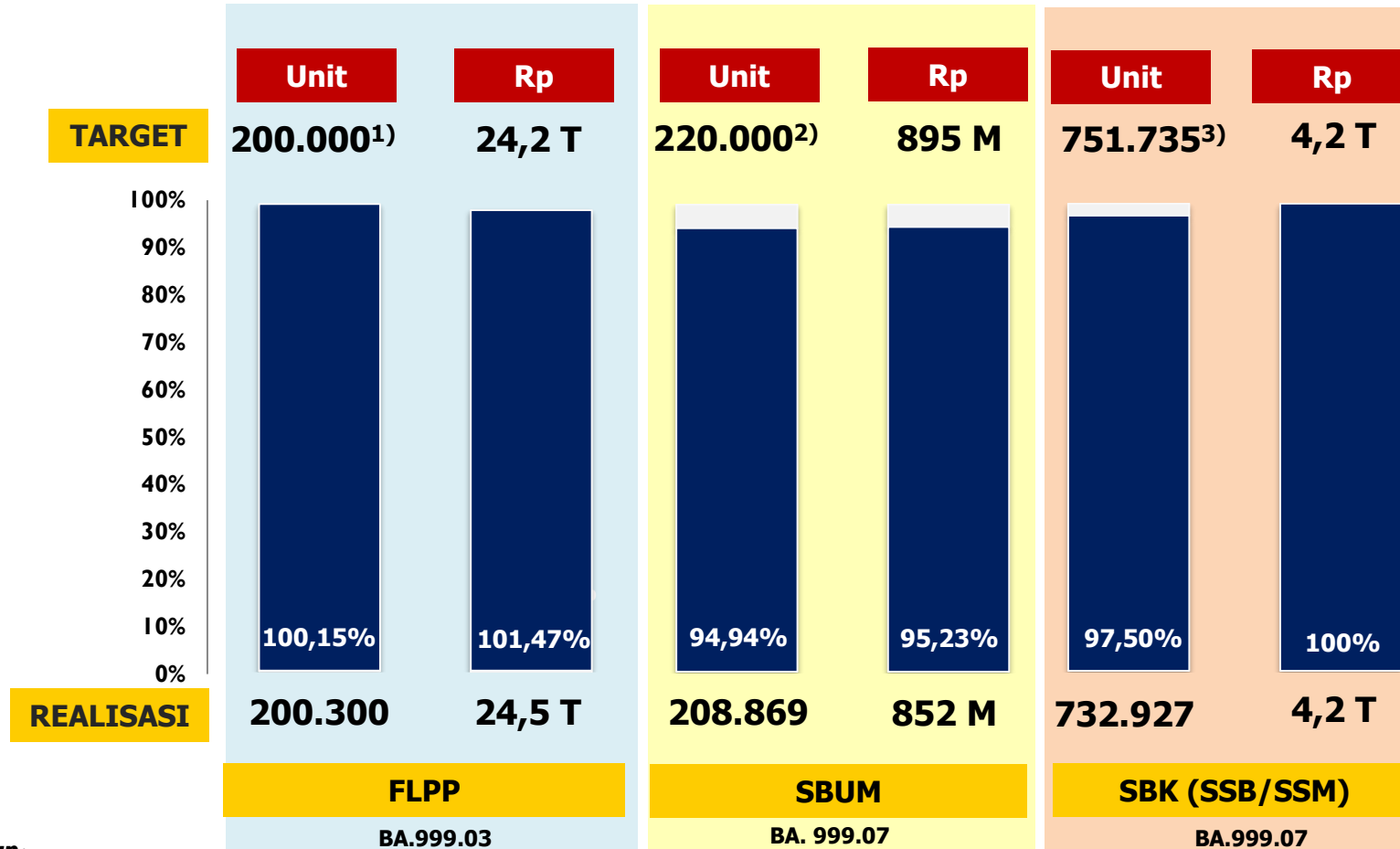
CASCADING CAPAIAN KINERJA TA 2024

Program	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Jenis Indikator IKSP	Kegiatan	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023	Komposit dari Indikator			Kegiatan Rincian Output	Rincian Ouput	Indikator Rincian Output	Bobot	Komponen	Target dalam Renstra		Bobot Perhitungan	Paket Output	Target		Capaian Paket		Total Capaian Komponen		Total Capain Rincian Output		Total Capaian Komposit IKK		Total Capaian Sasaran Kegiatan 2024										
								Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan						Volume	Satuan			Volume	Satuan	Volume	Satuan	Jumlah	%	Total Capaian Komponen	%	Jumlah	%	Jumlah	%									
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiajan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan Penyiajan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiajan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50,00%	Kebijakan Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	10,00%	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	120,00%	120,00%	12,00%	102,00%	51,00%	98,93%	24,73%									
								Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	0,00%		Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	0	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	Penyusunan Identifikasi Potensi dan Studi Pendahuluan Proyek KPBUI Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Dokumen	1,00	0,00%	0,00%	0,0%																
								Pra-Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	35,00%		Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	100,00%	Penyusunan Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	100,00%	100,00%	35,00%																
								Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	30,00%		Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	50,00%	Pengusahaan Dukungan Pemerintah terhadap KPBUI Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	50,00%	100,00%	30,00%																
													1	Rekomendasi Kebijakan	50,00%		1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1,00	50,00%																		
								Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan		25,00%	Perumusan NSPK Pembiayaan Perumahan	1	NSPK	100,00%	Penyusunan NSPK KPBUI Bidang Perumahan	1	NSPK	1,00	NSPK	1,00	100,00%	100,00%	25,00%															
								Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	Jumlah Proyek KPBUI kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan	50,00%		Kemitraan	Proyek KPBUI Perumahan yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiajan Transaksi Pembiayaan Perumahan	35,00%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiajan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2	Dokumen	30,00%	1. Pelaksanaan Transaksi KPBUI Perumahan PJPK Pemerintah Pusat 2. Pendampingan Transaksi KPBUI Perumahan PJPK Pemerintah Daerah	2	Dokumen	3,00	Dokumen	3,00	36,00%	71,00%	24,85%	95,85%	47,93%										
								Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2	Kesepakatan				70,00%			2	Kesepakatan	1,00		Kesepakatan	1,00	35,00%																	
								Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan		35,00%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	4	Laporan	100,00%	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBUI Sektor Perumahan	1	Dokumen	1,00	Dokumen	4,0	100,00%	100,00%	35,00%															
																		1	Dokumen	1,00	Dokumen																			
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBUI Sektor Perumahan	1	Dokumen	1,00	Dokumen																																			
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBUI Sektor Perumahan	1	Dokumen	1,00	Dokumen																																			
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	30,00%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	0	Laporan	100,00%	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	0	Laporan	2,00	Laporan	2,00	120,00%	120,00%	36,00%																								
Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan	100,00%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target	100,00%	Layanan Perkantoran	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantorat Direktorat PPP	100,00%	Pelaksanaan Operasional Perkantorat Direktorat PPP	1	Layanan	100,00%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1	Layanan	1	Layanan	1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
							Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder, dan Tapera	30,00%			Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)	Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan (SMF)	60,00%	Kegiatan	Penyaluran SMF	11.540	Rumah Tangga	11.540	Rumah Tangga	11.540	72,00%	103,89%	103,89%	103,89%	31,17%	100,55%													
							Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya	Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan dan Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan	5,00%			Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan 2. Jumlah Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Perumahan	100%	Pelaksanaan Dukungan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1	Kegiatan	1. Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan 2. Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan	2	Kegiatan	2	120,00%						6,00%												
							Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50,00%			Subsidi kepada Keluarga	Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka (SBUH)	70,00%	Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	220.000	Rumah Tangga	70,00%	SBJM (BA.999.07)	220.000	Rumah Tangga	208.869	Rumah Tangga	208.869	66,46%		46,89%												
														Jumlah penyaluran Program FLPP	30,00%		220.000	Rumah Tangga	30,00%		220.000	Rumah Tangga	200.300	Rumah Tangga	200.300	27,31%														
							Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	15,00%			Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	50,00%	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2	Rekomendasi Kebijakan	50,00%	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3,00	60,00%	120,00%	60,00%	110,00%	16,50%										
														Jumlah Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan		2	Rekomendasi Kebijakan	30,00%	1	Rekomendasi Kebijakan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	3,00	36,00%																
												Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	Jumlah Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	20,00%	Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1	NSPK	100,00%	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1	NSPK	1,00	NSPK	1,00	100,00%	100,00%	20,0%												
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	15,00%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	30	Laporan	100,00%				Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	1			Layanan	1,00	Layanan	30,00	100,00%	100,00%	15,00%																				

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024

FLPP, SBUM, DAN SSB/SSM

Status: 31 Desember 2024



- 1) Penambahan kuota FLPP TA 2024 dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit disetujui melalui KMK No. 380 Tahun 2024 pada tanggal 3 Oktober 2024
- 2) Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No. S-269/AG/2024 tanggal 20 November 2024 atas kurang bayar SBUM TA 2023 dan penambahan kuota FLPP TA 2024 sebanyak 34.000 unit, akan dilakukan secara bersamaan melalui Revisi Anggaran DIPA Satuan Kerja DJPI
- 3) Target SBK (SSB/SSM) TA 2024 senilai Rp4,6T untuk membayar sebanyak 751.735 unit (Tagihan SBK merupakan pembayaran untuk akad-akad tahun 2015-2020, tidak ada akad baru sejak 2021)

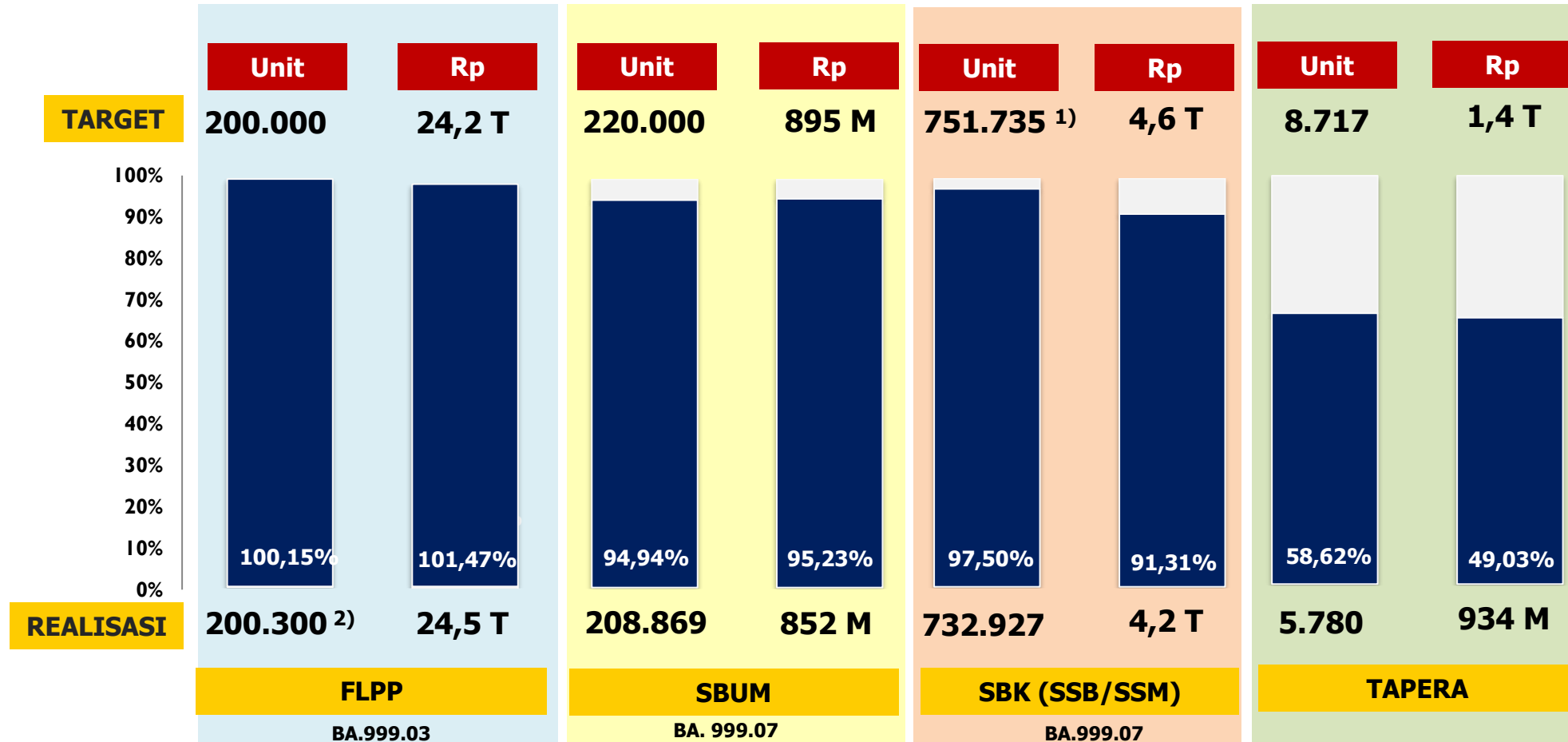
Catatan:

- a. Surat izin penyaluran dari Kemenkeu kepada BP Tapera terbit pada 27 Maret 2024. Baru ada pencairan penyaluran FLPP pada 28 Maret 2024
- b. PKS SBK TA 2024 (Bank BTN) ditandatangani pada 24 Juni 2024. Baru ada pencairan penyaluran pada 2 Juli 2024
- c. Terdapat realisasi FLPP sebanyak 41 unit yang merupakan rusun (tidak mendapatkan fasilitas bantuan SBUM)
- d. SBK Menggulung TA 2024 senilai Rp4.208.873.972.892 dan Tunggakan SBK TA 2023 senilai Rp400.564.673.000, sehingga secara total keseluruhan realisasi SBK TA 2024 senilai Rp4.609.438.646.000

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024

FLPP, SBUM, DAN SSB/SSM

Status: 31 Desember 2024



Catatan:

1. Target SBK (SSB/SSM) TA 2024 senilai Rp4,6T untuk membayar sebanyak 751.735 unit (Tagihan SBK merupakan pembayaran untuk akad-akad tahun 2015-2020, tidak ada akad baru sejak 2021)
2. Terdapat realisasi FLPP sebanyak 41 unit yang merupakan unit rusun sehingga tidak mendapatkan fasilitas bantuan SBUM

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024

FLPP, SBUM, DAN SSB/SSM

Status: 31 Desember 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	24.220.000.000.000	220.000	24.577.192.153.214	200.300 ¹⁾
2	Subsidi Bunga Kredit (Akad TA 2015-2020)				
2.a	SBK Menggulung 2024	4.609.438.646.000	751.735	4.208.873.972.892	732.927
2.b	Tunggakan SBK 2023		756.442	400.564.673.000	756.442
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)				
3.a	SBUM 2024	895.000.000.000	220.000	814.236.000.000	199.959
3.b	Tunggakan SBUM 2023			38.112.000.000	8.910
4	SMF	-	11.540	12.081.811.222.312	268.663
5	Tapera	1.431.900.000.000	8.717	934.222.383.307	5.780

1) Terdapat realisasi FLPP sebanyak 41 unit yang merupakan unit rusun sehingga tidak mendapatkan fasilitas bantuan SBUM
2) Total target dan realisasi unit berasal dari penjumlahan FLPP, SMF dan Tapera

REALISASI BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN TA. 2024

FLPP, SBUM, DAN SSB/SSM

Status: 31 Desember 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	TARGET UNIT	REALISASI UNIT	PRESENTASE
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	220.000	200.300	91,05%
2	Tapera	7.251	5.780	79,71%

Penghargaan dan Inovasi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA 2024

1. Sertifikat Sitem Manajemen Anti Penyyuapan (SMAP) Nomor 3624039 tanggal 28 November 2024.

No. 3624039

This is to certify the implementation and maintenance of the
Anti-Bribery Management Systems for :

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Jl. Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Indonesia

Has been approved to the following Anti-Bribery Management Systems
and assessed to conform with the standard :

SNI ISO 37001:2016

Which activities are applicable to the scope of :

"Implementation of formulation preparation and policies execution in the field
of housing infrastructure, housing financing facilities and assistance"

Initial Certification Date	: 28-11-2024	1 st Surveillance	: 28-11-2025
Issue Date	: 28-11-2024	2 nd Surveillance	: 28-11-2026
Valid Until	: 27-11-2027	Recertification	: 27-11-2027

This certificate is issued after successfully assessed to conform with
the Anti-Bribery Management Systems of SNI ISO 37001:2016.


Director

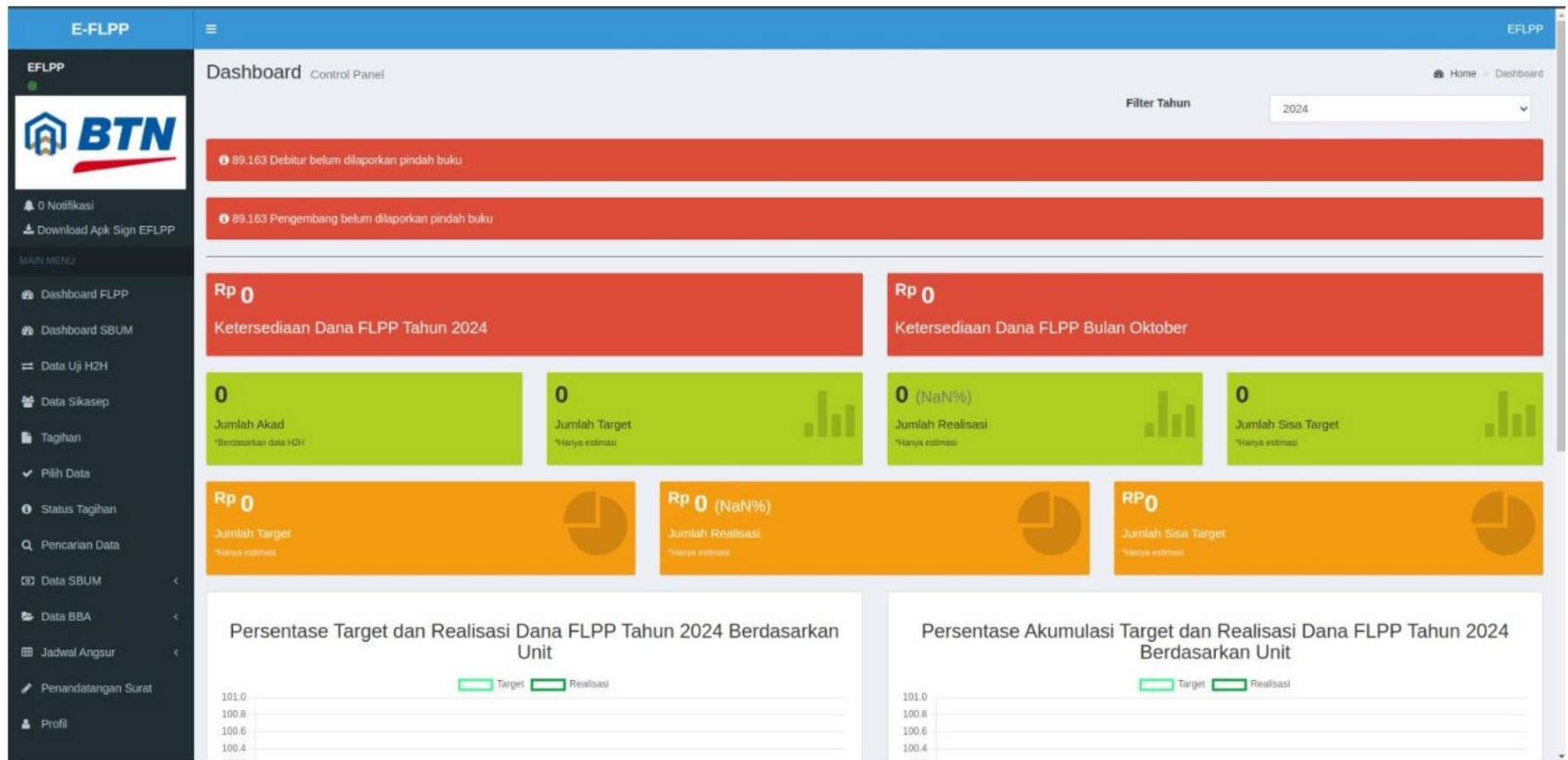
This certificate will be issued annually for approval
thirty-six (36) months from registered by MAS.



2. Piagam Penghargaan sebagai unit kerja terbaik atas Penerapan Manajemen Risiko UPRT-2 di lingkungan DJPI pada penerapan Tahun 2023.



3. Pengembangan Fitur Early Warning Sistem Untuk Perceptan Pencairan Dana SBUM



4. SOP Pengecekan Pemindahbukuan Dana SBUM

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	NOMOR SOP	08.0202 / Satkes - DJPI / 1	
	TANGGAL PEMBUATAN	24 Juni 2024	
	TANGGAL REVISI		
	TANGGAL EFEKTIF	2024	
	DISAHKAN OLEH	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  <u>R. Haryo Bakti Martoyoedo</u> NIP.197008201997031002	
NAMA SOP	PENGECEKAN PEMINDAHBUKUAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA		
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Peraturan Menteri Keuangan 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 Tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Subsidi Bunga Kredit Perumahan 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		1. Memahami Kebijakan dan Regulasi terkait dengan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35/PRT/M/2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 3. Memahami Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Margin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi dan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak Dan Satuan Rumah Susun Umum, Dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan 4. Mampu mengecek pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur dan dari rekening debitur ke rekening pengembang	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelaksanaan Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (SBUM-KPR Sejahtera/FLPP) 2. SOP Pelaksanaan Rekonsiliasi Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Dengan Bank Pelaksana 3. SOP Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Berbasis Elektronik		1. Laporan bukti pemindahbukuan dana SBUM 2. Laporan Realisasi Penyaluran SBUM Berdasarkan SP2D 3. Jaringan Internet 4. Komputer/Printer/Scanner	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat terjadi ketidakpahaman staf dalam melakukan pengecekan pemindahbukuan dana Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan		Dokumentasi bukti pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur dan dari rekening debitur ke rekening pengembang	

SOP Pengecekan Pemindahbukuan Dana Subsidi Bantuan Uang Muka

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Bank Pelaksana	PPK	Pejabat Fungsional	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Menyampaikan bukti pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur/nasabah dan dari rekening debitur/nasabah ke rekening pengembang				1. Bukti Pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur/nasabah. 2. debitur/nasabah ke rekening pengembang.	10	1. Bukti Pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur/nasabah. 2. debitur/nasabah ke rekening pengembang.	Bank Pelaksana menyampaikan bukti pemindahbukuan dana SBUM kepada Satker DJPI berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 19 ayat (4) dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak dilakukan pemindahbukuan dana SBUM ke Pengembang
2	Menerima bukti pemindahbukuan dana SBUM dari Bank Pelaksana, kemudian melakukan pengecekan pemindahbukuan dana SBUM dan menyampaikan hasil pengecekan kepada PPK				1. Bukti Pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur/nasabah. 2. debitur/nasabah ke rekening pengembang.	180	Hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM	Batas waktu pemindahbukuan dana SBUM dari rekening RPL ke rekening debitur berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pasal 19 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak dana SBUM di transfer dari Kas Negara ke rekening RPL. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan dana SBUM maka Bank Pelaksana dikenakan biaya keterlambatan dengan mekanisme yang diatur pada Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021
3	Menerima hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM dari Pejabat Fungsional dan memerintahkan Pejabat Fungsional untuk mencatumkan hasil pengecekan pada Konsep Berita Acara Rekonsiliasi SBUM				Hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM	30	Hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM	
4	Mencantumkan hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM pada Konsep Berita Acara Rekonsiliasi SBUM				Hasil pengecekan pemindahbukuan dana SBUM	30	Konsep Berita Acara Rekonsiliasi SBUM	
						240		
						4 jam		

5. SKB Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta

		
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI DALAM NEGERI		
NOMOR 03.HK/KPTS/Mn/2024 NOMOR 3015/KPTS/M/2024 NOMOR 600.10-4849 TAHUN 2024		
TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH		
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN MENTERI DALAM NEGERI,		
Menimbang	a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan program tiga juta rumah bagi masyarakat; b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;	
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	
KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati/Wali kota dan Penjabat Bupati/Penjabat Wali kota untuk:		
a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah:		
1) mengenai Penghapusan BPHTB Dalam Mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan		
2) mengenai Penghapusan Retribusi PBG dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR.		
- 4 -		
b. mempercepat proses pelayanan Penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
c. mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG, dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat; dan		
d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.		
KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.		
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 25 November 2024		
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,	MENTERI PEKERJAAN UMUM,	MENTERI DALAM NEGERI,
		
MARUARAR SIRAIT	DODY HANGGODO	MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7264230 (021) 7264230

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA

Nomor: 01/BA/Pp/2025

Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 bertempat di Balai Teknik Irigasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah diadakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja TA. 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang dihadiri oleh perwakilan dari Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan dan dilakukan pemuktahiran data status 31 Desember 2024, dengan hasil:

1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator	Target	Capaian
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25%	24.73%
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman		
SK. Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan		
IKK. Tingkat Pencapaian Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	100.55%

2. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU Siap Dikerjasamakan TA. 2024

	SEKTOR	TARGET TA. 2024		REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (xRp1,00)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (xRp1,00)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perumahan	2	996.424.481.923	1	Rusun Karawang Spuur	272.474.481.923
TOTAL		2	996.424.481.923	1		272.474.481.923

4. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2024

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	24.220.000.000.000	220.000	24.577.192.153.214	200.300
2	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)*	895.000.000.000	220.000	852.348.000.000	208.869
3	Subsidi Selisih Bunga (SSB)**	4.609.438.646.000	751.735	4.609.438.646.000	732.927
4	SMF	-	11.540	12.400.526.222.312	271.653
5	TAPERA	1.431.900.000.000	7.251	934.222.383.307	5.780
TOTAL		31.156.338.646.000	238.791	43.373.727.404.833	477.733

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024

*) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 751.735 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

5. Capaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fisik	
	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%	103,35%
033.16.IA	Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.090.354	24.032.934	95,79%	100,00%	104,21%
4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	25.090.354	24.032.934	95,79%	100,00%	104,21%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5.789.642	5.581.536	96,41%	100,00%	103,73%
4976.ABF.001	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan	5.789.642	5.581.536	96,41%	100,00%	103,73%
051	Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	2.500.000	2.392.383	95,70%	100,00%	104,51%
051.A	Penyempurnaan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	1.500.000	1.423.851	94,92%	100,00%	105,35%
051.B	Pengembangan Rumusan Skema dan Mekanisme Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi MBR	1.000.000	968.532	96,85%	100,00%	103,25%
052	Penyusunan dan Menyiapkan Kesepakatan Bersama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.512.000	1.482.656	98,06%	100,00%	101,98%
052.A	Penyiapan Kerja Sama Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.000.000	970.658	97,07%	100,00%	103,02%
052.B	Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam Penyaluran Bantuan dan Kemudahan Pembiayaan Perumahan	512.000	511.999	100,00%	100,00%	100,00%
053	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	1.777.642	1.706.497	96,00%	100,00%	104,17%
053.A	Koordinasi Pelaksanaan Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.499.800	1.428.655	95,26%	100,00%	104,98%
053.B	Tindak Lanjut Hasil Reviu Perhitungan Cost of Fund atas dana Talangan FLPP Tahun 2019	277.842	277.842	100,00%	100,00%	100,00%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%	104,38%
4976.AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%	104,38%
051	Perumusan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%	104,38%
051.A	Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	1.000.000	958.060	95,81%	100,00%	104,38%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%	100,79%
4976.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%	100,79%
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan	6.300.712	6.205.160	98,48%	100,00%	100,79%
051.A	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	240.000	221.728	92,39%	100,00%	108,24%
051.B	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	240.000	221.233	92,18%	100,00%	108,48%
051.C	Konsolidasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	240.000	213.443	88,93%	100,00%	112,44%
051.D	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1	1.879.351	1.873.869	99,71%	100,00%	100,29%
051.E	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 2	1.843.007	1.834.965	99,56%	100,00%	100,44%
051.F	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 3	1.858.354	1.839.923	99,01%	100,00%	101,00%
PEA	Koordinasi	5.000.000	4.758.315	95,17%	100,00%	105,08%
4976.PEA.001	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.000	2.800.977	93,37%	100,00%	107,11%
051	Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	3.000.000	2.800.977	93,37%	100,00%	107,11%
051.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Tabungan Perumahan	1.500.000	1.301.320	86,75%	100,00%	115,27%

Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fisik	
051.B	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Pembiayaan Sekunder Perumahan	1.500.000	1.499.657	99,98%	100,00%	100,02%
4976.PEA.002	Fasilitas Pembiayaan Perumahan Terjangkau dan Berwawasan Lingkungan	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%	102,18%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%	102,18%
005.A	Dukungan Pembiayaan Perumahan Melalui Indonesian Green and Affordable Housing Program (IGAHP)	2.000.000	1.957.338	97,87%	100,00%	102,18%
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	7.000.000	6.529.863	93,28%	100,00%	107,20%
4976.QAH.001	Fasilitasi Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%	104,90%
051	Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%	104,90%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Dana Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	4.500.000	4.289.897	95,33%	100,00%	104,90%
4976.QAH.002	Fasilitasi Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%	111,61%
051	Pelaksanaan Fasilitas Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%	111,61%
051.A	Dana Operasional untuk Mendukung Pelaksanaan Penyaluran Mikro Kredit Perumahan	2.500.000	2.239.966	89,60%	100,00%	111,61%
033.WA	Program Dukungan Manajemen	10.750.000	10.600.362	98,61%	99,97%	101,42%
4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%	100,04%
EBA	Layanan Perkantoran	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%	100,04%
4194.EBA.994	Operasionalisasi Kantor Direktorat	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%	100,04%
002	Pelaksanaan Operasional Pekantorat Direktorat PPP	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%	100,04%
002.P	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Direktorat PPP	1.000.000	999.589	99,96%	100,00%	100,04%
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	9.750.000	9.600.773	98,47%	99,97%	101,56%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	4.540.000	4.413.621	97,22%	100,00%	102,86%
4197.ABF.013	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%	109,61%
051	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%	109,61%
051.A	Penyusunan Program, Anggaran, dan Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	900.000	821.085	91,23%	100,00%	109,61%
4197.ABF.015	Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%	102,29%
052	Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%	102,29%
052.A	Fasilitasi Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Perumahan PJPk Pemerintah Daerah	2.100.000	2.053.081	97,77%	100,00%	102,29%
4197.ABF.016	Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.540.000	1.539.455	99,96%	100,00%	100,04%
051	Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	1.540.000	1.539.455	99,96%	100,00%	100,04%
051.A	Pengusahaan Dukungan Pemerintahan terhadap KPBU Perumahan	900.000	899.796	99,98%	100,00%	100,02%
051.B	Pengusahaan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU Perumahan	640.000	639.659	99,95%	100,00%	100,05%
AEE	Kemitraan	3.950.000	3.949.735	99,99%	100,00%	100,01%
4197.AEE.004	Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan	3.950.000	3.949.735	99,99%	100,00%	100,01%
051	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Perumahan	2.950.000	2.949.739	99,99%	100,00%	100,01%

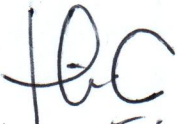
Kode	Program / Kegiatan / KRO (Output) / RO (Output) / Komponen / Paket	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Nilai Efisiensi (%)
				Keu.	Fisik	
051.A	Pelaksanaan Transaksi KPBUPerumahan PJPK Pemerintah Pusat	1.500.000	1.499.741	99,98%	100,00%	100,02%
051.B	Pendampingan Transaksi KPBUPerumahan PJPK Pemerintah Daerah	1.450.000	1.449.998	100,00%	100,00%	100,00%
052	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Perumahan	1.000.000	999.996	100,00%	100,00%	100,00%
052.A	Pendampingan Penyiapan Transaksi KPBUPerumahan PJPK Gabungan	500.000	499.999	100,00%	100,00%	100,00%
052.B	Pendampingan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUPerumahan Karawang Spuur	500.000	499.997	100,00%	100,00%	100,00%
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	450.000	431.082	95,80%	100,00%	104,39%
4197.AFA.004	NSPK Pembiayaan Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%	104,39%
051	Perumusan NPSK Pembiayaan Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%	104,39%
051.A	Penyusunan NSPK KPBUBidang Perumahan	450.000	431.082	95,80%	100,00%	104,39%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	810.000	806.335	99,55%	99,67%	100,58%
4197.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	810.000	806.335	99,55%	99,67%	100,58%
057	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	810.000	806.335	99,55%	99,67%	100,58%
057.A	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Perencanaan KPBUSektor Perumahan	240.000	239.999	100,00%	100,00%	100,00%
057.B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Penyiapan KPBUSektor Perumahan	240.000	239.999	100,00%	100,00%	100,00%
057.C	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tahap Transaksi KPBUSektor Perumahan	240.000	239.862	99,94%	100,00%	100,06%
057.D	Pemantauan dan Evaluasi Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	90.000	86.475	96,08%	97,00%	100,95%
TOTAL		35.840.354	34.633.296	96,63%	99,99%	103,35%

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan TA. 2024 ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

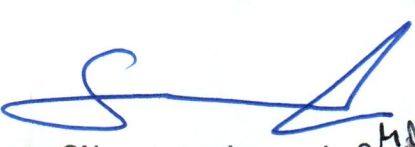
Jakarta, 3 Januari 2025

Yang menyepakati,

Kepala Subdirektorat
Legalisasi Rencana Investasi


Fitri Ami Handayani

Kepala Subdirektorat
Koordinasi Kerja Sama Investasi


SN permana Lazuardy

Kepala Subdirektorat
Kemudahan dan Bantuan
Pembiayaan Perumahan


Ratna Indriani

Mengetahui,
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan


R. Haryo Bakti Martoyoedo

DOKUMENTASI KEGIATAN

SUBDIT 1

Rapat Persiapan *Pilot Project* IGAHP - *Build Change*

Kamis, 18 Januari 2024

Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan
Pembiayaan Perumahan



Pembahasan *Green Building Initiative* dalam IGAHP

Selasa, 4 Juni 2024

Oakwood Suite La Maison Jakarta



Rapat Pembahasan Penyiapan BP3 sebagai Badan Pelaksana dalam Skema Investasi Pembiayaan Perumahan

Jumat, 21 Juni 2024

Aviary Hotel Bintaro



Rapat Koordinasi Penyelarasan Revitalisasi Rusun Pasar Jumat dengan Rencana Pengembangan Kawasan TOD Lebak Bulus

Rabu, 26 Juni 2024

BPSDM PUPR Jakarta



SUBDIT 2

Rapat Sosialisasi Pembangunan Pipa Perlintasan PDAM menuju Proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung

Kamis, 25 Januari 2024

Aston Pasteur Hotel Bandung



Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Proyek KPBU Rumah Susun Karawang Spuur

Jumat, 26 Januari 2024

The Margo Hotel Depok



Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Jumat, 20 Desember 2024

Balai Teknik Irigasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kota Bekasi



SUBDIT 3

Rapat Pembahasan Laporan Antara Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah I dan Wilayah II

Senin, 4 November 2024

Balai Teknik Irigasi Bekasi



Rapat Pembahasan Perhitungan Harga Jual Rumah Tapak dan Rumah Susun Tahun 2025

Selasa, 5 November 2024

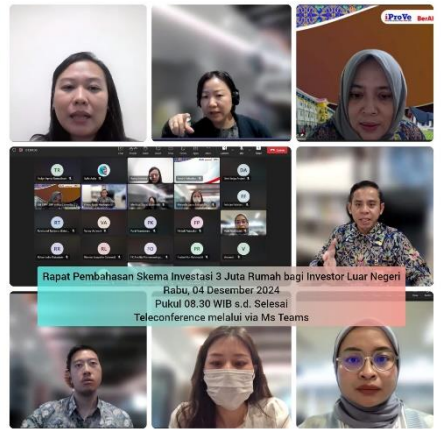
Ruang Rapat Gedung A2 DJPI



Rapat Pembahasan Skema Investasi 3 Juta
Rumah bagi Investor Luar Negeri

Rabu, 4 Desember 2024

Ms teams



DOKUMENTASI PEMANFAATAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Dokumentasi Rapat Kerja/Rapat Pimpinan Terkait Pencapaian Kinerja

Tanggal	23 April 2024
Kegiatan	Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q1 TA 2024 dan Penyiapan Strategi Pelaksanaan Target Q2 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Tempat	The 101 Jakarta Sedayu Darmawangsa
Peserta	1. Unsur Direktorat Pengembangan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Unsur PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero); 3. Unsur Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; 4. Unsur Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR; 5. Unsur Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 6. Unsur Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 7. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 8. Para Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi di Lingkungan DJPI.
Hasil Kegiatan	1. Realisasi anggaran berdasarkan data <i>e-monitoring</i> status 31 Maret 2024 sebesar 6,21% atau sebesar Rp2.527.658.000 di atas target Q1 TA 2024 yaitu 5.13%. 2. KPBU Bidang Perumahan a) Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung • Telah dilakukan musyawarah dengan pemilik lahan terkait pelaksanaan penambahan dan pelebaran akses jalan menuju lokasi rusun; • Draf Perwali tentang petunjuk teknis SKBG telah disiapkan oleh Pemkot Bandung yang saat ini masih menunggu penerbitan SE Dirjen Perumahan tentang petunjuk teknis tata cara penerbitan SKBG Sarusun; b) Rusun Karawang Spuur • Konfirmasi final AP sedang berproses, saat ini konsep surat komitmen pembayaran AP dari Bapak Menteri PUPR akan dibahas lebih lanjut dengan Bapak Sekjen PUPR terkait keterhunian dan pengelolaan proyek; • Pengajuan KSPI saat ini telah terbit surat rekomendasi kelayakan dari Deputy Pendanaan Bappenas pada 15 Maret 2024; • Persiapan pelaksanaan prakualifikasi, saat ini telah disusun dokumen PQ, RfP, PKS, dan SLA.

	c) Rusun TOD Lebak Bulus – Pasar Jumat • Telah disahkannya UU APBN 2024 yang menyatakan bahwa akan diberikan PMN non Tunai kepada Perum Perumnas berupa tanah di beberapa lokasi. Saat ini sedang menunggu PP turunannya hingga akhir Tahun 2024 sebagai syarat untuk memulai proses konstruksi. d) Kpbu Rusun Perkotaan Surabaya – Tambak Wedi • Alternatif model kerjasama <i>build to order</i> (BTO); • Pendataan calon penghuni rusun menggunakan aplikasi <i>housing queue</i>; • Melakukan kajian ulang harga jual rusun. 3. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan a. Realisasi penyaluran program FLPP status 31 maret 2024 sebanyak 4.229 unit sebesar Rp 504.106.907.309; b. Belum ada realisasi dalam penyaluran SBUM karena masih proses pengujian (pencairan FLPP 28 Maret 2024, 29-31 Maret 2024 merupakan hari libur); c. Belum ada realisasi dalam penyaluran SSB karena masih proses penyusunan PKS. Setelah penandatanganan PKS Satker DJPI perlu melakukan rekonsiliasi dengan Bank sebelum melakukan penyaluran dimaksud; d. Belum ada realisasi dalam penyaluran BBA karena masih menunggu persetujuan Kemenkeu atas permohonan anggaran untuk penyaluran BBA. 4. Masukan dan tanggapan 1. Kementerian PPN/Bappenas • Diperlukan tambahan kolom target waktu di tabel isu strategis agar lebih menginformasikan target pelaksanaan tindak lanjut yang akan dilakukan. • Realisasi anggaran Dit.PPP terendah ke 2 (dua) dibandingkan dengan unit kerja lain di lingkungan DJPI yaitu (9,01%) status 23 April 2024. 2. Biro PAKLN • Capaian IKK Dit.PPP hingga triwulan I TA 2024 sudah di atas 100%, ke depannya penting untuk dilakukan pengawalan indikator target dan capaian kinerja agar tukin para pegawai tidak terpotong; • Realisasi anggaran Dit.PPP terendah ke 2 (dua) dibandingkan dengan unit kerja lain di lingkungan DJPI yaitu (9,01%) status 23 April 2024. 3. Setdjen, DJPI • Mempertahankan deviasi realisasi anggaran untuk tetap di bawah 5%; • Anggaran yang berstatus diblokir dan sisa anggaran kontraktual akan dialokasikan untuk pembayaran tukin pegawai.
--	---

	Tindak Lanjut 1. Melakukan <i>input</i> capaian <i>output</i> bulanan secara berkala oleh masing-masing PIC Subdirektorat; 2. Percepatan proses transaksi proyek KPBU Bidang Perumahan khususnya yang ditargetkan siap dikerjasamakan pada Tahun 2024; 3. Percepatan pelaksanaan realisasi anggaran pada Q2 sesuai dengan strategi yang telah disiapkan.
Dokumentasi	

Tanggal	9 Agustus 2024
Kegiatan	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Q2 TA 2024 dan Penyiapan Strategi Pelaksanaan Target Q3 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Tempat	Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah II Palembang
Peserta	1. Unsur Direktorat Pengembangan Pendanaan, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Unsur PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero); 3. Unsur Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; 4. Unsur Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR; 5. Unsur Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 6. Unsur Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 7. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 8. Para Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi di Lingkungan DJPI.

Hasil Kegiatan	1. Realisasi kinerja anggaran Dit. PPP berdasarkan data <i>e-monitoring</i> status 30 Juni 2024 sebesar Rp7.711.086.000 atau 19.19%, masih terdapat deviasi dari rencana anggaran sebesar 5,99% dari rencana bulan Juni 2024 sebesar 25,18% pada periode tersebut. 2. Terdapat 2 (dua) proyek KPBU Bidang Perumahan yang masuk dalam daftar proyek super prioritas, yaitu Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Rusun Karawang Spuur. 3. Progres Proyek KPBU Bidang Perumahan a) Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung • Terdapat 2 opsi skema AP yaitu Flat dan AP <i>Declining</i>, yang mana nilai total AP <i>Declining</i> lebih rendah dibandingkan AP Flat. • Rencana pembangunan diusulkan dilakukan bertahap, karena mempertimbangkan calon penghuni sebanyak 1.154 orang dan kemampuan calon BUP. • Telah didapatkan calon penghuni yang telah lolos SLIK sebanyak 1.154 orang dan PT PII harus menyampaikan tambahan data calon penghuni untuk memenuhi target keterhunian sebanyak 1.852 unit sesuai kajian FBC. b) Rusun Karawang Spuur • FBC dan Konfirmasi final AP sedang berproses • Terkait pengajuan KSPI, telah terbit surat rekomendasi kelayakan dari Deputy Pendanaan Bappenas pada 15 Maret 2024. • Terkait persiapan pelaksanaan prakualifikasi, telah disusun dokumen PQ, RfP, PKS, dan SLA. • PT PII sedang melakukan appraisal atas dokumen UP untuk dapat diterbitkan Surat Pertimbangan Minat Jamin saat pelaksanaan PQ dan surat In Principal Approval (IPA) dan final perjanjian penjaminan pada saat pelaksanaan RfP. c) Rusun TOD Lebak Bulus – Pasar Jumat • Finalisasi revisi kajian FBC • UU APBN 2024 menyatakan bahwa akan diberikan PMN non Tunai kepada Perum Perumnas berupa tanah di beberapa lokasi. Saat ini sedang menunggu PP turunannya hingga akhir Tahun 2024 sebagai syarat untuk memulai proses konstruksi. • Koordinasi terkait lahan untuk membahas akses langsung dari jalan raya menuju Rusun yang akan dibangun. d) KPBU Rusun Perkotaan Surabaya – Tambak Wedi • Proyek dilakukan dengan skema SKBG, selanjutnya Pemkot Surabaya menyiapkan regulasi SKBG. • Alternatif model kerjasama build to order (BTO). • Pendataan calon penghuni rusun menggunakan aplikasi housing queue. 4. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan a. Realisasi penyaluran status 30 Juni 2024 1. Program FLPP sebanyak 88.946 unit sebesar Rp10.079.454.360.470;
-----------------------	---

	2. Program SBUM sebanyak 78.413 unit sebesar Rp318.140.000.000; 3. program SSB/SSM sebanyak 736.232 unit sebesar Rp1.406.523.273.642. b. Sesuai Surat dari Kementerian Keuangan, program FLPP dengan dukungan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sudah berjalan dengan baik dengan capaian kinerja melampaui target, sehingga untuk MBR yang mengikuti program FLPP tidak diperlukan pemberian BBA. Dengan demikian anggaran BBA untuk Tahun 2024 tidak dialokasikan lagi. 5. BP Tapera a) KPR Sejahtera FLPP 1. Total penyaluran KPR Sejahtera FLPP Tahun 2010 s.d 2024 (31 Juli 2024) mencapai 1.508.308 unit dengan nilai Rp140,01 Trilyun. 2. Realisasi BP Tapera Tahun 2020 s.d 2024 mencapai 825.700 unit dengan nilai Rp95,64 Triliun. 3. Tahun 2024 dari total kuota 166.000 unit, telah direalisasikan sebanyak 109.719 unit dengan nilai Rp13,3 Trilyun (66,09%). 4. Realisasi penyaluran dengan kriteria bank penyalur terbesar adalah Bank BTN & BTN Syariah sebanyak 72.562 Unit (66,13%), BRI sebanyak 9.415 Unit (8,5%) dan BNI sebanyak 7.884 unit (7,18%). b) Pembiayaan Tapera Realisasi Penyaluran Pembiayaan Tapera s.d 30 Juni 2024 sebanyak 2.558 unit dengan nominal pembiayaan Rp424.786.080.142, dengan rincian: 1. KPR 2.557 unit sebesar Rp424.654.080.142 dan KBR 1 unit sebesar Rp132.000.000; 2. Dari 2.558 unit Akad Pembiayaan Tapera hingga 30 Juni 2024, baru 908 unit (35,5%) yang sudah diterbitkan Efek dengan total 1.853 unit total terbit Efek di Tahun 2024 (945 unit atas Akad Tahun 2023 dan 2022). 6. PT SMF a. PT. SMF telah menyalurkan pembiayaan kepada 78.999 rumah tangga/ debitur non program (FLPP) dari target sesuai Renstra PUPR 11.540 debitur. b. Akumulasi penyaluran pembiayaan mikro perumahan hingga bulan Juni 2024 sebanyak Rp.636,6 Miliar atau 326.194 debitur. Pada Tahun 2024 dan selanjutnya diproyeksi terdapat kemungkinan penurunan permintaan pembiayaan mikro perumahan salah satunya dikarenakan masih terbatasnya lembaga keuangan mikro yang dapat menyalurkan pembiayaan mikro semasif PT Permodalan Nasional Madani (PNM). 7. Masukan dan tanggapan 1) Kementerian PPN/Bappenas
--	--

	Perlu disiapkan strategi apabila nilai final AP yang diajukan melebihi <i>ceiling</i> anggaran. Sehingga selanjutnya PJPk melakukan kajian AP apabila konstruksi proyek dilakukan bertahap. 2) Setdjen, DJPI • Mempertahankan besaran deviasi realisasi anggaran tetap sebesar $\pm 5\%$; • Anggaran yang berstatus diblokir dan sisa anggaran kontraktual akan dialokasikan untuk pembayaran tunjangan pegawai. 3) Dit. PSSPP • Segera melakukan perubahan revisi jumlah target DIPA 2024 dan revisi Perjanjian Kinerja (PK) TA 2024, berdasarkan kondisi aktual kemungkinan jumlah proyek yang siap dikerjasamakan, semula 4 target proyek menjadi 2 target proyek sesuai dengan jumlah target berdasarkan revisi Renstra DJPI. • Dit. PPP telah cukup disiplin dalam input data capaian kinerja dan upload dokumen e-sakip. Tindak Lanjut Melakukan revisi pada jumlah target DIPA 2024, Perjanjian Kinerja 2024, dan Rencana Aksi Tahun 2024. Percepatan proses transaksi proyek KPBU Bidang Perumahan yang masuk dalam daftar proyek super prioritas yang ditargetkan lelang pada Tahun 2024.
Dokumentasi	

Tanggal	5 November 2024
Kegiatan	Rapat Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Q3 TA 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tempat	Balai Besar Pengujian Standart Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
Peserta	1. Unsur Direktorat Pengembangan Pendanaan, Kementrian PPN/Bappenas; 2. Unsur PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero); 3. Unsur Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; 4. Unsur Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 5. Unsur Sekretariat Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 6. Para Kasubdit di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; dan 7. Para Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi di Lingkungan DJPI.
Hasil Kegiatan	1. Realisasi kinerja anggaran Dit. PPP berdasarkan data <i>e-monitoring</i> Status per tanggal 30 September 2024 sebesar 52,02% atau sejumlah Rp18.748.859.000 dan Status per tanggal 4 November 2024, sebesar 59,85% atau sejumlah Rp21.449.115.000. 2. Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung dan Rusun Karawang Spuur yang saat ini statusnya di <i>Hold</i> oleh PJPK. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelesaian isu dan finalisasi dokumen lelang masih tetap dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2024. 3. Perubahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan membuat Dit.PPP segera bertransformasi ke dalam Kementerian PKP. 4. Progres Proyek KPBU Bidang Perumahan a) Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung • Proyek akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap konstruksi • Seluruh dokumen seperti FBC dan dokumen transaksi sedang dalam penyesuaian menjadi 2 tahap konstruksi. b) Rusun Karawang Spuur • Progres persiapan transaksi saat ini menunggu persetujuan Menteri (PJPK). • Pengajuan Nota Kesepakatan Sinergi antara PJPK dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. c) Revitalisasi Rusun TOD Pasar Jumat • Perlu pengaturan terkait kompensasi yang akan didapatkan oleh masyarakat sekitar yang terdampak relokasi pembangunan proyek. • Penugasan dari Kementerian PUPR/BUMN kepada Perumnas sebagai Badan Pelaksana untuk memberikan kepastian hukum, jaminan, dan kemudahan perizinan selama proses pengadaan dan pemilihan mitra swasta. d) Rusun Perkotaan Surabaya

	• Penajaman kajian feasibility study dengan outstanding issue perihal modifikasi skema keuangan dan penajaman biaya konstruksi serta unsur pembentuk harga jual melalui alternatif skema kerjasama lain (BTO). • Pendataan housing queue rusun Tambak wedi dan Sememi guna memetakan potensi calon penghuni yang ditindaklanjuti menggunakan fasilitasi pengembangan aplikasi housing queue oleh DJPI. 5. Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan a. Realisasi bantuan pembiayaan perumahan TA. 2024 status 31 Oktober 2024: • Program FLPP sebanyak 179.971 unit sebesar Rp. 22 Triliun; • Program SBUM sebanyak 158.605 unit sebesar Rp. 643 Miliar; • Program SSB/SSM sebanyak 744.494 unit sebesar Rp. 3 Triliun; b. Rencana penyelesaian program BBA dengan proses revisi DIPA yang memanfaatkan sisa dana dari Direktorat Jenderal SDA sebagaimana hasil koordinasi dengan Biro PAKLN. c. Finalisasi kajian perhitungan harga jual rumah tapak dan sarusun milik akan 6. BP Tapera a. Penambahan target penambahan target program FLPP dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit. b. Per 31 Oktober realisasi FLPP telah menggunakan DIPA Revisi dengan akumulasi realisasi dari awal tahun 2024 sebanyak 179.917 unit. c. Strategi pencapaian Tahun 2024 dengan promosi/edukasi ke bank penyalur dan pengembang terkait hak dan kewajiban rumah subsidi, pembatasan komitmen menjadi kuota, dan melakukan pengecekan fisik atas akad setelah 14 hari kerja untuk memastikan rumah sesuai standar saat akad. 7. PT SMF a. Realisasi penyaluran status 31 Oktober 2024 sebanyak 263.463 rumah tangga/debitur non program (FLPP) diatas target Renstra PUPR sebanyak 11.540 debitur. b. Tingginya realisasi penyaluran dikarenakan adanya perluasan mandat PT SMF berdasarkan Perpres RI No.100 Tahun 2020 tentang pembiayaan sekunder, sehingga yang sebelumnya hanya dapat menyalurkan untuk produk KPR Siap Huni diperluas menjadi berbagai produk (seperti mikro perumahan, kredit konstruksi, dan KPR inden/PPJB). 8. Masukan dan tanggapan dari perwakilan : a. Kementerian PPN/Bappenas • Menyelesaikan isu dan mengidentifikasi proyek KPBU Rusun Cisaranten dan Rusun Karawang Spuur akibat pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.
--	--

	• Mempertimbangkan kembali skema pembayaran AP <i>Declining</i> untuk dibandingkan dengan penggunaan APBN pada proyek KPBU Rusun Cisaranten. • Memastikan PJPK dan struktur proyek TOD Lebak Bulus. b. BPIW • Mempersiapkan struktur anggaran, BMN, dan SDM atas adanya pemisahan Kementerian • Laporan Kinerja TA 2024 tetap menggunakan pedoman di Kementerian PUPR karena secara DIPA masih menggunakan DIPA Kementerian PUPR. c. PSSPP • Menyiapkan tindak lanjut pada proyek yang akan diklaim sesuai target PK Dit PPP dan sesuai yang masuk quick win KPBU (Rusun Karawang spur) • Mendorong revisi target output proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada revisi DIPA ke-11 dalam rangka merubah 4 kesepakatan menjadi 2 kesepakatan. Tindak Lanjut 1. Memastikan struktur legal PJPK dan Konfirmasi AP setelah adanya transformasi Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP. 2. Penyusunan Laporan Kinerja Dit.PPP TA 2024 masih menggunakan SOTK Kementerian PUPR. 3. Melakukan <i>upload</i> revisi resntra Dit.PPP TA 2024 pada aplikasi <i>e-monitoring</i> atas perubahan Renstra DJPI TA 2024.
Dokumentasi	

Tanggal	17 Juli 2024
---------	--------------

Kegiatan	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan Tahap Penyiapan dan Tahap Transaksi Semester I TA 2024
Tempat	Mercure Tangerang BSD City
Peserta	1. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 2. Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 3. Unsur Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Unsur Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 5. Unsur PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia; 6. Unsur PT. Sarana Multi Infrastruktur; dan 7. Unsur Unit Kerja di lingkungan DJPI.
Hasil Kegiatan	1) Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung (Status Tender Preparation) a) Saat ini sedang finalisasi dokumen FBC. b) Pelaksanaan prakualifikasi direncanakan pada Q4 Tahun 2024. c) Terdapat 2 (dua) opsi skema pengembalian investasi yang digunakan yaitu: opso 1) pembayaran <i>availability payment</i> secara <i>flat</i> dan opsi 2) pembayaran <i>declining</i>; d) Persyaratan prakualifikasi yang sedang disiapkan antara lain : penetapan lokasi proyek KPBU, pemanfaatan BMN, konfirmasi final AP, dan konfirmasi penjaminan. e) Persyaratan penerapan skema rusunami SKBG yang sedang dipersiapkan antara lain: jalan akses menuju rusun, penerbitan SE Dirjen Perumahan mengenai Petunjuk Teknis SKBG oleh Ditjen Perumahan, mekanisme Rekening Penampungan Lainnya (RPL), konfirmasi kepada DJKN Kemenkeu mengenai kebijakan penyesuaian tarif sewa sebesar 1% untuk sektor perumahan yang melayani MBR pada regulasi PMK 115/2020 tentang pemanfaatan BMN dan KMK 213 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN. 2) Rusun Karawang Spuur (Status <i>Tender Preparation</i>) a) Dokumen FBC dalam tahap finalisasi b) Pelaksanaan prakualifikasi direncanakan pada Q3-Q4 Tahun 2024. Saat ini sedang menunggu persetujuan lelang dari Menteri PUPR. c) Persyaratan prakualifikasi yang sedang disiapkan antara lain konfirmasi final AP, pengajuan KSPI, dan konfirmasi penjaminan. d) Terdapat 2 (dua) opsi dalam pengadaan lahan TPU yaitu opsi 1) dilakukan pengadaan oleh Kementrian PUPR, dan opsi 2) pengadaan oleh BUP yang selanjutnya dimasukkan ke dalam capex. 3) Rusun Perkotaan Surabaya (Status OBC-FBC) a) Pelaksanaan prakualifikasi direncanakan pada Q1 Tahun 2025.

	b) Saat ini sedang dilakukan perbaikan dokumen FBC dengan <i>outstanding issues</i>: modifikasi skema keuangan, penajaman biaya konstruksi, harga jual rusun dan pendataan calon penghuni rusun. c) Proyek akan didirikan di atas lahan BMD Kota Surabaya dengan skema Rusunami SKBG. 4) Rusun Pasar Jumat – TOD Lebak Bulus (Status <i>Reviu</i> OBC-FBC) a) Skema pengembalian proyek direncanakan menggunakan skema <i>user pay</i>. b) Pelaksanaan prakualifikasi direncanakan pada Q1 Tahun 2025 c) Diperlukan sosialisasi relokasi warga eksisting. d) Menunggu diterbitkannya PP amanat Pasal 36 ayat (6) UU 19 Tahun 2023 Tentang APBN 2024 sebagai persyaratan untuk memulai proses konstruksi. e) BUP diberikan kebebasan untuk menyediakan rusun komersial tersebut untuk hunian MBR. 5) Pelaksanaan Aplikasi <i>Dashboard</i> Simpul KPB a) Terdapat Perubahan link pada aplikasi <i>dashboard</i> karena dampak serangan kepada Pusat Data Nasional (PDN). b) <i>Dashboard</i> direncanakan <i>launching</i> pada bulan Agustus 2024. c) Masukan Dit.PPP terhadap aplikasi <i>dashboard</i> yaitu aplikasi menggunakan bahasa Indonesia, penambahan foto-foto lokasi dan menambah menu (<i>field</i>) data luas tapak, jumlah lantai, tipe unit, luas PSU dan penyeragaman satuan mata uang. Tindaklanjut: Melaksanakan strategi percepatan dalam pelaksanaan proyek dilengkapi dengan <i>timeline</i> proyek terupdate.
Dokumentasi	

Tanggal	6 Desember 2024																
Kegiatan	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan Tahap Penyiapan dan Tahap Transaksi Semester II TA 2024																
Tempat	Aviary Hotel Bintaro																
Peserta	1. Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 2. Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 3. Unsur Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; 4. Unsur Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 5. Unsur PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia; 6. Unsur PT. Sarana Multi Infrastruktur; dan 7. Unsur Unit Kerja di lingkungan DJPI.																
Hasil Kegiatan	a) Status Proyek KPBU Bidang Perumahan Prioritas <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proyek</th><th>Status</th><th>Target</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rusun Cisaranten Bina Harapan</td><td><i>Tender Preparation</i></td><td> 1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025 </td></tr> <tr> <td>Rusun Karawang Spuur</td><td><i>Tender Preparation</i></td><td> 1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025 </td></tr> <tr> <td>Rusun Perkotaan Surabaya</td><td><i>FBC</i></td><td> 1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026 </td></tr> <tr> <td>Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus</td><td><i>FBC</i></td><td> 1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026 </td></tr> </tbody> </table> b) Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Bidang Perumahan - Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung - Finalisasi dokumen FBC dan dokumen pengadaan. - Data calon penghuni saat ini yang telah lolos BI <i>checking</i> dan belum pernah menerima subsidi rumah sebanyak $\pm$ 1.180 orang. - Ditjen Perumahan telah menyiapkan anggaran pembebasan lahan untuk penambahan dan pelebaran jalan akses. - Rusun Karawang Spuur - Dokumen FBC dan dokumen pengadaan telah selesai. - Dirjen PI telah mengirimkan ND ke Bapak Sekjen No: 200/ND/DP/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Hal: Permohonan Konfirmasi Kapasitas Fiskal Kementerian PUPR untuk Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur. - PT PII sedang melakukan appraisal atas dokumen usulan penjaminan untuk dapat diterbitkan surat pertimbangan minat jamin saat pelaksanaan prakualifikasi dan surat <i>In Principle Approval</i> (IPA) dan Final Perjanjian Penjaminan pada saat pelaksanaan RfP. - Revitalisasi Rusun Pasar Jumat		Proyek	Status	Target	Rusun Cisaranten Bina Harapan	<i>Tender Preparation</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025	Rusun Karawang Spuur	<i>Tender Preparation</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025	Rusun Perkotaan Surabaya	<i>FBC</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026	Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus	<i>FBC</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026
Proyek	Status	Target															
Rusun Cisaranten Bina Harapan	<i>Tender Preparation</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025															
Rusun Karawang Spuur	<i>Tender Preparation</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q1-2025 2. Konstruksi pada Q4-2025															
Rusun Perkotaan Surabaya	<i>FBC</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026															
Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus	<i>FBC</i>	1. Pelaksanaan PQ pada Q2-2025 2. Konstruksi pada 2026															

	1) Skema proyek adalah Penugasan BUMN (Perum Perumnas). 2) Pengembalian investasi berupa <i>user charge</i>. 3) Proses PMN nontunai ditargetkan selesai akhir Tahun 2024. 4) Diperlukan pengaturan mengenai kompensasi yang akan didapatkan oleh masyarakat sekitar yang terdampak relokasi. 5) Penyempurnaan reviu <i>masterplan</i> dan desain penataan kawasan Pasar Jumat (berkoordinasi dengan PT MRT Jakarta). 4. Rusun Perkotaan Surabaya 1) Skema pengembalian investasi berupa <i>user pay</i>, yang bersumber dari hasil penjualan unit sarusun milik SKBG, dengan usulan skema <i>Build to Order</i>. 2) Data minat masyarakat terhadap calon penghuni rusun cukup tinggi sekitar 900-1.000 peminat. Pendataan calon penghuni rusun memanfaatkan Aplikasi Lentera Hijau. 3) Tim Kementerian PUPR dan Tim Pemerintah Kota Surabaya menyepakati Lokasi Proyek Penyediaan Rumah Susun (Rusun) Dengan Skema Pembiayaan Non Konvensional di Kota Surabaya yang akan ditindaklanjuti dalam dokumen Studi Kelayakan, yaitu di Tambak Wedi dan Sememi guna meningkatkan <i>economic of scale</i> proyek. 4) Pemerintah Kota Surabaya perlu menyiapkan aturan terkait rusun SKBG (masa sewa lahan 60 tahun yang dapat diperpanjang hingga 30 tahun). c) Masukkan dan Tanggapan Peserta Rapat 1. Kementerian PPN/Bappenas 1) Pelaksanaan KPBU Bidang Perumahan tetap menggunakan Peraturan Menteri PUPR No 2 Tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 2) Perlu memastikan kapasitas fiskal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 3) Mempersiapkan cara menanggulangi risiko <i>demand</i>, pelaksanaan <i>housing queue</i>, dan penetapan lokasi. 2. Pemerintah Kota Surabaya 1) Penyusunan regulasi Pemerintah Kota Surabaya seperti perjanjian infrastruktur, perjanjian BMD, dan turunan peraturan SKBG. 2) Saat ini masih dalam pendataan calon penghuni. 3. Perumnas 1) Proses PMN nontunai sudah dalam tahap akhir dan ditargetkan selesai akhir Tahun 2024, saat ini masih menunggu penetapan PP tentang PMN Perumnas oleh Presiden. Kendala PMN nontunai saat ini yaitu dari 10 lahan ada 2 lahan yang belum <i>clean and clear</i>. Diharapkan Kementerian PU dapat memproses 8 lahan terlebih dahulu secara parsial dan berkelanjutan.
--	---

	2) Skema penugasan BUMN dipilih dengan mempertimbangkan potensi <i>Land Value Capture</i> (LVC) 4. BHKP DJPI 1) Perubahan organisasi akan menyebabkan perubahan PJPk sehingga diperlukan penyesuaian produk hukum ke `depannya. 2) Diperlukan penguatan pengaturan untuk KPBU Rusunami, salah satunya melalui penyusunan Perpres Khusus KPBU Rumah Susun. 5. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan 1) Dit. PPP agar melakukan <i>update</i> pada aplikasi <i>Dashboard Simpul KPBU</i>. 2) Untuk Capaian Proyek KPBU Dit. PPP semula 2 proyek pada tahap penyiapan dan 4 proyek yang siap dikerjasamakan direvisi menjadi 2 proyek pada tahap penyiapan dan 2 proyek pada tahap transaksi (siap dikerjasamakan). Perlu ada 1 proyek yang tercapai pada tahap transaksi (siap dikerjasamakan) agar dapat memenuhi nilai capaian kinerja Dit. PPP dan DJPI yaitu Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur. 6. Kementerian Investasi BKPM Mendukung kegiatan evaluasi yang dilakukan Dit. PPP dan sesuai tusi akan mendukung kegiatan pelaksanaan <i>market sounding</i> KPBU Perumahan. 7. PT PII Menunggu progres proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan dan Rusun Karawang Spuur dalam rangka penyiapan penjaminan proyek. 8. PT SMI 1) PDF sudah diperpanjang dan berakhir di Maret 2025, FBC sudah selesai dan dokumen transaksi sudah disiapkan, namun konsultan sudah selesai masa kerjanya pada bulan November 2024. 2) Saat ini sedang proses BAST Proyek KPBU Rusun Karawang Spuur terkait dokumen FBC dan dokumen pengadaan. d) Pelaksanaan Aplikasi <i>Dashboard Simpul KPBU</i> a) Telah dilakukan <i>update</i> data dan informasi proyek KPBU Rusun Karawang Spuur, Rusun Cisaranten Bina Harapan, Rusun Perkotaan Surabaya, dan Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus. b) Terdapat kendala sistem saat melakukan <i>upload</i> bukti dukung dokumen pada tahapan kegiatan yang telah selesai Tindak Lanjut 1. Memastikan peralihan PJPk, pembentukan regulasi KPBU di Kementerian PKP, dan Kapasitas fiskal. 2. Koordinasi dengan Dit PSSPP untuk memperbesar <i>size</i> data <i>upload</i> pada aplikasi <i>Dashboard</i>.
--	---

Dokumentasi	
-------------	--

Dokumentasi Penyusunan Laporan Kinerja Atau Kegiatan Yang Terkait Penyelenggaraan SAKIP

Tanggal	20 Desember 2024
Kegiatan	Rapat Penyusunan Penyusunan Laporan Kinerja TA 2024 Dit. PPP
Tempat	Hotel Veranda Jakarta
Peserta	1. Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan; 2. Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 3. Unsur Subdit Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 4. Unsur Subdit Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 5. Unsur Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; 6. Unsur Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan; 7. Unsur Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
Hasil Kegiatan	1. Realisasi kinerja anggaran Dit. PPP: a) Status realisasi anggaran 30 November 2024 sebesar Rp25.352.361.000 (70,48%) dari pagu anggaran Rp35.840.354.000. Masih terdapat deviasi sebesar 16,64% dari target keuangan Bulan November 2024 sebesar 87,38%. b) Realisasi belanja pengadaan Dit. PPP sebesar Rp63.328.980 (47,63%). 2. Kapasitas organisasi Dit. PPP didukung dengan: a) 80 pegawai yang terdiri dari: 37 PNS, 15 PPPK, dan 28 Non-PNS.

	b) 34 Barang Milik Negara dengan kondisi kategori baik yang terdiri dari: komputer, AC, meja kerja, kursi kerja, dll. 3. Perkiraan nilai sementara capaian kinerja TA 2024: a) Program Dukungan Manajemen sebesar 24,56% (di bawah target 25%). b) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 100% (sesuai target 100%). Adapun nilai capaian kinerja Program Dukungan Manajemen di bawah target dikarenakan hanya tercapai 1 Kesepakatan dari target 2 Kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan sebagaimana target pada Renstra Revisi DJPI Tahun 2020-2024. 4. Strategi penyusunan Lakin Dit. PPP TA 2024: a) Penjelasan perubahan Renstra DJPI TA 2020-2024 dan kronologis perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. b) Analisa keberhasilan/kegagalan dan efisiensi anggaran. Salah satunya melalui analisis SDM dan anggaran. Karena kedua hal ini akan memperkuat keseimbangan antara keberlanjutan organisasi dan pemberdayaan Tim sehingga dapat menciptakan lingkungan yang produktif dan terkendali. c) Sandingan capaian kinerja selama tahun Renstra (2020-2024). d) Analisis capaian kinerja organisasi di aplikasi <i>e-Sakip</i> dengan capaian kinerja individu (SKP) e) Sistematisasi Penyusunan Lakin berdasarkan Permen PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR dan memperhatikan buku pedoman penyusunan Lakin di lingkungan Kementerian PUPR serta format Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tindak Lanjut: 1. Pembahasan Evaluasi Capaian Kinerja Dit. PPP TA 2024 pada Minggu ke-tiga Desember 2024. 2. Target penyelesaian Lakin Dit. PPP TA 2024 pada Minggu ke-1 Januari 2025.
Dokumentasi	

Dokumentasi Berupa Inovasi Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan SAKIP

Tanggal	Selasa, 26 Maret 2024
Kegiatan	Rapat Pembahasan Penyusunan Profil Risiko TA 2024
Tempat	Vega Hotel Gading Serpong
Peserta	A. BP Tapera Direktur Teknologi Informasi B. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; 2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; 3. Kepala Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan, Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan; 4. Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; 5. Para Kepala Subdirektorat di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan; 6. Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan.
Hasil Kegiatan	1. Usulan pernyataan risiko "Belum tersedianya akses jalan yang memadai untuk menuju lokasi Proyek KPBU Sektor Perumahan" diubah menjadi "Belum tersedianya akses jalan yang memadai untuk menuju lokasi Proyek KPBU Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung". Hal ini dikarenakan risiko terkait belum tersedianya akses jalan hanya terjadi pada proyek Rusun Cisaranten saja. Sehingga masukan dari Setditjen didetailkan berdasarkan lokasi proyek. 2. Usulan pernyataan risiko "Kelebihan Pembayaran SBK kepada Debitur yang klaim asuransi kreditnya telah dibayar oleh asuradur" diusulkan dihapus karena memiliki kesamaan pada inovasi pengendalian di risiko UPRT-1 TA 2024. 3. Adanya penambahan usulan pernyataan risiko "Turunnya indeks survei penilaian integritas (SPI) DJPI" yang merupakan turunan dari risiko yang terdapat pada UPRT-1 DJPI.

	4. Perlu dilakukan penajaman analisis kemungkinan dan analisis dampak pada pernyataan risiko pada profil risiko UPR-T2 TA 2024. 5. Perbaikan pada pemantauan level risiko Tahun 2023 untuk risiko proyek tidak memiliki sumber air bersih yang berkelanjutan, dapat dilakukan dengan penyampaian Nota Dinas ke Setditjen PI ditembuskan Kepatuhan Intern, Direktorat PSSPP. 6. Perlu dilakukan pengurutan nilai level risiko dari yang memiliki risiko terbesar sampai dengan yang terkecil.
Dokumentasi	

Tanggal	Jumat, 22 November 2024
Kegiatan	Workshop Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Tahun 2024
Tempat	Vega Hotel Gading Serpong
Peserta	1. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal Kementerian PU; 2. Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Dit.PSSPP; 3. Unsur Biro PAKLN, Sekretariat Jenderal Kementerian PU; 4. Para Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan di Lingkungan DJPI
Hasil Kegiatan	1. Pada Tahun 2023, nilai AKIP semua unit kerja Eselon II di lingkungan DJPI berkategori A (Memuaskan). Dit.PPP berada di

peringkat ke-dua dengan nilai 85,10 dan peringkat pertama adalah Setditjen dengan nilai 86.00.

2. Strategi pencapaian kinerja dalam mendukung implementasi AKIP DJPI Tahun 2024:

ITEM	KELEMAHAN	STRATEGI
Perencanaan	Perubahan Renstra Ditjen PIPU&P belum didukung penetapan dari BPIW atas indikator baru yang akan digunakan	koordinasi dengan pihak terkait khususnya BPIW dalam perumusan indikator kinerja
	<i>Crosscutting</i> belum maksimal termanfaatkan dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Perlu ada koordinasi dengan unit organisasi (unor) terkait perihal program yang terdapat <i>crosscutting</i>
Pengkuran Kinerja	Dalam penyajian Laporan Monev Bulanan tidak adanya rincian setiap komponen pada perhitungan IKSP dan perbedaan metode perhitungan dengan Renstra	Menyajikan jumlah unit detail dari setiap komponen program misalkan realisasi tapera,smf, flpp, sbum, dan ssb tidak hanya persentase secara keseluruhan.
	Belum terlihat adanya pengaruh pengukuran kinerja aktivitas yang berdampak pada kebijakan dan strategi dalam mencapai kinerja yang diharapkan	Setiap deviasi capaian realisasi kinerja perbulan disajikan analisis serta alternatif solusinya dalam Laporan Monev Bulanan
Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar penulisan atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaannya	Sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR (atau Buku Pedoman yang disepakati Bersama) Serta Menyajikan informasi ketidaktercapaian alasan/hambatan/kendala atas penurunan kinerja sebagai informasi dalam Laporan Kinerja baik dalam sandingan target di tahun berjalan maupun sandingan dengan capaian tahun sebelumnya

		Deviasi belum dilakukan analisis	Atas adanya deviasi dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya dalam Laporan Kinerja sehingga tercapai pengambilan mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tim Evaluator dalam surat tugas belum sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021	Diharapkan penanggungjawab dari eselon II, dan pengawas dari eselon III
		Implementasi SAKIP dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum termanfaatkan dengan maksimal	Tampilkan nilai efisiensi program untuk mengetahui pencapaian maksimal dalam anggaran maupun kinerja
	3. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan buku panduan penulisan laporan kinerja yang disiapkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. 4. Menyusun Laporan Kinerja Dit.PPP TA 2024 tepat menggunakan SOTK Kementerian PUPR. Tindak lanjut Batas waktu penyusunan Laporan Kinerja untuk tingkat unit kerja adalah minggu ke-2 Januari 2024 dan untuk tingkat unit organisasi adalah minggu ke-3 Januari 2025		
Dokumentasi			

Tanggal	Kamis, 14 November 2024
----------------	-------------------------

Kegiatan	Rapat Tinjauan Manajemen dan Persiapan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Tempat	Ruang Rapat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Peserta	1. Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi; 2. Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi; 3. Kepala Subbagian Tata Usaha; 4. Ketua Tim Pokja Bidang Tugas Perencanaan dan Identifikasi Kerjasama Pembiayaan Perumahan; 5. PPK Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Bidang Perumahan; 6. Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan; 7. Tim Konsultan PT Webgis indonesia, dan; 8. Para staf di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Hasil Kegiatan	1. Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP) dan persiapan menuju Sertifikasi SMAP Direktorat PPP 2. Ketua Tim FKAP Direktorat PPP melaporkan kepada Direktur PPP selaku Manajemen Puncak beberapa hal diantaranya sebagai berikut: a) Terkait dengan status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya, kegiatan Tinjauan Manajemen ini merupakan kegiatan yang pertama kali, mengingatkan komitmen awal penerapan SMAP pada kegiatan <i>kickoff</i> pada tanggal 5 Agustus 2024; b) Isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan; c) Pemahaman kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan; d) Identifikasi risiko korupsi dan mitigasi risikonya berdasarkan isu eksternal dan internal; e) Sasaran anti penyuapan dan rencana program untuk mencapainya; f) Berdasarkan hasil temuan audit internal pada tanggal 28 Oktober 2024 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan masukan tindakan koreksi. 3. Arahan Direktur PPP terhadap penerapan SMAP ISO 37001:2016 kepada tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) diantaranya sebagai berikut: a) Perlu dilakukan sosialisasi SMAP internal dan eksternal sekali lagi;

	b) Agar dapat ditambahkan hasil monitoring progres rencana program anti penyuapan; c) Seluruh pegawai agar diinformasikan dan melakukan persiapan untuk audit eksternal. Akan dilaksanakan Audit Eksternal dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 (secara <i>online</i> pengecekan dokumen) dan Tahap II dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024 (secara <i>offline</i>).
Dokumentasi	



Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat